



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS RESIKO KEMISKINAN RUMAH TANGGA DI PROVINSI
BANTEN**

TESIS

**AINUL HAYATI
100791404**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
JAKARTA
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS RESIKO KEMISKINAN RUMAH TANGGA DI PROVINSI
BANTEN**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Ekonomi**

**AINUL HAYATI
100791404**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI PERENCANAAN KOTA DAN DAERAH
JAKARTA
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

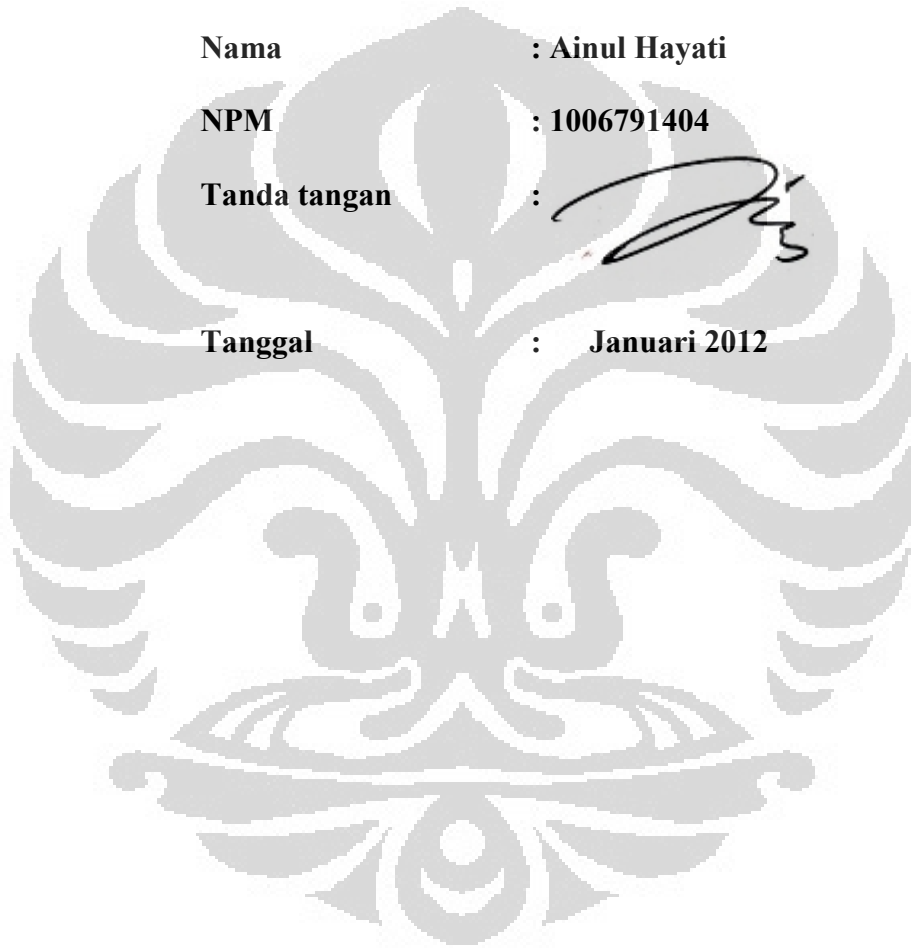
**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Ainul Hayati

NPM : 1006791404

Tanda tangan : 

Tanggal : Januari 2012



HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia

Jika kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggungjawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan Universitas Indonesia kepada saya.



Salemba, Januari 2012



(Ainul Hayati)

1006791404

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Ainul Hayati
NPM : 1006791404
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Analisis Resiko Kemiskinan Rumah Tangga di
Provinsi Banten

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Sartika Djamaluddin

Ketua Penguji : Iman Rozani, SE.,M.Soc.Sc

Anggota Penguji : Dewi Meisari, M.Sc

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : Januari 2012

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, semua atas ijin Allah SWT, akhirnya saya bisa menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ekonomi pada Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Sartika Djamaluddin selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Ketua Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) FEUI beserta staf administrasi program yang telah banyak memberikan kemudahan dalam proses perkuliahan.
3. Seluruh pengajar di Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
4. Badan Pusat Statistik Jakarta, yang telah menyediakan data untuk penelitian ini
5. Pemerintah Provinsi Banten, terutama BPS Provinsi Banten (Bapak Ripto Hukari) yang telah membantu memberikan informasi dan data tambahan yang diperlukan dalam penulisan tesis ini
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Serang khususnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Serang yang telah memberikan izin tugas belajar dan membebaskan saya dari pekerjaan sebagai PNS selama saya kuliah.
7. Pihak Bappenas sebagai sponsor, yang telah membiayai kuliah saya di MPKP ini.
8. Kedua orang tuaku, H. Hafidz & Hj. Nurul Aeniah yang tiada henti memberikan kasih sayang, doa, dan semangat untuk keberhasilan penulis.
9. Saudara-saudaraku tercinta terutama Teh Yoyoh Hulaiyah Hafidz yang membantu segala hal yang berkaitan dengan akomodasi selama kuliah di Jakarta ini.

10. Suamiku, Azni, atas ijin, doa dan kesabarannya membimbing anak-anak dan menanti penulis menyelesaikan pendidikan di Salemba. Ketiga anakku Aa Vikra Ardiansyah Zaini, Gemala Aleida Fitri dan De Yusuf Nurmaulid atas doa dan pengertiannya selama Mama menyelesaikan kuliah ini
11. Teman-teman sekelas di Magister Ilmu Perpustakaan tahun angkatan 2010. Spesial untuk geng CTM yaitu Mbak Arti, Ria, Mbak Windi (teman sejalan saat saya pulang ke Pandeglang) dan Mbak May. Duo Mola, Ahmad Maulana dan Arga Maulana teman minum kopi yang asik.
12. Para Informan yang ada dalam penelitian ini, semoga hasil penelitian ini menjadi penyemangat untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi.

Penulis berdoa semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna untuk itu masukan dari pembaca senantiasa ditunggu untuk perbaikan. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya Ilmu Ekonomi.

Jakarta, Januari 2012



Ainul Hayati

1006791404

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainul Hayati
NPM : 1006791404
Program Studi : Magister Perencanaan & Kebijakan Publik
Fakultas : Ekonomi Universitas Indonesia
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Analisis Resiko Kemiskinan Rumah Tangga di Provinsi Banten** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta

Pada tanggal : Januari 2012

Yang menyatakan


(Ainul Hayati)

ABSTRAK

Nama : Ainul Hayati
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul : Analisis Resiko Kemiskinan Rumah Tangga di Provinsi Banten

Kemiskinan merupakan isu yang selalu menarik untuk dibahas, karena hampir tidak ada satu negara pun di dunia ini yang terbebas dari masalah kemiskinan. Tesis ini dilatarbelakangi adanya perbedaan angka kemiskinan yang cukup mencolok antar Kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten. Fokus penelitian adalah melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab terhadap perbedaan angka kemiskinan tersebut dengan menggunakan data Susenas tahun 2010. Dengan menggunakan variabel lokasi geografis, jumlah anggota rumah tangga, karakteristik kepala rumah tangga (jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan), serta variabel bantuan kredit usaha untuk penanggulangan kemiskinan, didapati bahwa penyebab tingginya resiko kemiskinan rumah tangga adalah lokasi geografis dan penambahan jumlah anggota rumah tangga. Hasil penelitian merekomendasikan untuk membuat kebijakan dengan memprioritaskan pembangunan wilayah pedesaan dan pengendalian terhadap laju pertumbuhan penduduk.

Kata Kunci :
Kemiskinan rumah tangga, lokasi geografis, pendidikan.

ABSTRACT

Name : Ainul Hayati
Study Program : Master of Planning and Public Policy
Title : Risk Analysis of Household Poverty in Banten Province

Poverty is an issue that is always interesting to discuss, because almost no other country in the world which is free from this problem kemiskinan. Tesis poverty against the backdrop of differences are quite striking between the district / city in the province of Banten. The focus of research is to conduct an analysis of the factors thought to be the cause of the difference in poverty rates by using data Susenas in 2010. By using the variable geographic location, number of household members, household head characteristics (sex, education and employment), and variable business loans for poverty reduction, it was found that the cause of the high risk of household poverty are geographic location and the addition of the number of household members. The study recommends to create a policy to prioritize the development of rural areas and the control of population growth.

Keyword:
Household poverty, geographic location, education.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Hipotesis Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Kemiskinan.....	9
2.2 Klasifikasi Kemiskinan.....	10
2.2.2 Kemiskinan Absolut dan Relatif.....	10
2.2.3 Kemiskinan Natural, Kemiskinan Kultural dan Kemiskinan Struktural	11
2.2.3 Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan	13
2.2.4 Perempuan dan Kemiskinan	14
2.3 Ukuran-Ukuran Kemiskinan	15
2.3.1 Ukuran Badan Pusat Statistik	15
2.3.2 Ukuran Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	16
2.3.3 Ukuran Indeks Kemiskinan Manusia	16
2.3.4 Pengukuran Kemiskinan dengan Pendekatan Berbasis Hak	17
2.4 Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan	18
2.5 Profil Provinsi Banten	21
2.1.1 Sekilas Provinsi Banten	21
2.1.2 Kondisi Geografis	22
2.1.3 Pemerintahan	23
2.1.4 Penduduk	23
2.1.5 Ketenagakerjaan	24
2.1.6 Pendidikan	25
2.6 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten, 2002-2010	26
2.7 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan	27
2.8 Studi Empiris Kemiskinan yang Pernah Dilakukan	28

3 METODE PENELITIAN	30
3.1 Data	30
3.1.1 Pengolahan Data	30
3.1.2 Penentuan Garis Kemiskinan	31
3.2 Spesifikasi Model	32
3.3 Penjelasan Variabel	33
3.3.1 Variabel Terikat (<i>Dependent Variabel</i>)	33
3.3.2 Variabel Bebas (<i>Independent Variabel</i>)	34
3.4 Pemilihan Model Penelitian	37
3.5 Klasifikasi Model Logit	42
3.6 Pengujian Statistika dan Signifikansi Variabel	43
3.7 Interpretasi Dengan Odds Ratio.....	47
4 PENGUJIAN DAN ANALISIS	49
4.1 Uji Pelanggaran Multikolinearitas	50
4.2 Uji Keseluruhan Model (Uji G)	50
4.3 Uji Variabel (<i>Uji Wald</i>)	51
4.4 INTERPRETASI HASIL DAN ANALISIS	54
4.4.1 Profil Rumah Tangga di Provinsi Banten.....	54
A. Klasifikasi Desa/Kelurahan & Jumlah Rumah Tangga	54
B. Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga	55
C. Jumlah Anggota Rumah Tangga	56
D. Pendidikan Kepala Rumah Tangga	56
E. Pekerjaan Kepala Rumah Tangga	57
F. Bantuan Kredit Usaha	57
4.4.2 Analisis Hasil Estimasi	58
A. Pengaruh Klasifikasi Desa/Kelurahan Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga	59
B. Pengaruh Perbedaan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga	62
C. Pengaruh Jumlah Anggota Rumah Tangga Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga	64
D. Pengaruh Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga	67
E. Pengaruh Pekerjaan Kepala Rumah Tangga Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga	70
F. Pengaruh Program Bantuan Kredit Usaha Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga	72
5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Rekomendasi Kebijakan	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Daerah, 2000-2010	2
Tabel 1.2	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) di Provinsi Banten Tahun 2010	3
Tabel 2.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Banten Menurut Daerah, 2002-2010	26
Tabel 3.1	Garis Kemiskinan Provinsi Banten	32
Tabel 3.2	Variabel Dependen	33
Tabel 3.3	Nilai dari Cumulative Probability Function	42
Tabel 3.4	Perbandingan Pengujian Regresi linier dan Regresi Logistik	44
Tabel 3.5	Nilai Tingkat Keyakinan dan Tingkat Nyata	45
Tabel 4.1	Hasil Uji Keseluruhan Model (Uji G)	51
Tabel 4.2	Hasil Uji Variabel (Uji <i>Wald</i>) dan Arah Secara Statistik	52
Tabel 4.3	Profil JART dan Rata-Rata JART	56
Tabel 4.4	Nilai <i>Odds Ratio</i> dan Besar/Kecil Resiko Rumah Tangga Dapat Menjadi Miskin	59
Tabel 4.5	Nilai <i>Odds Ratio</i> Untuk Variabel Klasifikasi Desa/Kelurahan	60
Tabel 4.6	Nilai <i>Odds Ratio</i> Untuk Variabel Jenis Kelamin	63
Tabel 4.7	Nilai <i>Odds Ratio</i> Untuk Variabel JART	65
Tabel 4.8	Nilai <i>Odds Ratio</i> Untuk Variabel Pendidikan Kepala RT	67
Tabel 4.9	Data Pencari Kerja di Kota Tangerang Tahun 2009	69
Tabel 4.10	Indeks Pembangunan Manusia dan komponennya di Provinsi Banten tahun 2009	70
Tabel 4.11	Nilai <i>Odds Ratio</i> Untuk Variabel Pekerjaan Kepala RT	70
Tabel 4.12	Nilai <i>Odds Ratio</i> Untuk Variabel Bantuan Kredit	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Transformasi Logit	41
Gambar 3.2	Distribusi Kumulatif Logit dan Probit	41
Gambar 4.1	Jumlah Rumah Tangga & Klasifikasi Desa/Kelurahan	55
Gambar 4.2	Profil Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga	55
Gambar 4.3	Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga	56
Gambar 4.4	Jenis Pekerjaan Kepala Rumah Tangga	57
Gambar 4.5	Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Bantuan Kredit	58
Gambar 4.6	Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten	61
Gambar 5.1	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Resiko Kemiskinan Rumah Tangga di Provinsi Banten	78

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global yang dihadapi setiap bangsa, tidak ada satupun negara di dunia ini yang bebas dari kemiskinan. Kemiskinan merupakan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradaban. Kemiskinan pada hakikatnya menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik akibat ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan hidup, maupun akibat ketidakmampuan negara atau masyarakat dalam memberikan perlindungan sosial kepada warganya¹.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya².

Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan menjadi agenda penting pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2000, 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menandatangani kesepakatan Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals*) yaitu untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat yang ditargetkan tercapai pada tahun 2015, dimana salah satu butir dari 8 butir kesepakatannya adalah memberantas kemiskinan dan kelaparan. Sejalan dengan itu, maka dalam RPJM 2010-2014 pemerintah telah menyusun tujuan-tujuan pokok

¹ Suharto (2009: 16)

² Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, Bab XVI.

dalam pengentasan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan termasuk salah satu dari 11 prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014, dengan target penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% pada 2014 dengan menitikberatkan pada perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah.

Tabel 1.1 memperlihatkan jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia menurut daerah (kota dan desa), terdapat penurunan penduduk miskin selama periode tahun 2000-2010, yakni dari 19.13% di tahun 2000, menjadi 13.33% di tahun 2010. Sesuai dengan RPJM 2010-2014, diharapkan pada tahun 2014 nanti penurunan penduduk miskin akan terus terjadi sehingga target jumlah penduduk miskin di kisaran 8-10% dapat tercapai.

**Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia
Menurut Daerah, 2000-2010**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa)			% Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D
2000	12.31	26.42	38.73	14.6	22.37	19.13
2001	8.57	29.12	37.69	9.8	24.8	18.4
2002	13.3	25.1	38.4	14.6	21.1	18.2
2003	12.2	25.1	37.3	13.57	20.23	17.42
2004	11.5	24.6	36.1	12.6	19.5	16.6
2005	12.4	22.7	35.1	11.68	19.98	15.97
2006	14.49	24.81	39.3	13.47	21.81	17.75
2007	13.6	23.6	37.2	12.52	20.37	16.58
2008	12.8	22.2	34.95	11.65	18.93	15.42
2009	11.9	20.6	32.52	10.72	17.35	14.15
2010	11.09	19.92	31.01	9.87	16.56	13.33

Sumber : BPS, Maret 2011

Dari tabel di atas terlihat jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret 2010 mencapai 31,02 juta (13,33 persen), turun 1,51 juta dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2009 yang sebesar 32,53 juta (14,15 persen).

Berdasarkan komposisi penduduk miskin menurut wilayah kota dan desa, maka penduduk miskin lebih banyak tinggal di perdesaan. Jumlah penduduk miskin yang berada di perdesaan selama periode Maret 2009 – Maret 2010 berkurang 0,69 juta orang (dari 20,62 juta pada Maret 2009 menjadi 19,93 juta pada Maret 2010). Sementara pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin yang tinggal di perkotaan berkurang 0,81 juta (dari 11,91 juta pada Maret 2009 menjadi 11,10 juta pada Maret 2010). Perbedaan kondisi geografis dan sebaran penduduk yang ada pada masyarakat perdesaan dan perkotaan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan itu sendiri.

Angka 13,02 juta orang yang masih hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2010, menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi persoalan besar yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Tapi pada dasarnya kemiskinan di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Kompleksitas dan keberagaman kemiskinan ini tergantung pada kondisi utama yang dihadapi masing-masing daerah. Karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh pemerintah daerah. Banten merupakan provinsi muda dengan kompleksitas permasalahan kemiskinan. Tabel 1.2 memperlihatkan jumlah penduduk miskin yang tersebar di setiap kabupaten/kota yang berada di provinsi Banten.

Tabel 1.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) di Provinsi Banten Tahun 2010

Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin	% Penduduk Miskin (PO)	Indeks Kedalaman (P1)	Indeks Keparahan (P2)
Pandeglang	127.8	11.14	1.2	0.23
Lebak	125.2	10.38	1.34	0.27
Tangerang	205.1	7.18	1.31	0.36
Serang	89.2	6.34	0.75	0.13
Kota Tangerang	124.3	6.88	1.1	0.46
Kota Cilegon	16.8	4.46	0.84	0.22
Kota Serang	40.7	7.03	1.06	0.23
Kota Tangsel	21.9	1.67	0.35	0.11
Banten	751	7.02	1.04	0.28

Sumber : BPS Provinsi Banten, Juli 2011

Pada tabel diatas terlihat bahwa tingkat kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 1,04 dan keparahan kemiskinan (P2) sebesar 0,28. Tingkat ketimpangan cukup rendah dan variasi pengeluaran di antara penduduk miskin juga rendah. Tingkat kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran rata-rata penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk terhadap garis kemiskinan. Sementara tingkat keparahan kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai tingkat ketimpangan, semakin besar ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Dibandingkan dengan angka nasional, dimana tingkat ketimpangan kemiskinan nasional sebesar 2,21 dan tingkat ketimpangan kemiskinan 0,58, maka tingkat kemiskinan di Provinsi Banten lebih rendah dari angka nasional dengan tren yang hampir sama. Namun demikian, perbedaan Tingkat Kemiskinan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten cukup tinggi. Kabupaten Pandeglang menempati urutan pertama yang jumlah penduduk miskinnya paling tinggi (11,14%), disusul oleh Kabupaten Lebak (10,38%) dan posisi ketiga adalah Kabupaten Tangerang (7,18%). Sementara angka kemiskinan yang paling kecil berada di Kota Tangerang Selatan (1,67%). Kemiskinan lebih banyak di wilayah selatan (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak) lebih bersifat perdesaan. Sumber penghasilan utama penduduk miskin di Banten Selatan adalah sektor pertanian. Banyak rumah tangga yang hidup di sekitar garis kemiskinan (hampir miskin), mereka tidak tergolong miskin tetapi sangat rentan terhadap kemiskinan.

Kemiskinan di Provinsi Banten yang tersebar di daerah-daerah selatan seperti Kabupaten Lebak dan Kabupaten Padeglang, maupun Pantura Tangerang, mendeskripsikan bahwa minimnya peran pemerintah di daerah bersangkutan dalam usaha mereduksi kemiskinan, ditambah lagi rendahnya komitmen dan kemampuan pemerintah daerah merancang kebijakan *pro-poor*, yang didasari oleh pemahaman akan kemiskinan yang multidimensional tersebut.

Program-program anti kemiskinan yang digulirkan oleh pemerintah seperti BLT, PNPM Mandiri, P2KP dan lain sebagainya, membuat jumlah penduduk miskin terkoreksi dan terus mengalami penurunan pada tahun 2007 sampai dengan 2010.

Meskipun demikian, mengeluarkan masyarakat dari perangkap kemiskinan, memperkecil ketimpangan diantara penduduk miskin maupun penduduk yang tidak miskin tetaplah harus menjadi prioritas semua pihak, terutama pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurut data Susenas tahun 2010 dari 6366 rumah tangga yang mendapat bantuan kredit usaha yang digulirkan hanya 438 RT (6,9%).

Perbedaan angka kemiskinan yang cukup besar diantara kabupaten/kota di dalam Provinsi Banten menegaskan adanya variasi kemiskinan antar kabupaten dengan kota. Untuk itu diperlukan analisis resiko kemiskinan yang diarahkan pada unit kabupaten/kota untuk mengetahui perbedaan kondisi dan perkembangan kemiskinan terutama faktor-faktor yang mempengaruhi resiko kemiskinan di tingkat kabupaten/kota tersebut, untuk nantinya bisa diambil kebijakan-kebijakan yang tepat agar perbedaan angka kemiskinan antara kabupaten/kota di Provinsi Banten bisa dikurangi. Sebab, jika tidak disikapi dengan kebijakan yang tepat, perbedaan angka kemiskinan yang cukup tajam ini bisa jadi akan memicu kecemburuan sosial dan konflik di daerah.

Data Susenas Provinsi Banten tahun 2010 yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 6.366 rumah tangga dengan total jumlah anggota rumah tangga sebanyak 26.472 jiwa atau rata-rata 4,16/rumah tangga. Dari 6.366 rumah tangga tersebut 292 RT merupakan rumah tangga miskin dan sisanya 6074 adalah rumah tangga tidak miskin, dimana 2209 RT (34,7%) tinggal di desa, sisanya 65,3% tinggal di kota. Masih menurut data Susenas Provinsi Banten bahwa dari 6366 kepala rumah tangga, sebanyak 778 (12,2%) kepala rumah tangganya adalah perempuan yang sebagian besar berpendidikan dasar yaitu sebanyak 79%, pendidikan menengah 15% dan pendidikan tinggi 7%. Sementara kepala rumah tangga laki-laki yang berpendidikan dasar hanya 62%, pendidikan menengah 27% dan pendidikan tinggi 11%, terlihat ada ketimpangan tingkat pendidikan antara kepala rumah tangga laki-laki dan perempuan. Sementara untuk pekerjaan kepala rumah tangga data Susenas tahun 2010 menunjukkan sebanyak 31,3% bekerja di sektor pertanian, 24% bekerja di sektor industri dan sisanya bekerja di sektor perdagangan dan jasa.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Kemiskinan adalah masalah yang harus ditanggulangi bersama
2. Adanya perbedaan angka kemiskinan yang cukup tinggi antar kabupaten/kota di Provinsi Banten, yang menegaskan bahwa resiko kemiskinan antar daerah berbeda-beda.
3. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan perbedaan angka kemiskinan antar kabupaten/kota tersebut?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan mengkaji faktor-faktor penyebab tingginya resiko kemiskinan pada rumah tangga di provinsi Banten, selama kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2010.

Adapun langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Menginventarisir berbagai data/informasi/literatur yang terkait dengan topik penelitian ini dalam rangka mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi resiko kemiskinan rumah tangga di provinsi Banten
- b) Menganalisa data/informasi/literatur yang diperoleh dengan menggunakan model yang sesuai dengan topik yang di bahas dalam penelitian ini, baik dalam konteks provinsi, maupun kabupaten atau kota khususnya didalam wilayah kesatuan provinsi Banten
- c) Berdasarkan hasil analisa dan estimasi terhadap masing-masing model dalam penelitian ini, maka akan disimpulkan dan dirumuskan rekomendasi upaya pengurangan resiko kemiskinan rumah tangga khususnya di provinsi Banten.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi resiko kemiskinan rumah tangga di provinsi Banten
- b) Mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan diantara faktor-faktor tersebut, baik dalam konteks provinsi maupun kabupaten atau kota khususnya didalam wilayah kesatuan provinsi Banten
- c) Merumuskan rekomendasi upaya pengurangan kemiskinan khususnya di provinsi Banten didasarkan pada hasil penelitian tesis ini.

1.5 Hipotesis Penelitian

Penyebab kemiskinan sangat sulit untuk dipastikan, namun Tulus (2006) menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab kemiskinan di Indonesia adalah : tingkat pendidikan yang rendah; produktivitas tenaga kerja rendah; tingkat upah yang rendah; distribusi pendapatan yang timpang; kesempatan kerja yang kurang; kualitas sumberdaya alam masih rendah; penggunaan teknologi masih kurang; etos kerja dan motivasi pekerja yang rendah; kultur/budaya (tradisi); dan politik yang belum stabil. Kemiskinan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Sehingga praduga awal dari penelitian ini adalah:

- 1) Klasifikasi desa/kelurahan berpengaruh terhadap resiko kemiskinan rumah tangga, jika sebuah rumah tangga berada di perdesaan, maka resiko menjadi miskin semakin besar. Klasifikasi desa/kelurahan didasarkan pada indikator berupa beberapa variabel yang terdiri dari fitur-fitur atau fasilitas yang berada di suatu wilayah (potensi desa/kota).
- 2) Jenis kelamin kepala rumah tangga berpengaruh terhadap resiko kemiskinan rumah tangga, jika kepala rumah tangganya perempuan, maka resiko menjadi miskin semakin besar.
- 3) Jumlah anggota rumah tangga berpengaruh positif terhadap resiko kemiskinan rumah tangga, semakin banyak anggota rumah tangga, resiko menjadi miskin semakin besar.

- 4) Jenis pekerjaan kepala rumah tangga berpengaruh terhadap resiko kemiskinan rumah tangga, jika bekerja pada sektor pertanian, maka resiko menjadi miskin semakin besar
- 5) Tingkat pendidikan kepala rumah tangga berpengaruh terhadap resiko kemiskinan rumah tangga, semakin tinggi tingkat pendidikan kepala rumah tangga, resiko menjadi miskin semakin kecil.
- 6) Program bantuan kredit usaha yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah/swasta seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Bank selain KUR maupun program lainnya akan memberikan pengaruh positif terhadap penurunan angka resiko kemiskinan rumah tangga.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab, dengan urutan sebagai berikut :

- 1) Bab I PENDAHULUAN, yang memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, hipotesa dan sistematika penulisan.
- 2) Bab II TINJAUAN PUSTAKA, menjelaskan teori kemiskinan dengan aspek-aspek kronologi upaya pengentasan kemiskinan dan temuan-temuan studi yang berkaitan dengan masalah kemiskinan dan cara penanggulangannya, serta profil kemiskinan di Provinsi Banten.
- 3) Bab III METODE PENELITIAN, menjelaskan data yang digunakan, proses pengolahan data dan metodologi yang digunakan dalam melakukan analisis terhadap kemiskinan di Provinsi Banten.
- 4) Bab IV PENGUJIAN DAN ANALISIS, menjelaskan hasil yang didapatkan dari proses estimasi yang dilakukan.
- 5) Bab V KESIMPULAN, menyimpulkan hasil analisis yang telah dilakukan serta merekomendasikan kebijakan yang bisa dilakukan di masa yang akan datang.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.2 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan sebuah konsep abstrak, yang dapat didefinisikan secara berbeda tergantung dari pengalaman dan perspektif para penilai/analisis. Cara pandang masing-masing orang akan menentukan pemahaman tentang kondisi, sifat dan konteks kemiskinan; bagaimana kemiskinan terjadi; apa sajakah penyebab kemiskinan; dan bagaimana masalah kemiskinan dapat diatasi. Agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara tepat, diperlukan elaborasi pengertian kemiskinan secara komprehensif dan objektif.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran per kapita selama sebulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan standar minimum. Kebutuhan standar minimum digambarkan dengan garis kemiskinan (GK) yaitu batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Batas pemenuhan minimum mengacu pada rekomendasi Widya Karya Nasional dan Gizi pada tahun 1978, yaitu nilai rupiah dari pengeluaran untuk makanan yang menghasilkan energi 2.100 kilo kalori per orang setiap harinya. Sedangkan kebutuhan non pangan mencakup pengeluaran untuk perumahan, penerangan, bahan bakar, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, barang-barang tahan lama serta barang dan jasa esensial lainnya.

Asian Development Bank/ADB (1999) memahami masalah kemiskinan sebagai perampasan terhadap aset-aset dan kesempatan-kesempatan penting dimana individu pada dasarnya berhak atas haknya. ADB mengakui adanya hambatan-hambatan struktural yang menyebabkan tidak terealisasinya hak-hak orang miskin.

Kemiskinan adalah ketidakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintah sehingga mereka berada pada posisi

yang sangat lemah dan tereksplotasi. Pengertian ini dikenal dengan kemiskinan struktural. Kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga berhubungan erat dengan berbagai dimensi kehidupan manusia seperti jaminan kesehatan, pendidikan, masa depan dan peranan sosial.

Dari berbagai definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa kemiskinan adalah merupakan sebuah kondisi dimana seseorang atau suatu keluarga berada dalam keadaan; kekurangan dan atau ketidaklayakan dalam memenuhi kebutuhan pokok (utama), kekurangan atau ketiadaan akses dalam memperoleh pelayanan minimal dalam berbagai bidang kehidupan yang disebabkan oleh akibat sampingan dari suatu kebijakan yang tidak dapat dihindari, yang merupakan akar kemiskinan dan akan mengakibatkan ketidakberdayaan penduduk lapisan masyarakat bawah, sehingga membawa pada gejala kemiskinan yang bersifat multidimensional, karena dalam kenyataannya berurusan juga dengan persoalan-persoalan non ekonomi (sosial, budaya dan politik)

2.3 Klasifikasi Kemiskinan

2.3.1 Kemiskinan absolut dan relatif

Kemiskinan absolut dan relatif adalah konsep yang mengacu pada kepemilikan materi dikaitkan dengan standar kelayakan hidup seseorang/keluarga. Kedua istilah ini menunjuk pada perbedaan sosial (*sosial distinction*) yang ada dalam masyarakat. Perbedaannya adalah bahwa pada kemiskinan absolut ukurannya sudah terlebih dahulu ditentukan dengan angka-angka (garis kemiskinan) dan atau indikator atau kriteria yang digunakan, sementara pada kemiskinan relatif katagorisasi kemiskinan ditentukan berdasarkan perbandingan relatif tingkat kesejahteraan antar penduduk.

Menurut Todaro (2008: 203) kemiskinan dapat dibedakan menurut sifatnya yang terdiri atas : kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Konsep kemiskinan absolut adalah jumlah masyarakat yang hidup dibawah tingkat penghasilan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan

tempat tinggal. Sedangkan kemiskinan relatif adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat yang meskipun tingkat pendapatannya sudah mampu mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum tetapi masih tetap jauh lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya (Esmara, 1986).

Sementara Sach (2005: 20) membedakan kemiskinan dalam tiga katagori yaitu kemiskinan ekstrim (absolut), kemiskinan moderat dan kemiskinan relatif. Kemiskinan ekstrim adalah situasi rumah tangga yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Rumah tangga yang mengalami kemiskinan ekstrim berada dalam situasi kelaparan kronis, tidak mampu mengakses sarana kesehatan, tidak memiliki sumber air minum bersih dan sanitasi yang baik, tidak mampu menyekolahkan anaknya, dan mungkin kekurangan tempat perlindungan dasar. Kemiskinan moderat merujuk pada kondisi rumah tangga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar namun hanya untuk kebutuhan dasar saja. Sedangkan kemiskinan relatif di negara berpendapatan tinggi, tidak memiliki akses terhadap benda-benda budaya, hiburan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan berkualitas, pendidikan dan keuntungan lain bagi kelompok sosial atas. Mempertimbangkan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat juga mengarah pada konsep kemiskinan relatif. Di negara-negara maju pemenuhan kebutuhan dasar tidak lagi menjadi persoalan rumah tangga, ada penekanan yang lebih mendesak yaitu keterlibatan rumah tangga dalam dimensi sosial dan tidak menjauh dari "mainstream" masyarakat lain.

2.3.2 Kemiskinan Natural, Kemiskinan Kultural dan Kemiskinan Struktural

Kartasmita (1996: 235), Sumodiningrat (1998 : 67) dan Baswir (1997: 23) merumuskan bentuk-bentuk kemiskinan yang sekaligus menjadi faktor penyebab kemiskinan menjadi : (1) Kemiskinan natural, (2) Kemiskinan kultural, dan (3) Kemiskinan Struktural.

1. **Kemiskinan natural** adalah keadaan miskin karena awalnya memang miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai baik sumber daya alam, sumberdaya manusia,

maupun sumber daya pembangunan, atau kalau pun mereka ikut serta dalam pembangunan, mereka hanya mendapat imbalan yang rendah. Kondisi kemiskinan seperti ini disebut sebagai "*Persisten Poverty*" yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun.

2. **Kemiskinan kultural** mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya dimana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha dan merubah tingkat kehidupannya.
3. **Kemiskinan struktural** adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu saja. Munculnya kemiskinan struktural disebabkan karena upaya-upaya penanggulangan kemiskinan natural pelaksanaannya tidak seimbang, pemilikan sumberdaya tidak merata, kesempatan yang tidak sama menyebabkan keikutsertaan masyarakat tidak merata pula, sehingga menimbulkan struktur masyarakat yang timpang. Kemiskinan ini menurut Kartasmita (1996: 236) disebut juga "*accidental poverty*" yaitu kemiskinan karena dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan turunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini akan difokuskan pada kemiskinan absolut dimana pengukurannya berdasarkan garis kemiskinan yang sudah ditentukan terlebih dahulu oleh BPS berdasarkan jumlah kebutuhan hidup minimum baik makanan maupun non makanan, yang tentu saja salah satu penyebab kemiskinan tersebut bisa karena kebijakan-kebijakan yang salah dari pemerintah (kemiskinan struktural). Penyebab-penyebab kemiskinan akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian lain dari bab ini.

2.3.3 Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan

Perlu dibedakan antara kemiskinan di perkotaan dan kemiskinan di pedesaan. Di desa, kemiskinan lebih dikarenakan masalah akses sosial, sedangkan kemiskinan

di kota lebih disebabkan ketidakmampuan masyarakatnya berjuang menghidupi dirinya³. Karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, maka pengentasan kemiskinannya pun harus dilakukan melalui cara yang berbeda-beda pula. Pertumbuhan penduduk dan migrasi dari desa ke kota yang terus meningkat merupakan penyebab utama semakin banyaknya pemukiman-pemukiman kumuh di perkotaan, meskipun sebab lainnya karena kebijakan pemerintah yang keliru dalam menyikapi hal tersebut.

Menurut Todaro (2006), data statistik yang ada menunjukkan bahwa migrasi penduduk dari pedesaan meliputi 35-60 persen dari pertumbuhan penduduk perkotaan. Susahnya mendapatkan pekerjaan di desa membuat penduduk ramai-ramai bermigrasi ke kota. Masyarakat pedesaan di Indonesia saat ini masih didominasi mereka yang memiliki sumber pendapatan sebagai petani. Petani di Indonesia terutama di Jawa didominasi petani gurem dengan penguasaan lahan kurang dari 0,25 ha.

Dengan penguasaan lahan yang sempit itu sangat sulit bagi petani di pedesaan dapat hidup secara layak. Penduduk di pedesaan didominasi petani yang identik dengan kemiskinan. Kemiskinan banyak dijumpai di pedesaan yang seharusnya menjadi lumbung pangan, bahkan kasus kerawanan pangan justru banyak dijumpai di pedesaan. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah pedesaan jauh lebih tinggi. Pada bulan Maret 2010, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perkotaan hanya 1,57 sementara di daerah pedesaan mencapai 2,80 dan nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan hanya 0,40 sementara di daerah pedesaan mencapai 0,75 (BPS, data Susenas 2010).

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P₁*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan

³ Firmanzah, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) pada pidato pengukuhan dirinya sebagai Guru Besar Tetap FE UI di Depok, Rabu (18/8/2010)

(Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

2.3.4 Perempuan dan Kemiskinan

Dalam isu gender dan kemiskinan, rumah tangga merupakan salah satu sumber diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan. Ketidaksetaraan di dalam alokasi sumber daya dalam rumah tangga memperlihatkan laki-laki dan perempuan mengalami bentuk kemiskinan yang berbeda. Bentuk-bentuk pembedaan tersebut antara lain pada:

- 1) Akses terhadap sumber produktif, seperti tanah, modal, hak kepemilikan, kredit, serta pendidikan dan pelatihan;
- 2) Kontrol terhadap penggunaan tenaga kerja keluarga;
- 3) Pembagian kerja yang tidak seimbang akibat adanya beban kerja reproduktif yang diemban perempuan;
- 4) Perbedaan konsumsi makanan, obat-obatan, pelayanan kesehatan dan pendidikan
- 5) Perbedaan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan rumah tangga

Persoalan lain yang dihadapi perempuan adalah pembangunan di segala bidang dan tingkatan yang seringkali dianggap tidak atau kurang berpihak kepada perempuan (*gender blind* atau *gender bias*). Program-program pembangunan secara formal seringkali dikuasai oleh laki-laki dan karena sumber daya yang penting dalam kehidupan suatu masyarakat hampir selalu dikuasai oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan sosial, ekonomi dan politik lebih kuat.⁴

Berkaitan dengan masalah peranan wanita sebagai kepala rumahtangga, secara umum peranan wanita sebagai kepala rumahtangga dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya biasanya akan mengalami banyak kendala dibanding

⁴ Dimuat dalam Jurnal Analisis sosial, Vol 8, edisi 2 Oktober 2003, Perempuan, Kemiskinan dan Pengambilan Keputusan.

dengan peran laki-laki sebagai kepala rumahtangga (BPS 2007). Hal ini terkait dengan peran ganda wanita di dalam rumah tangga sebagai pencari nafkah dan sebagai ibu yang melahirkan, merawat dan membesarkan anak-anaknya. Selain itu juga terlihat bahwa persentase wanita sebagai kepala rumahtangga cenderung lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan di daerah pedesaan.

2.4 Ukuran-Ukuran Kemiskinan

Untuk mengetahui jumlah penduduk miskin, sebaran dan kondisi kemiskinan diperlukan pengukuran kemiskinan yang tepat sehingga upaya untuk mengurangi kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan akan efektif. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya akan menjadi instrumen yang tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada masyarakat miskin. Pengukuran kemiskinan yang baik akan memudahkan dalam melakukan evaluasi dampak dari pelaksanaan proyek, membandingkan kemiskinan antar waktu, dan menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk menguranginya.

2.4.1 Ukuran Badan Pusat Statistik

BPS menggunakan ukuran kemiskinan dengan mengacu pada pendekatan kebutuhan dasar. Garis kemiskinan BPS dibentuk oleh sejumlah rupiah untuk memenuhi kebutuhan 2.100 kilo kalori per orang per hari ditambah dengan kebutuhan dasar lainnya seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya. Dalam menghitung garis kemiskinan BPS menggunakan sumber data Modul Konsumsi Survey Sosial dan Ekonomi Nasional (SUSENAS). Garis kemiskinan yang dihasilkan mencakup garis kemiskinan nasional, provinsi, perkotaan dan pedesaan. Garis kemiskinan kabupaten/kota dikembangkan dari garis kemiskinan provinsi.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

2.4.2 Ukuran Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

BKKBN mengembangkan ukuran untuk program-program peningkatan kesejahteraan keluarga. Berdasarkan kriteria yang dikembangkan terdapat empat kategori keluarga, yaitu : (1) Keluarga Prasejahtera; (2) Sejahtera 1; (3) Sejahtera 2; (4) Sejahtera 3; (5) Sejahtera 3 plus. Kategori keluarga prasejahtera termasuk dalam kelompok miskin, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal yang secara operasional tidak mampu memenuhi salah satu dari indikator sebagai berikut :

- 1) Menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya
- 2) Makan minimal dua kali sehari
- 3) Pakaian lebih dari satu pasang
- 4) Sebagian besar lantai rumah tidak dari tanah
- 5) Jika sakit dibawa ke sarana kesehatan

2.4.3 Ukuran Indeks Kemiskinan Manusia

IKM dikembangkan oleh lembaga internasional UNDP. IKM merupakan indeks komposit yang mengukur keterbelakangan dalam 3 dimensi yaitu :

- (1) Lamanya hidup yang memiliki indikator penduduk yang diperkirakan tidak berumur panjang;
- (2) Pengetahuan yang memiliki indikator ketertinggalan dalam pendidikan;
- (3) Standar hidup layak yang memiliki indikator keterbatasan akses terhadap layanan dasar

Indikator pertama diukur dengan peluang populasi untuk tidak bertahan kurang dari 40 tahun, sedangkan indikator kedua adalah angka buta huruf dewasa atau penduduk usia 15 tahun ke atas. Sedangkan keterbatasan akses pelayanan dasar diukur dengan persentase penduduk tanpa akses air bersih, akses ke sarana kesehatan dan persentase balita yang tergolong dalam status gizi rendah dan menengah.

2.4.4 Pengukuran Kemiskinan dengan Pendekatan Berbasis Hak

Dari tiga pendekatan pengukuran kemiskinan di atas, bila dicermati masih menyimpan kelemahan. Menurut Edi Suharto (2009) ketiga pendekatan tersebut masih melihat kemiskinan sebagai persoalan individu dan kurang memperhatikan dimensi struktural. Sistem pengukuran yang digunakan terfokus pada kondisi kemiskinan berdasarkan *negative outcome indicators*, sehingga belum menunjukkan kekuatan orang miskin dan dinamika kemiskinannya.

Akibatnya orang miskin hanya dipandang sebagai "orang yang serba tidak memiliki": tidak memiliki pendapatan yang tinggi, tidak terdidik, tidak sehat dan sebagainya. Dalam pengukuran tersebut, aktor kemiskinan dan sebab-sebab yang mempengaruhinya juga belum tersentuh secara memadai. Orang miskin hanya dilihat sebagai korban, bukan sebagai manusia yang memiliki sesuatu yang dapat digunakan olehnya, baik dalam mengidentifikasi kondisi kehidupannya maupun dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapinya.

Untuk itu, Suharto (2009) mengenalkan sebuah pengukuran dengan pendekatan berbasis hak, dimana indikator-indikatornya menunjukkan lebih dari sekadar kondisi kehidupan orang miskin melainkan mencakup kualitas dari konteks perkembangan orang miskin, yaitu :

- 1) Status kehidupan orang miskin, didalamnya tercakup; aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan.
- 2) Lingkungan keluarga dan rumah tangga; kualitas setting rumah (akses air bersih dan sanitasi), relasi sosial antar anggota keluarga (frekuensi makan bersama, melakukan aktivitas bersama)
- 3) Lingkungan ketetanggaan sekitar, mencakup; ketersediaan sarana ibadah, olahraga, rekreasi, lembaga-lembaga sosial, partisipasi masyarakat, termasuk data tentang kriminalitas.
- 4) Akses ke pelayanan dasar, mencakup akses ke pelayanan publik misalnya akses ke fasilitas kesehatan, sekolah, sarana transportasi, media massa, termasuk lembaga pelayanan sosial.

- 5) Alokasi sumber publik pro-poor. Mencakup anggaran pemerintah pusat dan daerah untuk jaminan sosial, pendidikan, dan kesehatan yang ditujukan bagi kelompok miskin.

Pengukuran Kemiskinan dengan pendekatan berbasis hak ini menyampaikan dengan cukup jelas bahwa strategi dalam mengatasi kemiskinan hendaknya diarahkan bukan hanya pada orang miskinnya, melainkan pada faktor-faktor di luar dirinya yang mempengaruhi kehidupan orang miskin.

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa pemantauan pengukuran kemiskinan di Indonesia sekarang ini cukup beragam dan hal tersebut dapat menjadi bahan perdebatan diantara berbagai pihak karena adanya perbedaan konsep kemiskinan dan kegunaan pengukuran kemiskinan tersebut bagi penyelenggaraan pembangunan baik nasional maupun regional, khususnya pemerintahan kabupaten/kota. Namun, karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Susenas yang dikeluarkan oleh BPS, maka ukuran kemiskinan yang dipakai dalam penelitian ini adalah ukuran dari Badan Pusat Statistik (BPS).

2.5 Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Carlos A. Heredia dan Equipo Pueblo (1999) menyatakan penyebab utama kemiskinan secara konvensional ada pada watak dan perilaku orang miskin itu sendiri. Namun pemberantasan kemiskinan tidak saja menjadi keinginan dari pihak rakyat miskin itu sendiri, akan tetapi lebih merupakan tugas yang harus ditangani oleh pemerintah, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga-lembaga multilateral dengan cara disepakati bersama. Sebab-sebab kemiskinan struktural, yang dipengaruhi oleh hal-hal ini, mencakup:

- Kurangnya demokrasi: hubungan kekuasaan yang menghilangkan kemampuan warga negara atau suatu negara untuk memutuskan masalah yang menjadi perhatian mereka;
- Kurangnya memperoleh alat-alat produksi (lahan dan teknologi) dan sumber daya (pendidikan, kredit dan akses pasar) oleh mayoritas penduduk;
- Kurangnya mekanisme yang memadai untuk akumulasi dan distribusi

- Disintegrasi ekonomi nasional, yang berorientasi memenuhi pasar asing daripada pasar domestik;
- Pengikisan peran pemerintah sebagai perantara dalam meminimalkan ketimpangan sosial, contohnya melalui swastanisasi program-program sosial
- Eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan tercemarnya ekosistem yang secara tidak proporsional berdampak kepada orang miskin; dan
- Kebijakan-kebijakan yang menyebabkan monopolisasi ekonomi dan polarisasi masyarakat, yang memacu bertambahnya penumpukan pendapatan dan kesejahteraan.

Sedangkan Amartya Sen (1999) menyatakan bahwa penyebab kemiskinan bukan saja dikarenakan tidak adanya sumber-sumber, melainkan karena tidak adanya hak (*entitlement*) atas sumber-sumber itu sendiri. Kelaparan terjadi bukan karena tidak cukupnya makanan di suatu wilayah, melainkan karena orang miskin tidak memiliki hak atau tidak diperbolehkan memakan makanan yang ada di wilayah tersebut (Suharto, 2008)

Bradshaw (2005) mengemukakan bahwa terdapat lima faktor penyebab kemiskinan yaitu :

- (1) Kemiskinan yang disebabkan oleh kekurangan yang terdapat dalam diri individu itu sendiri, dalam hal ini individu dianggap bertanggung jawab atas kondisi kemiskinan mereka sendiri karena dianggap kurang bekerja keras atau kekurangan secara genetik seperti kurang pandai atau intelegensianya kurang.
- (2) Kemiskinan yang disebabkan oleh sistem budaya miskin dan dukungan sub-budaya miskin, yaitu kemiskinan diciptakan melalui transmisi kepercayaan, nilai-nilai, dan kemampuan sosial dari generasi ke generasi.
- (3) Kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi ekonomi, politik dan distorsi sosial atau diskriminasi sehingga masyarakat memiliki kesempatan dan sumberdaya yang terbatas dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.
- (4) Kemiskinan yang disebabkan oleh perbedaan kondisi geografis.

- (5) Kemiskinan yang disebabkan oleh kumulatif dan siklus ketergantungan antara individu dan sumberdaya, dimana individu yang tidak memiliki sumberdaya tidak mampu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang lebih luas yang menyebabkan sedikitnya pembayaran pajak.

Pendapat yang lain mengatakan munculnya kemiskinan dalam masyarakat berkaitan dengan lemahnya budaya, yaitu nilai hidup dalam masyarakat. Sedangkan menurut Todaro penyebab kemiskinan adalah :

- (1) Perbedaan geografis, penduduk dan pendapatan;
- (2) Perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara yang berlainan;
- (3) Perbedaan sumberdaya alam dan manusia;
- (4) Perbedaan sektor swasta dan negara;
- (5) Perbedaan struktur perindustriannya;
- (6) Perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain; dan
- (7) Perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri.

Tulus (2006) menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab kemiskinan di Indonesia adalah: tingkat pendidikan yang rendah; produktivitas tenaga kerja rendah; tingkat upah yang rendah; distribusi pendapatan yang timpang; kesempatan kerja yang kurang; kualitas sumberdaya alam masih rendah; penggunaan teknologi masih kurang; etos kerja dan motivasi pekerja yang rendah; kultur/budaya (tradisi); dan politik yang belum stabil.

Semua faktor tersebut di atas saling mempengaruhi, dan sulit memastikan penyebab kemiskinan yang paling utama atau faktor mana yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung. Kesemua faktor tersebut merupakan *Vicious Circle* (lingkaran setan) dalam masalah timbulnya kemiskinan. Namun dari pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab kemiskinan adalah; adanya kegagalan kepemilikan asset, kondisi geografis yang kurang mendukung, kerentanan dan ketidakmampuan menghadapi goncangan-goncangan,

kekurangan sumberdaya baik kualitas maupun kuantitas karena tingkat pendidikan yang rendah, tidak memiliki keterwakilan dalam institusi negara dan masyarakat, dan siklus yang menyebabkan kemiskinan berulang dari generasi ke generasi sehingga mewariskan kondisi psikologis individu yang rendah diri, motivasi kurang, bahkan depresi.

2.6 Profil Provinsi Banten

2.6.1 Sekilas Provinsi Banten

Banten sebagai nama suatu wilayah sudah dikenal dan diperkenalkan sejak abad ke 14. Mula-mula Banten merupakan pelabuhan yang sangat ramai disinggahi kapal dan dikunjungi pedagang dari berbagai wilayah. Pada tahun 1330 orang sudah mengenal sebuah negara yang saat itu disebut Panten, yang kemudian wilayah ini dikuasai oleh Majapahit di bawah Mahapatih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk. Pada masa-masa itu Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Demak merupakan dua kekuatan terbesar di Nusantara. Tahun 1524-1525 para pedagang Islam berdatangan ke Banten dan saat itulah dimulai penyebaran agama Islam di Banten. Sekitar dua abad kemudian berdiri Kadipaten Banten di Surasowan pada 8 Oktober 1526. Pada tahun 1552 – 1570 Maulana Hasanudin Panembahan Surosowan menjadi Sultan Banten pertama. Sejak itu dimulailah pemerintahan kesultanan di Banten yang diakhiri oleh Sultan Muhammad Rafi'uddin (1813 – 1820) merupakan sultan ke dua puluh setelah sultan dan rakyat masa sebelumnya berperang melawan penjajah. Namun demikian perjuangan rakyat Banten terus berlanjut hingga detik terakhir kaki penjajah berada di bumi Banten.

Setelah memasuki masa kemerdekaan muncul keinginan rakyat Banten untuk membentuk sebuah provinsi. Niatan tersebut pertama kali mencuat di tahun 1953 yang kemudian pada 1963 terbentuk Panitia Provinsi Banten di Pendopo Kabupaten Serang. Dalam pertemuan antara Panitia Provinsi Banten dengan DPR-GR sepakat untuk memperjuangkan terbentuknya Provinsi Banten. Pada tanggal 25 Oktober 1970 Sidang Pleno Musyawarah Besar Banten mengesahkan Presidium Panitia Pusat Provinsi Banten. Namun ternyata perjuangan untuk membentuk Provinsi Banten dan

terpisah dari Jawa Barat tidaklah mudah dan cepat. Selama masa Orde Baru keinginan tersebut belum bisa direalisasikan.

Pada Orde Reformasi perjuangan masyarakat Banten semakin gigih karena mulai terasa semilirnya angin demokrasi dan isu tentang otonomi daerah. Pada tanggal 18 Juli 1999 diadakan Deklarasi Rakyat Banten di Alun-alun Serang yang kemudian Badan Pekerja Komite Panitia Provinsi Banten menyusun Pedoman Dasar serta Rencana Kerja dan Rekomendasi Komite Pembentukan Provinsi Banten (PPB). Sejak itu mulai terbentuk Sub-sub Komite PPB di berbagai wilayah di Banten untuk memperkokoh dukungan terbentuknya Provinsi Banten. Setelah melalui perjuangan panjang dan melelahkan akhirnya pada 4 Oktober 2000 Rapat Paripurna DPR-RI mengesahkan RUU Provinsi Banten menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2000 Presiden Abdurrahman Wahid mengesahkan UU No. 23 Tahun 2000 tentang PPB. Sebulan setelah itu pada 18 Nopember 2000 dilakukan peresmian Provinsi Banten dan pelantikan Pejabat Gubernur H. Hakamudin Djamal untuk menjalankan pemerintah provinsi sementara waktu sebelum terpilihnya Gubernur Banten definitif.

2.6.2 Kondisi Geografis

Provinsi Banten adalah salah satu daerah pemekaran yang dulu termasuk dalam wilayah Karesidenan Banten - Provinsi Jawa Barat. Pada awalnya, Provinsi Banten terdiri dari empat kabupaten yaitu Kabupaten Pandeglang, Lebak, Tangerang, Serang dan dua kota yaitu Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Dalam perkembangannya terjadi pemekaran wilayah, Kabupaten Serang menjadi Kabupaten Serang dan Kota Serang. Selanjutnya, Kabupaten Tangerang dimekarkan menjadi Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Sehingga, Provinsi Banten saat ini terdiri dari empat kabupaten dan empat kota.

Secara geografis, Provinsi Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa dan berjarak sekitar 90 km dari DKI Jakarta serta memiliki luas sebesar 9.662,92 km² atau sekitar 0,51 persen dari luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayahnya, berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat di sebelah timur, Laut Jawa di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, dan

Selat Sunda di sebelah barat. Dengan demikian, Provinsi Banten mempunyai posisi yang strategis yaitu sebagai jalur penghubung darat antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Sebagian wilayahnya pun yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan menjadi *hinterland* bagi Provinsi DKI Jakarta.

2.6.3 Pemerintahan

Provinsi Banten terbagi dalam 4 kabupaten dan 4 kota, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang serta Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan. Adapun jumlah kecamatan di seluruh Banten sebanyak 154 yang terbagi lagi menjadi 1.535 desa/kelurahan.

Pemerintahan Provinsi Banten selama tahun 2009 didukung oleh 3.291 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 2.209 orang laki-laki dan 1.082 orang perempuan. Sementara jumlah anggota DPRD Provinsi Banten sebanyak 85 orang, terdiri dari 71 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. Total anggota DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Banten berjumlah 375 orang dengan 48 diantaranya adalah legislator perempuan. Sedangkan anggota DPR RI yang berasal dari daerah pemilihan Banten berjumlah 21 orang yang terdiri dari 16 orang laki-laki dan 5 orang perempuan.

2.6.4 Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Banten dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2000, penduduk Banten berjumlah 8,10 juta jiwa tapi pada tahun 2009 meningkat menjadi 9,78 juta jiwa, atau tumbuh rata-rata sebesar 2,12 persen per tahun.

Apabila dibandingkan dengan proyeksi penduduk Indonesia yang mencapai 231,37 juta orang maka penduduk Banten pada tahun 2009 sudah mencapai 4,20 persen dari total penduduk Indonesia, sehingga Banten menjadi provinsi dengan populasi terbesar kelima di Indonesia. Pada tahun 2009, Banten juga termasuk empat besar provinsi yang terpadat penduduknya yaitu dengan tingkat kepadatan mencapai

1.085 jiwa per km² atau untuk setiap satu kilometer persegi wilayah Provinsi Banten dihuni oleh sekitar 1.085 penduduk.

Persebaran penduduk di Banten secara spasial tidak merata, karena masih terkonsentrasi di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Dengan luas wilayah kurang dari 14 persen dari seluruh luas wilayah Provinsi Banten, ketiga wilayah tersebut pada tahun 2009 dihuni oleh sekitar 53,47 persen dari seluruh penduduk Banten. Akibatnya, tingkat kepadatan penduduk antar wilayah di Banten menjadi sangat tidak merata. Kota Tangerang merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi, mencapai 10.101 jiwa per km². Sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Lebak yaitu dengan tingkat kepadatan penduduk hanya 367 jiwa per km². Berarti, Kota Tangerang hampir 28 kali lebih padat bila dibandingkan dengan Kabupaten Lebak.

2.6.5 Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang paling menentukan dalam proses pembangunan di suatu wilayah. Semakin besar jumlah tenaga kerja, lebih-lebih apabila disertai dengan keahlian yang cukup memadai, akan semakin pesat pula perkembangan pembangunan di wilayah tersebut.

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Banten pada tahun 2009 mencapai 4,36 juta orang, bertambah sebanyak 31.785 orang bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 4,33 juta orang. Penambahan tersebut terjadi karena adanya penambahan pada komponen angkatan kerja yang bekerja yang bertambah sebanyak 35.883 orang, sedangkan pengangguran justru turun sebanyak 4.098 orang. Berarti secara kuantitas, kondisi ketenagakerjaan di Banten pada tahun 2009 semakin membaik karena kesempatan kerja yang tercipta masih lebih besar bila dibandingkan dengan penambahan angkatan kerja baru.

Secara spasial, pada tahun 2009 ini hanya di Kota Tangerang dan Kabupaten Serang yang lama (Kabupaten Serang dan Kota Serang) saja yang kondisi ketenagakerjaannya semakin membaik karena kesempatan kerjanya masing-masing bertambah sebanyak 80.147 orang dan 29.775 orang, padahal angkatan kerjanya hanya bertambah masing-masing sebanyak 46.579 orang dan 17.923 orang.

Sedangkan untuk kabupaten/ kota lainnya, penambahan kesempatan kerja justru lebih kecil bila dibandingkan dengan penambahan angkatan kerjanya

Lebih dari 50 persen dari total tenaga kerja Provinsi Banten berdomisili di Kabupaten Tangerang (termasuk Kota Tangerang Selatan) dan Kota Tangerang, yaitu kabupaten/kota yang terkenal sebagai pusat bisnis dan konsentrasi industri. Akibatnya, serapan tenaga kerja di Sektor Perdagangan dan Sektor Industri begitu mendominasi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten. Kedua sektor tersebut diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja masing-masing sebesar 26,18 persen dan 22,77 persen. Sementara itu, Sektor Pertanian berada pada posisi ketiga dalam penyerapan tenaga kerja yaitu dengan serapan sebesar 20,12 persen dari keseluruhan tenaga kerja, dan terlihat mendominasi dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang.

2.6.6 Pendidikan

Pada tahun 2009, jumlah SD mengalami peningkatan 405 unit dari 4.527 unit menjadi 4.932 unit. Kenaikan terjadi pada SD Negeri yaitu dari 4.152 unit menjadi 4.513 unit atau naik 8,69 persen. SD Swasta mengalami peningkatan 44 unit dari 375 unit menjadi 419 unit. Kondisi yang sama juga terjadi pada jenjang SMP dan SMA, jumlah sekolah mengalami peningkatan, baik sekolah negeri maupun swasta. Pada jenjang SMP, terdapat penambahan 352 unit terdiri dari 183 unit SMP Negeri dan 169 unit SMP Swasta, sehingga pada tahun 2009 jumlah SMP menjadi 1.174 unit. Penambahan jumlah SMU (SMA dan SMK) lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah SMP yaitu sebanyak 236 unit. Tahun sebelumnya jumlah SMU sebanyak 635 unit, sedangkan tahun 2009 menjadi 871 unit. Penambahan tersebut, terbanyak berasal dari SMA sebanyak 124 unit, sedangkan dari SMK sebanyak 112 unit.

Sementara itu, angka partisipasi sekolah penduduk Banten pada tahun 2009 untuk semua kelompok umur (KU) mengalami kenaikan yaitu KU 7 – 12 tahun naik dari 97,56 persen ke 97,85 persen; KU 13-15 naik dari 79,87 persen ke 80,88 persen; KU 16-18 dari 48,40 persen ke 50,00 persen dan KU 19-24 dari 10,50 persen ke 11,07 persen. Berarti, pada tahun 2009 jumlah penduduk Banten yang bersekolah lebih banyak bila dibandingkan dengan tahun 2008.

Rasio murid terhadap guru pada tahun 2009 sedikit mengalami perbaikan, kecuali untuk jenjang SMP. Pada jenjang SD, setiap satu orang guru rata-rata menangani 22,76 murid, tahun sebelumnya 23,11 murid. Pada tingkat SMP, rasio murid terhadap guru berubah dari 16,59 menjadi 17,15. Pada jenjang SMA rasio murid terhadap guru turun dari 16,62 menjadi 15,11. Penurunan rasio murid terhadap guru pada jenjang SD dan SMA diharapkan meningkatkan kualitas pendidikan pada kedua jenjang tersebut.

2.7 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten, 2002-2010

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin versi BPS adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.

Jumlah dan persentase penduduk miskin Provinsi Banten pada periode 2002-2010 seperti tercantum pada Tabel 2.1 memperlihatkan besaran yang berfluktuasi. Sampai dengan tahun 2006 kemiskinan di Banten tiap tahunnya menunjukkan trend yang bergerak naik. Namun mulai tahun 2007-2010 kemiskinan di Provinsi Banten mulai bergerak turun.

Tabel 2.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Banten Menurut Daerah, 2002-2010

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D
2002	305,8	480,9	786,7	6,47	12,64	9,22
2003	309,4	546,4	855,8	6,62	12,76	9,56
2004	279,9	499,3	779,2	5,69	11,99	8,58
2005	370,2	460,3	830,5	6,56	12,34	8,86
2006	417,1	487,3	904,3	7,47	13,34	9,79
2007	399,4	486,8	886,2	6,79	12,54	9,07
2008	371,0	445,7	816,7	6,15	11,18	8,15
2009	348,7	439,3	788,1	5,62	10,70	7,64
2010	318,3	439,9	758,2	4,99	10,44	7,16

Sumber : BPS, Maret 2011

Pada tahun 2006, jumlah penduduk miskin di Banten mencapai puncaknya yaitu tercatat sebesar 904.300 penduduk miskin (9,79 persen) berada di bawah garis kemiskinan. Banyaknya penduduk miskin pada tahun 2006 lebih disebabkan karena

pada periode penghitungan tersebut (Juli 2005-Maret 2006), pemerintah kembali menaikkan harga BBM (tahap 2) pada bulan Oktober 2005, yang menjadi pemicu inflasi pada bulan tersebut sebesar 6,88 persen. Akibatnya penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada disekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin. Sehingga pada tahun 2006 tercatat sebesar 904.300 penduduk miskin (9,79 persen) berada di bawah garis kemiskinan.

Program-program anti kemiskinan yang digulirkan oleh pemerintah seperti BLT, PNPM Mandiri, P2KP dan lain sebagainya, membuat jumlah penduduk miskin terkoreksi dan terus mengalami penurunan pada tahun 2007 sampai dengan 2010. Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 886.200 orang (9,07 persen), pada tahun 2008 menurun menjadi 816.742 orang (8,15 persen), kemudian pada tahun 2009 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 788.067 orang (7,64 persen), hingga pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 758.163 orang atau sekitar 7,16 persen penduduk berada dibawah garis kemiskinan.

2.8 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Masalah kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin saja. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode Maret 2009-Maret 2010, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 1,32 pada Maret 2009 menjadi sebesar 1,00 pada Maret 2010. Angka ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata, pengeluaran penduduk miskin semakin cenderung mendekati garis kemiskinan. Demikian pula untuk Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan yang menunjukkan angka 0,33 pada Maret 2009 menjadi 0,24 pada Maret 2010. Indeks ini mengindikasikan ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin semakin menyempit.

Jika dirinci menurut daerah kota/desa, terlihat hal yang sama yaitu pada semua daerah, baik kota ataupun desa, mengalami penurunan indeks P1. Hal ini berarti bahwa tingkat kedalaman kemiskinan semakin mengecil untuk kedua tipe wilayah (daerah pedesaan dan perkotaan). Hal berbeda ditunjukkan pada indeks P2 dimana indeks tersebut hanya mengalami penurunan pada daerah pedesaan saja sedangkan daerah perkotaan malah mengalami kenaikan sebesar 0,01 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keparahan kemiskinan semakin menyempit pada daerah pedesaan saja.

Nilai indeks P1 dan P2 pada umumnya di daerah pedesaan lebih tinggi dari pada perkotaan. Ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah pedesaan lebih parah dari pada daerah perkotaan.

2.9 Studi Empiris Kemiskinan yang Pernah Dilakukan

Pada tahun 1994 tim LPEM-FEUI⁵ pernah melakukan studi profil kemiskinan yang menjelaskan bahwa profil kemiskinan membantu keberhasilan program pembangunan melalui ketepatan identifikasi target group dan target area. Menurut tim LPEM-FEUI kemiskinan rumah tangga dapat dilihat dari 5 karakteristik, masing-masing : (a) karakteristik lokasi geografis; (b) karakteristik demografis; (c) karakteristik ekonomi yang terdiri dari jabatan/pekerjaan, sumber penghasilan, pola konsumsi; (d) karakteristik sosial budaya; dan (e) karakteristik sistem ekonomi, berupa kriteria-kriteria khusus yang berhubungan dengan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) pada saat itu, kegiatan ekonomi sasaran IDT (petani gurem, buruh tani, nelayan dan perambah hutan), dan cara bertahan hidup yakni kondisi ketergantungan pada pihak lain.

Di Provinsi Banten sendiri penelitian tentang profil kemiskinan rumah tangga pernah dilakukan oleh Zulfakar⁶ pada tahun 2005 dengan menggunakan data Susenas Kor Tahun 2004. Hasil penelitian dengan regresi logistik tersebut menunjukkan

⁵ Tim LPEM-FEUI, *Profil dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*, (Jakarta, 1994), hal 4-11

⁶ Zulfakar, "Tinjauan Terhadap Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan di Provinsi Banten", Tesis Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Jakarta : 2006

bahwa profil kemiskinan rumah tangga di Provinsi Banten dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, status pekerjaan dan jumlah anggota rumah tangga.

Penelitian kemiskinan pada skala provinsi juga pernah dilakukan oleh Abdhul Aziiz Usman⁷ untuk provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan data Susenas Kor Tahun 2002. Hasil penelitian dengan regresi logistik menunjukkan bahwa kemiskinan di provinsi Sumatera Barat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut : (a) karakteristik geografis daerah (desa atau kota); (b) karakteristik sosial demografi, terdiri dari usia kepala rumah tangga, kepala rumah tangga wanita, rasio ketergantungan dan jumlah anak, jaringan sosial, konsumsi makanan berprotein tinggi; (c) karakteristik pendidikan terdiri dari literasio, jenjang pendidikan orangtua; (d) karakteristik ketenagakerjaan, terdiri dari jenis lapangan usaha dan status pekerjaan kepala rumah tangga, jumlah jam kerja kepala rumah tangga, istri dan anak bekerja, (e) karakteristik perumahan, terdiri dari kondisi lantai, sumber air minum, kondisi tempat buang air besar, dan konsumsi bahan bakar.

Dari studi literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga miskin untuk suatu wilayah memiliki karakteristik yang berbeda untuk wilayah yang lain. Demikian juga dengan determinan kemiskinan yang bisa berbeda-beda antar wilayah yang berbeda. Namun dari penelitian-penelitian tersebut terdapat beberapa kesamaan yaitu karakteristik pendidikan, karakteristik geografis dan karakteristik ketenagakerjaan.

Penelitian ini sendiri memfokuskan pada ketiga karakteristik diatas ditambah dengan karakteristik rumah tangga; jenis kelamin kepala rumah tangga dan jumlah anggota rumah tangga, serta ditambah dengan analisa program bantuan pemerintah/swasta yang pernah diberikan terhadap penanggulangan kemiskinan berupa bantuan kredit usaha seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Bank selain KUR, serta program lainnya. Metode penelitian dan model yang akan digunakan akan dijelaskan dalam bab selanjutnya.

⁷ Abdhul Aziiz Usman, "Identifikasi Karakteristik Rumah Tangga Miskin yang Mempengaruhi Kemiskinan di Sumatera Barat", Tesis Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Jakarta : 2006, hal. 89-90

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pengumpulan data

Data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR Provinsi Banten tahun 2010. Digunakannya data Susenas karena di dalamnya tercakup kondisi kependudukan, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, konsumsi dan pengeluaran rumah tangga. Data tersebut dikumpulkan oleh BPS setiap tahun, sehingga bisa menunjukkan perubahan yang terjadi tentang keadaan sosial dan ekonomi penduduk dan rumah tangga di tengah masyarakat.

3.1.1 Pengolahan Data

Data yang didapat dari susenas masih berupa *raw* data yang harus mendapat perlakuan-perlakuan khusus sehingga bisa menjadi data yang siap diolah. Pengolahan data dilakukan dengan software komputer yaitu SPSS versi 18. SPSS digunakan untuk melakukan berbagai analisis terhadap data yang tersedia sesuai dengan kebutuhan penelitian. Di bawah ini akan diuraikan langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum data Susenas tersebut siap diolah :

a. *Cleaning Data*

Kualitas data dikatakan baik apabila data sudah melalui proses validasi. Proses validasi adalah tahap pembacaan ulang data dari hasil pemindahan data dari dokumen ke komputer (*Input data*). Pengujian kembali data untuk setiap jenis pertanyaan (variabel) mulai dari interval nilai data (*range cek*), hubungan antar pertanyaan dan antar blok pertanyaan (*consistency cek*), dan alur data pengisiannya (*flow*). Apabila dari hasil proses validasi dijumpai temuan kesalahan pengisian, maka perlu dilakukan perbaikan isian datanya.

Langkah selanjutnya adalah membuat tabel frekuensi untuk semua jenis pertanyaan dengan menggunakan data asli hasil *entry data* (tanpa diberikan penimbang), proses ini diistilahkan membuat *code book*

frequencys. Pada tahap ini dapat dilihat distribusi data untuk setiap jenis pertanyaan dan dapat juga digunakan sebagai alat uji kualitas data. Dengan membaca tabel-tabel frekuensi apabila dijumpai isian data ada yang salah, maka dapat diperbaiki kembali *raw data* nya.

b. Pembobotan Data

Susenas adalah sebuah survey dimana hanya responden yang terambil acak berdasarkan metode sampling tertentu, bukan pendataan seluruh penduduk seperti Sensus. Supaya hasil dari sampel acak ini bisa menggambarkan kondisi Indonesia, maka setiap responden rumah tangga diboboti dengan nilai tertentu. Setiap responden terpilih mewakili sekian banyak penduduk, jumlah keterwakilannya disebut pembobot. Pembobotan data ini merupakan langkah wajib yang harus dilakukan sebelum melakukan pengolahan data lebih lanjut dengan menggunakan SPSS. Pembobot di Susenas ada 2 yaitu pembobot rumah tangga untuk data rumah tangga dan pembobot individu untuk data individu. Karena data dalam penelitian ini adalah data rumah tangga, maka yang digunakan adalah pembobot rumah tangga.

c. *Filtering* Data

Filtering data adalah langkah yang sering dilakukan untuk mendapatkan hasil pengolahan data sesuai kriteria yang kita inginkan. Contoh yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengelompokkan pendidikan kepala rumah tangga ke dalam 3 kelompok yaitu; pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, padahal *raw* data BPS variabel pendidikan dikelompokkan ke dalam 14 katagori. Contoh lainnya adalah pengelompokkan berdasarkan lapangan pekerjaan. Bisa saja *filtering* melibatkan banyak variable, misalnya anak yang sedang sekolah di SD sederajat, maka kriteria pertama adalah penduduk yang saat ini sedang sekolah dan kriteria kedua adalah anak yang pernah/sedang sekolah di SD atau Madrasah Ibtidaiyah (MI)

3.1.2 Penentuan Garis Kemiskinan

Pada *raw* data yang diperoleh dari BPS, belum terlihat manakah yang termasuk di dalam rumah tangga miskin atau non miskin. Data BPS hanya

memperlihatkan jumlah pengeluaran rumah tangga. Jumlah pengeluaran rumah tangga ini harus dibagi dulu dengan jumlah anggota rumah tangga, sehingga akhirnya akan diperoleh pengeluaran perkapita. Selanjutnya pengeluaran perkapita ini dibandingkan dengan garis kemiskinan yang sudah dikeluarkan oleh BPS. Tabel 3.1 memperlihatkan Garis Kemiskinan Provinsi Banten.

Tabel 3.1 Garis Kemiskinan Provinsi Banten

Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin	% Penduduk Miskin (PO)	Garis Kemiskinan (Rp)
Pandeglang	127.8	11.14	202,483
Lebak	125.2	10.38	185,573
Tangerang	205.1	7.18	258,155
Serang	89.2	6.34	192,128
Kota Tangerang	124.3	6.88	303,551
Kota Cilegon	16.8	4.46	246,662
Kota Serang	40.7	7.03	197,525
Kota Tangsel	21.9	1.67	275,643
Banten	751	7.02	233,214

Sumber : BPS Provinsi Banten

Garis Kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS digunakan sebagai salah satu instrumen untuk menentukan rumah tangga atau penduduk miskin. BPS mendefinisikan Garis Kemiskinan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum makanan maupun kebutuhan hidup minimum non makanan.

3.2 Spesifikasi Model

Untuk mengetahui perbedaan resiko kemiskinan di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten digunakan model peluang logit. Metode ini digunakan dalam rangka membuat model yang dapat memperkirakan angka resiko kemiskinan rumah tangga di tiap-tiap wilayah di Provinsi Banten. Variabel dependennya adalah seluruh rumah tangga yang ada di dalam data susenas yang dikelompokkan dalam 2 klasifikasi rumah tangga yaitu rumah

tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin berdasarkan garis kemiskinan tahun 2010 yang dipublikasikan oleh BPS. Sementara variabel independennya adalah faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi tingginya resiko kemiskinan. Sehingga model empirisnya diekspresikan pada persamaan (3.1)

$$\begin{aligned} \text{Kemiskinan Rumah Tangga} = & \beta_0 + \beta_1 \text{ Klasifikasi Desa/Kelurahan} + \beta_2 \text{ JKL} \\ & + \beta_3 \text{ JART} + \beta_4 \text{ Pend.Dasar} + \\ & \beta_5 \text{ Pend.Menengah} + \beta_6 \text{ Pertanian} + \beta_7 \text{ Industri} \\ & + \beta_8 \text{ Perdagangan} + \beta_9 \text{ BantuanKredit} \end{aligned}$$

3.3 Penjelasan Variabel

1. Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

Variabel terikat yang digunakan adalah seluruh rumah tangga yang terdapat pada data Susenas Provinsi Banten tahun 2010. Menurut BPS Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makan dari satu dapur; yaitu pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama-sama menjadi satu. Rumah tangga sebagai variabel dependen diklasifikasikan ke dalam dua rumah tangga seperti yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2 Variabel Dependen

Klasifikasi Rumah Tangga	Variabel Terikat	Keterangan
Tidak Miskin	0	Jika pengeluaran perkapita rumah tangga tersebut diatas atau sama dengan garis kemiskinan
Miskin	1	Jika pengeluaran perkapita rumah tangga tersebut di bawah garis kemiskinan

Kemiskinan Rumah Tangga sebagai *dependent variabel* dikembangkan lagi menjadi 9 variabel yaitu ; 1) Kemiskinan Rumah Tangga Provinsi (**KRTP**); 2) Kemiskinan Rumah Tangga Kabupaten Pandeglang (**KRTPD**); 3) Kemiskinan Rumah Tangga Kabupaten Lebak (**KRTL**); 4) Kemiskinan Rumah Tangga Kabupaten Tangerang (**KRTT**); 5) Kemiskinan Rumah Tangga Kabupaten Serang (**KRTS**); 6) Kemiskinan Rumah Tangga Kota Cilegon (**KRTKC**); 7) Kemiskinan Rumah Tangga Kota Serang (**KRTKS**); 8) Kemiskinan Rumah Tangga Kota Tangerang (**KRTKT**); 9) Kemiskinan Rumah Tangga Kota Tangerang Selatan (**KRTKTS**). Hal ini dimaksudkan untuk melihat perbedaan karakteristik penyebab kemiskinan di tiap kabupaten/kota yang ada di provinsi Banten.

2. Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

Sedangkan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

(1) Klasifikasi desa/kelurahan (perkotaan atau perdesaan); **Desa** :1 apabila bertempat tinggal di desa, 0 jika bertempat tinggal di kota. Khusus untuk Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, klasifikasi desa/kelurahan untuk kedua kota tersebut yang dikeluarkan oleh BPS hanya ada satu klasifikasi, yaitu perkotaan saja, tidak ada klasifikasi perdesaan untuk kedua kota tersebut. Suatu desa/kelurahan dikategorikan sebagai daerah perkotaan ataupun perdesaan berdasarkan pada nilai (skor) yang dihasilkan dari pendataan Potensi Desa (PODES) yang rutin dilaksanakan setiap 3 tahun sekali. Indikator untuk mengklasifikasikan status wilayah tersebut berupa beberapa variabel yang terdiri dari :

- a) Penduduk dan keluarga (tidak termasuk yang sudah tidak tinggal di desa/kelurahan), meliputi: jumlah penduduk laki-laki, jumlah penduduk perempuan, jumlah keluarga, jumlah keluarga pertanian dan jumlah keluarga yang ada anggota keluarganya menjadi buruh tani.
- b) Keluarga pengguna listrik baik itu yang menggunakan jasa PLN maupun Non PLN.

- c) Keberadaan penerangan di jalan utama Desa/Kelurahan dan jenis penerangannya apakah diusahakan oleh pemerintah, nonpemerintah atau bahkan nonlistrik.
- d) Banyaknya fasilitas pendidikan (TK/ sederajat, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMU/ sederajat, SMK/ sederajat, akademi/ perguruan tinggi sederajat, sekolah luar biasa (SLB), pondok pesantren, madrasah diniyah, dan seminari/ sejenisnya) dan jarak ke fasilitas pendidikan terdekat yang tidak ada di wilayah tersebut.
- e) Banyaknya fasilitas kesehatan (rumah sakit, rumah sakit bersalin, poliklinik/ balai pengobatan, puskesmas, puskesmas pembantu, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, poskesdes, polindes, posyandu, apotek dan toko khusus obat/ jamu), jarak dan kemudahan untuk mencapai fasilitas kesehatan terdekat yang tidak ada di wilayah tersebut.
- f) Ada tidaknya fasilitas hiburan seperti gedung bioskop, Pub/diskotik/tempat karaoke dan jarak ke fasilitas hiburan terdekat yang tidak ada di wilayah tersebut.
- g) Keberadaan lapangan olah raga (sepak bola, bola voli, bulu tangkis, bola basket, tenis (lapangan), futsal, dan renang) dan kelompok kegiatannya termasuk tenis meja, bela diri, dan bilyard.
- h) Keberadaan dan jumlah keluarga yang berlangganan telepon kabel.
- i) Keberadaan telepon umum koin/kartu yang masih aktif/berfungsi.
- j) Keberadaan wartel/kiospon/warpostel/warparpostel.
- k) Luas wilayah Desa/Kelurahan.
- l) Jumlah lahan yang digunakan untuk pertanian sawah (sawah irigasi dan sawah nonirigasi), pertanian nonsawah (tegal/kebun, ladang/huma, tambak, kolam/tebat/empang, hutan rakyat, perkebunan, peternakan, dsb) dan lahan nonpertanian (perumahan, industri, kantor, jalan, prasarana umum, lapangan, dsb).
- m) Keberadaan kelompok pertokoan dan pasar dengan bangunan permanen/semi permanen serta jarak ke kelompok pertokoan dan pasar terdekat yang tiada ada di wilayah tersebut.

- n) Keberadaan minimarket, hotel dan penginapan.
- o) Banyaknya koperasi yang masih aktif/beroperasi, meliputi: koperasi unit desa, koperasi industri kecil dan kerajinan rakyat, koperasi simpan pinjam, dan koperasi lainnya.
- (2) Variabel jenis kelamin kepala rumah tangga (laki-laki atau perempuan);
JKL : 1 jika kepala rumah tangganya perempuan, 0 jika kepala rumah tangganya laki-laki.
- (3) **JART** : jumlah anggota rumah tangga⁸.
- (4) Tingkat pendidikan kepala rumah tangga; yang dibagi kedalam 3 katagori yaitu; 1) **Pend_Dasar** : kepala rumah tangga yang tamat SD/SMP (yang tidak tamat SD/tidak sekolah termasuk kedalam katagori ini), 1 jika masuk dalam kelompok ini, 0 lainnya; 2) **Pend_Menengah** : kepala rumah tangga yang yang berpendidikan SMA, 1 jika masuk dalam kelompok ini, 0 lainnya; 3) **Pend_Tinggi** : kepala rumah tangga yang mengecap pendidikan lebih tinggi dari SMA (D1/D2/D3, S1/S2/S3), Katagori Pendidikan Tinggi ini dijadikan ini dijadikan katagori basis⁹.
- (5) Lapangan pekerjaan kepala rumah tangga dibagi kedalam 4 katagori yaitu; 1) **Pertanian**; kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian, 1 jika masuk katagori ini, 0 lainnya; 2) **Industri**; kepala rumah tangga yang bekerja di sektor industri, 1 jika masuk katagori ini, 0 lainnya; 3) **Perdagangan**; kepala rumah tangga yang bekerja di sektor perdagangan, 1 jika masuk katagori ini, 0 lainnya; 4) **Jasa/Lainnya**; kepala rumah tangga yang bekerja di sektor selain ketiga sektor diatas. Katagori ini menjadi katagori basis. Pembagian katagori ini sesuai dengan pembagian lapangan pekerjaan yang dikeluarkan oleh BPS.
- (6) Sebuah rumah tangga yang mendapat bantuan kredit usaha baik dari pemerintah ataupun pihak lain seperti program PNPM, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Koperasi dan lain-lain, tercermin dalam variabel **Bantuan_Kredit**, 1 jika sebuah rumah tangga mendapat bantuan kredit,

⁸ Menurut BPS, Anggota Rumah Tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada.

⁹ Pembagian katagori ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

0 jika tidak mendapat bantuan. Berikut penjelasan selengkapnya dari variabel bantuan kredit menurut BPS :

- a. Kredit usaha adalah sejumlah dana yang bersifat pinjaman yang diterima untuk membantu menjalankan usaha atau memperbesar usaha.
- b. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri; adalah program nasional dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat.
- c. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan fasilitas pembiayaan yang dapat diakses oleh UMKM dan Koperasi terutama yang memiliki usaha yang layak namun belum *bankable*. UMKM dan Koperasi yang diharapkan mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan dan jasa keuangan simpan pinjam.
- d. Sumber kredit program koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seseorang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan azas kekeluargaan sesuai UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.
- e. Lain-lain, bila rumah tangga responden mendapat kredit usaha selain dari sumber-sumber diatas.

Bantuan kredit yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jika rumah tangga mendapat bantuan kredit (dilambangkan dengan 1) atau tidak mendapat bantuan (dilambangkan dengan 0) dari salah satu sumber-sumber diatas.

3.4 Pemilihan Model Penelitian

Dalam memperlakukan variable independent (variable bebas) yang bersifat kualitatif (skala pengukuran nominal atau ordinal) dalam model regresi, dapat disiasati dengan membentuk variable *dummy*. Namun, apabila persamaan regresi linier dipaksakan pada model dengan variabel dependen yang bersifat kualitatif,

maka estimator yang dihasilkan tidak bersifat BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). Hal ini disebabkan karena varian error-nya tidak terdistribusi normal, estimator tidak efisien karena *heteroskedastisitas* dan R^2 tidak dapat digunakan sebagai *goodness of fit*. Oleh karenanya untuk menghasilkan persamaan yang bersifat BLUE, maka penelitian ini menggunakan *qualitative response regression model*. Terdapat tiga pendekatan untuk mengembangkan model yang menjelaskan model *regresi binary response* yaitu :

- a. Linear Probability Model
- b. Logit Model
- c. Probit Model

Linear Probability Model (LPM) merupakan metode regresi yang umum digunakan sebelum logit dan probit model dikembangkan. LPM bekerja dengan dasar bahwa variabel respon Y, yang merupakan probabilita terjadinya sesuatu, mengikuti *Bernoulli Probability Distribution*, dimana :

Y_i	Probability
0	$1 - P_i$
1	P_i
Total	1

Namun, karena LPM bekerja berdasarkan prinsip OLS biasa maka timbul permasalahan yang telah diungkapkan sebelumnya yaitu : *non-normality of the disturbance, heteroskedastisitas*, tidak terpenuhinya nilai ekspektasi Y antara satu sampei dengan nol, dan tidak dapat digunakannya R^2 sebagai pengukur *goodness of fit*. Kebutuhan akan model probabilita yang menghasilkan Y yang terletak antara interval satu sampai dengan nol dengan hubungan antara P_t dan X_t yang tidak linier menyebabkan model logit dikembangkan. Model logit dimulai dari persamaan :

$$P_i = E (Y = 1 | X_i) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_1 + \beta_2 X_i)}} \quad (3.2)$$

Persamaan diatas dapat disederhanakan menjadi persamaan berikut, juga dikenal sebagai fungsi distribusi logistik :

$$P_i = \frac{1}{(1+e^{-z_i})} = \frac{e^{z_i}}{(1+e^{z_i})} \quad \text{dimana } Z_i = \beta_1 + \beta_2 X_i \quad (3.3)$$

Persamaan 3.2 lebih dikenal sebagai *logistic distribution function*. Persyaratan yang diminta sebelumnya, yaitu model probabilita yang menghasilkan nilai Y antara interval satu sampai dengan nol dan menghasilkan hubungan antara P_t dan X_t yang tidak linier dapat terpenuhi. Hal ini disebabkan saat Z berkisar antara $-\infty$ sampai dengan ∞ , P_i berkisar antara 0 dan 1 sehingga P_i tidak berhubungan linier dengan Z . Meskipun begitu masih terdapat masalah estimasi karena P tidak hanya tidak linier pada X tetapi juga pada β . Namun masalah estimasi tersebut dapat diatasi, seperti dapat ditunjukkan pada persamaan berikut, apabila P_i merupakan probabilita terjadinya suatu peristiwa, dinyatakan melalui persamaan (3.2), maka probabilita tidak terjadinya suatu peristiwa adalah :

$$1 - P_i = \frac{1}{(1+e^{z_i})} \quad (3.4)$$

Sehingga kita dapat menulis persamaan sebagai berikut :

$$\frac{P_i}{1-P_i} = 1 + \frac{e^{z_i}}{1+e^{-z_i}} = e^{z_i} \quad (3.5)$$

Persamaan diatas yaitu $P_i/1-P_i$ dikenal dengan *odds ratio*, yaitu probabilita peluang sukses dengan peluang gagal. Jika kita ambil natural log dari persamaan (3.4) maka didapatkan :

$$L_i = \ln\left(\frac{P_i}{1-P_i}\right) = Z_i = \beta_1 + \beta_2 X_i \quad (3.6)$$

Persamaan (3.5) merupakan persamaan dimana L disebut logit dan juga merupakan bentuk model logit. L atau log dari *odds ratio* tidak hanya bersifat linier pada X tetapi juga bersifat linier terhadap parameter. Persamaan tersebut yang dikenal sebagai model logit. Karakteristik dari model logit tersebut yaitu :

1. Nilai P , yaitu nilai probabilita terjadinya suatu peristiwa bergerak antara nilai 0 dan 1, maka nilai logit akan bergerak pada $-\infty$ sampai ∞ .

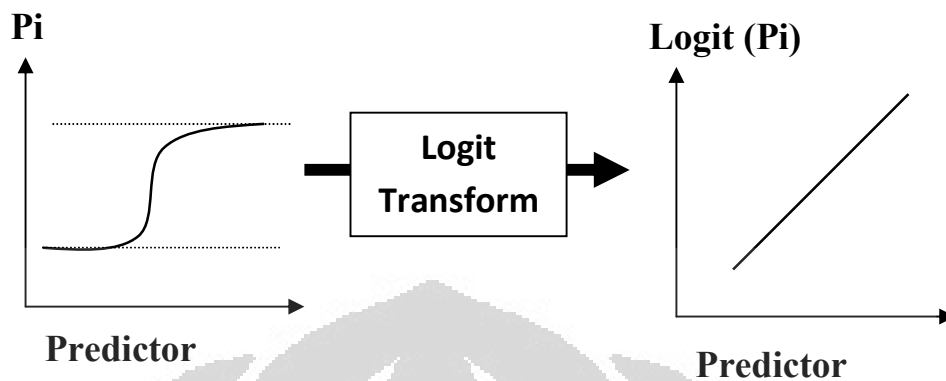
2. Nilai L , yaitu rasio antara probabilitas terjadinya peristiwa dengan probabilitas tidak terjadinya peristiwa, linier dengan parameter, namun P tidak.
3. Variabel dalam persamaan regresi logistik dapat ditambah sebanyak mungkin selama didukung oleh teori-teori yang mendukung.
4. Jika L positif, artinya ketika persamaan regresi logistik meningkat, maka meningkat pula kemungkinan P sama dengan 1 (artinya terjadinya suatu peristiwa), begitu pula sebaliknya.
5. Interpretasi dari model logit adalah sebagai berikut : β_2 , *slope*, adalah besarnya perubahan L untuk setiap 1 unit perubahan X , atau dapat juga dikatakan bahwa *slope* β_2 merupakan pengukur perubahan nilai L karena perubahan nilai X . Jika model memiliki koefisien *slope* yang positif, maka peluang suatu kejadian akan meningkat seiring dengan peningkatan nilai variabel independen. Sebaliknya, jika koefisiennya negatif, peluang kejadiannya akan menurun seiring nilai variabel penjelas yang semakin tinggi. β_1 , *intercept*, adalah besarnya nilai L jika seluruh variabel bebas bernilai 0.
6. Model logit juga mengasumsikan bahwa log dari *odds ratio* linier terhadap X atau nilai sebuah slope.

Analisa regresi logistik bekerja dengan menggunakan variabel penjelas, kategorik dan numerik, untuk mengestimasi probabilitas terjadinya sebuah kejadian tertentu. Permodelannya dilakukan melalui formulasi transformasi logit berupa:

$$\text{Logit}(\pi_i) = \log_e \left(\frac{\pi_i}{1-\pi_i} \right)$$

Persamaan diatas dapat diterangkan sebagai berikut : π_i merupakan probabilitas terjadinya kategori sukses dari sebuah kejadian. Probabilitas sukses ini berdasarkan pengaruh variabel penjelas terhadap variabel terikat pada orang ke- i . \log_e merupakan suatu logaritma dengan basis bilangan e . Dalam penelitian ini, model tersebut digunakan untuk meneliti kejadian sukses terjadinya sebuah rumah tangga menjadi miskin dibandingkan dengan sukses terjadinya sebuah rumah tangga

menjadi tidak miskin di provinsi Banten. Cara kerja umum *conditional probability model* adalah (Greene, 1990) :



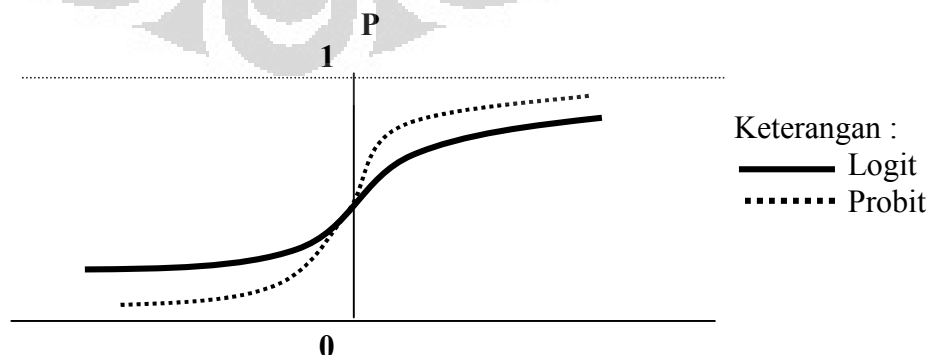
Gambar 3.1 Transformasi Logit

Sumber : Modul Regresi Logistik, Statistika IPB, 2007

Apabila *error term*, selisih antara nilai variabel yang diestimasi dengan nilai sebenarnya terdistribusi secara normal, maka regresi probabilita dapat menggunakan model probit. Model probit dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y_i = x_i\beta + u_i$$

Dimana nilai $u_i \sim N(0,1)$ atau error mengikuti distribusi normal dengan rerata 0, dan varians konstan antar variabel independen bernilai 1. Dalam model probit ini, distribusi Y bersifat normal dan variansnya konstan. Apabila *error term* tidak terdistribusi normal, maka yang digunakan adalah model logit. Perbedaan keduanya dapat terlihat pada gambar 3.2 dan tabel 3.3.



Gambar 3.2 Distribusi Kumulatif Logit dan Probit

Sumber : Gujarati, Basic Econometric, 2003

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa *conditional probability* P_i pada logit lebih mendekati 0 dibandingkan probit, dan sedikit lebih lambat mendekati 1 daripada probit. Pada tabel yang diambil dari Gujarati, diperlihatkan bahwa model logit merupakan *cummulative logistic* sementara probit adalah *cummulative normal*.

Meskipun *cummulative logistic* dan *cummulative normal* nilai tengahnya adalah sama yaitu 0, namun variannya memiliki nilai yang berbeda. *Cummulative normal* memiliki varian bernilai 1 sementara *cummulative logistic* memiliki varian $\pi^2/3$. Nilai koefisien logit dapat diperoleh dengan mengalikan nilai koefisien probit dengan $\pi^2/3$ (1.81). Sedangkan nilai koefisien probit diperoleh dengan mengalikan nilai koefisien logit dengan $\pi^2/3$ (1.81).

Tabel 3.3 Nilai dari Cummulative Probability Function

Z	Cummulative Normal	Cummulative Logistic
	$P1(Z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^Z e^{-\frac{s^2}{2}} ds$	$P2(Z) = \frac{1}{1 + e^{-Z}}$
-2.0	0.0228	0.1192
-1.0	0.1587	0.2689
0	0.5000	0.5000
1	0.8413	0.7311
2	0.9772	0.8808

Sumber : Gujarati, Basic Econometric, 2003

Pada prinsipnya, kedua model tersebut menggunakan jenis metode kerja yang sama, namun model logit lebih populer digunakan dalam penelitian karena persamaan matematikanya lebih sederhana. Oleh karenanya metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model logit.

3.5 Klasifikasi Model Logit

Berdasarkan jenis variabel dependennya, regresi logistik dapat dibedakan ke dalam 2 jenis, yaitu :

- 1) *Binary Logistic Regression* (Regresi Logistik Biner). Regresi logistik biner digunakan ketika hanya ada dua kemungkinan variabel respon (Y). Regresi logistik biner telah banyak digunakan secara luas sebagai salah satu alat analisis pemodelan ketika variabel responnya (Y) bersifat biner. Istilah biner merujuk pada penggunaan dua buah bilangan 0 dan 1 untuk menggantikan dua kategori pada variabel respon. Contoh variabel respon yang dimaksud adalah kesuksesan (sukses – gagal), kesetujuan (setuju – tidak setuju), keinginan membeli (ya – tidak), dan masih banyak lagi.
- 2) *Multinomial Logistic Regression* (Regresi Logistik Multinomial). Regresi logistik multinomial atau disebut juga model logit politomus adalah model regresi yang digunakan untuk menyelesaikan kasus regresi dengan variabel dependen berupa data kualitatif berbentuk *multinomial* (lebih dari dua kategori) dengan satu atau lebih variabel independen.

Dalam penelitian ini karena variabel respon (Y) hanya terdiri dari 2 kemungkinan yaitu rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin, maka yang digunakan adalah regresi logistik biner.

3.6 Pengujian Statistika dan Signifikansi Variabel

Pengujian statistik dilakukan untuk menguji apakah variabel independen pada model benar mempengaruhi variabel dependen secara signifikan, mengetahui arah dan pengaruh, dan mencari koefisien besar signifikansi tersebut.

Dalam regresi logistik terdapat dua pengujian yaitu uji simultan untuk seluruh variabel penjelas dan uji parsial untuk masing-masing variabel penjelas. Pada regresi linier uji untuk seluruh variabel atau uji simultan adalah uji F, sedangkan untuk uji signifikansi parsial tiap variabel dilakukan uji t. Pada regresi logistik uji simultan digunakan dengan menggunakan uji rasio kemungkinan (*likelihood ratio test*) yang merupakan rasio antara dua buah nilai likelihood, sedangkan untuk uji signifikansi parsial menggunakan uji Z-stat.

Asumsi yang harus dipenuhi pada model regresi logistik adalah *error* pada hasil estimasi haruslah terdistribusi normal. Asumsi tersebut tidak memerlukan

pengujian khusus sehingga hampir selalu dipenuhi dalam setiap data yang digunakan dalam penelitian. Namun pengujian multikolinearitas akan dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi yang kuat antar variabel independen. Perbandingan antara pengujian regresi linier dengan regresi logistik dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4 Perbandingan Pengujian Regresi linier dan Regresi Logistik

	Regresi Linier	Regresi Logistik
Uji Serentak	F-Stat	Uji <i>G</i>
Uji Parsial	t-stat	Uji <i>Wald</i>
<i>Goodness of fit</i>	<i>R Square</i>	<i>Count R-Square</i>

Apabila metode regresi linier biasa digunakan dalam model distribusi logistik, maka estimator tidak dapat memenuhi kriteria BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*). Hal ini disebabkan; varian *error*-nya tidak terdistribusi normal, estimator tidak efisien akibat heteroskedastisitas dan R^2 tidak dapat digunakan sebagai pengukur *goodness of fit*. Oleh karena itu pada logit model, digunakan *maximum likelihood* untuk menggantikan fungsi *least square* yang meminimumkan *error*. Penggunaan *maximum likelihood* diharapkan akan mendekati nilai variabel yang diestimasi dengan nilai variabel yang sebenarnya terjadi. Metode *maximum likelihood* bekerja dengan membentuk suatu persamaan yang menunjukkan bahwa probabilitas dari data yang diobservasi merupakan fungsi dari parameter yang diestimasi.

a. Uji Parsial dengan Z-Stat

Uji parsial dilakukan dengan uji Z-Stat untuk melihat apakah masing-masing variabel independen secara terpisah mempengaruhi variabel dependen. Z-stat dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut :

$$H_0 = \text{variabel independen (X) tidak mempengaruhi variabel dependen (Y) dimana } a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0 \text{ (tidak signifikan)}$$

H_1 = variabel independen (X) mempengaruhi variabel dependen (Y)
dimana $\alpha \neq 0$ (signifikan)

Dalam menentukan menerima atau menolak H_0 , nilai Z-Stat pada masing-masing variabel independen dibandingkan dengan tingkat nyata (α). H_0 akan ditolak apabila $Z\text{-Stat} < \alpha$. Dan H_0 tidak akan ditolak apabila $Z\text{-Stat} \geq \alpha$. Nilai dari α dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.5 Nilai Tingkat Keyakinan dan Tingkat Nyata

Tingkat Keyakinan	Tingkat Nyata
95%	5% = 0.05
90%	10% = 0.1
80%	20% = 0.2

Sumber: Kharisma, 2007

Pada software SPSS untuk menguji variabel independen mana saja yang berpengaruh nyata terhadap variabel dependen, dapat menggunakan uji signifikansi dari parameter koefisien secara parsial dengan statistik uji Wald, yang serupa dengan statistik uji t atau uji Z dalam regresi linear biasa, yaitu dengan membagi koefisien terhadap standar *error* masing-masing koefisien. Dari output SPSS ditampilkan nilai Wald dan *p-value*nya. Berdasarkan nilai *p-value* tersebut dapat dilihat variabel bebas mana saja yang berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Jika $p\text{-value} > \alpha$ (pada derajat tertentu), maka variabel bebas tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat, namun jika $p\text{-value} < \alpha$, maka variabel bebas signifikan mempengaruhi variabel terikat.

b. Uji serentak dengan *Likelihood Ratio*

Mirip dengan F test pada model regresi linier, adalah *likelihood ratio* (LR) yang digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen dalam model serentak mempengaruhi variabel dependen. Hipotesis dalam pengujian *Likelihood Ratio* tersebut adalah :

H_0 = semua variabel independen secara serentak tidak mempengaruhi variabel dependen.

H_1 = semua variabel independen secara serentak mempengaruhi variabel dependen.

Hipotesa 0 akan ditolak apabila probabilita *Likelihood Ratio* $< \alpha$ dan Hipotesa 0 tidak akan ditolak apabila probabilita *Likelihood Ratio* $> \alpha$.

Pada software SPSS, uji keseluruhan model menggunakan uji G. Statistik G ini menyebar menurut sebaran *Chi-Square* (χ^2). Karenanya dalam pengujiannya nilai G dapat dibandingkan dengan nilai χ^2 tabel pada α tertentu dan derajat bebas $k-1$. Kriteria pengujian dan cara pengujian persis sama dengan uji F pada metode regresi linier. Jika nilai *Chi-Square* (χ^2) lebih kecil dengan nilai χ^2 tabel pada α tertentu, maka H_0 diterima. Jika nilai *Chi-Square* (χ^2) $>$ nilai χ^2 tabel pada α tertentu, maka H_0 akan ditolak.

c. *Goodness of fit* dengan *R-square*

Untuk melihat seberapa besar variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel independen, dan untuk melihat seberapa baik model dapat menjelaskan variabel dependen, maka statistik menggunakan *R-square* (R^2). Semakin tinggi nilai *R-square* maka menunjukkan model semakin mampu menjelaskan variabel dependen. Oleh karena itu nilai *R-square* yang tinggi sangat diharapkan dalam suatu penelitian.

Namun logika ekonomi tetap diutamakan dalam melihat *R-square* tersebut. Apabila pada data *cross-section* didapatkan nilai *R-square* yang rendah namun pengujian Z-stat signifikan dan arahnya sesuai dengan berbagai teori yang mendukung, maka model tersebut dapat digolongkan sebagai model yang layak dan telah teruji secara teoritis (Gujarati, 2003). Pada model logit, penggunaan *R-square* masih diperdebatkan. Metode *R-square* pada model logit dinyatakan sebagai *pseudo R-square* atau tiruan *R-square* yang digunakan untuk menggantikan *R-square* biasa. Hal ini dilakukan karena tidak adanya

padanan yang tepat dalam menggantikan *R-square* biasa. (UCLA *Academic Technology Service*, 2007. Dalam Kharisma, 2007).

Cara lain yang dapat dengan mudah mengukur *goodness of fit* adalah *count R²* yang didefinisikan sebagai berikut¹⁰:

$$\text{count } R^2 = \frac{\text{jumlah prediksi yang tepat}}{\text{jumlah observasi}}$$

Karena nilai *regressand* pada logit adalah 1 atau 0, jika nilai kemungkinan lebih dari 0,5 maka dianggap sebagai 1. Jika nilai kemungkinan kurang dari 0,5 maka dianggap sebagai 0. Namun harus diingat bahwa dalam *binnary regressand model* nilai *goodness of fit* merupakan prioritas kedua. Yang harus diperhatikan pertama kali adalah tanda dan signifikansi koefisien regresi secara statistik.

3.7 Interpretasi Dengan Odds Ratio

Hasil koefisien variabel dependen yang didapatkan dari hasil penelitian melalui model logit tidak dapat langsung diinterpretasikan seperti pada model regresi linier. Diperlukan transformasi logit dengan cara mentransformasi koefisien estimasi tersebut ke dalam antilog natural untuk mendapatkan *odds ratio*. Pemahaman mengenai *odds ratio* sangat diperlukan dalam konsep regresi logistik. *Odds ratio* berperan dalam memudahkan proses interpretasi model regresi logistik yang diperoleh.

Agar menjadi bentuk yang linier, fungsi logistik harus ditransformasi sedemikian rupa, salah satu bentuk transformasinya dikenal dengan transformasi logit. Walaupun transformasi logit bukanlah satu-satunya bentuk transformasi fungsi logistik, namun bentuk logitlah yang paling banyak dipakai.

Transformasi logit dapat dituliskan sebagai berikut :

¹⁰ Count R2 sering juga disebut dengan istilah *Percentage Correctly Estimated (PCE)* berguna untuk menunjukkan tingkat akurasi prediksi dari model yang dibentuk

$$F_L^{-1}(\pi_i) = \pi_i = \ln\left(\frac{\pi_i}{1-\pi_i}\right) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots \quad (3.7)$$

Keterangan :

- π_i = transformasi logit dari peluang π_i
 π_i = peluang terjadinya kejadian untuk variabel respon $Y = 1$
 $1 - \pi_i$ = peluang terjadinya kejadian untuk variabel respon $Y = 0$
 $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \dots$ = koefisien model regresi logistik
 X_1, X_2, \dots = koefisien model regresi logistik

Dari persamaan 3.7 dapat dilihat odds ratio yang dituliskan sebagai :

$$\left(\frac{\pi_i}{1-\pi_i}\right) \quad (3.8)$$

Dengan demikian *odds ratio* adalah rasio (perbandingan) antara peluang kejadian untuk $Y = 1$ dan peluang kejadian untuk $Y = 0$. Sebagai contoh pada data variabel respon Y yang berisi kejadian sukses dan gagal. Apabila pengamatan Y ke- i merupakan kejadian sukses dan dilambangkan $Y_i = 1$, maka peluang untuk $Y_i = 1$ adalah π_i , sedangkan peluang untuk $Y_i = 0$ (gagal) adalah $1 - \pi_i$, sehingga *odds ratio* dalam kasus ini adalah rasio antara peluang sukses dengan peluang gagal. Hal yang sama dapat kita analogikan dengan peluang rumah tangga menjadi miskin dan peluang rumah tangga menjadi tidak miskin. Pada penelitian ini rumah tangga miskin dilambangkan dengan $Y_i = 1$ dan rumah tangga tidak miskin dilambangkan dengan $Y_i = 0$, maka odds ratio pada penelitian ini adalah perbandingan antara peluang rumah tangga menjadi miskin dan peluang rumah tangga menjadi tidak miskin.

Odds ratio tersebut kemudian diinterpretasikan sebagai nilai yang menunjukkan pengaruh perubahan variabel dependen. Sebelum dilakukan langkah transformasi logit, hanya dapat diketahui arah dari pengaruh variabel dependen yang belum dapat diinterpretasikan. Dalam software SPSS yang digunakan dalam penelitian ini, transformasi logit tersebut dapat dengan mudah dilakukan sehingga nilai *odds ratio* sudah tertera dalam output. Dalam SPSS nilai *odds ratio* berada pada kolom Exp(B).

BAB 4 PENGUJIAN DAN ANALISIS

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil pengujian terhadap model dan juga analisis terhadap hasil estimasi pengolahan data tersebut. Hasil pengolahan data dengan menggunakan model logit disajikan pada lampiran tesis ini. Pengujian model meliputi uji multikolinearitas, tes signifikansi yaitu uji hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dimana hubungan tersebut bersifat dua jenis : hubungan serentak yaitu hubungan antara seluruh variabel independen yang ada di dalam model dengan variabel dependen, dan hubungan parsial yaitu hubungan antar salah satu variabel independen dengan dependen.

Variabel dependen pada model penelitian ini adalah kemiskinan rumah tangga di kabupaten/kota di provinsi Banten, semuanya ada sembilan model yaitu Kemiskinan Rumah Tangga Provinsi (KRTP), Kemiskinan Rumah Tangga Kabupaten Pandeglang (KTMPD), Kemiskinan Rumah Tangga Kabupaten Lebak (KRTL), Kemiskinan Rumah Tangga Kabupaten Tangerang (KRTT), Kemiskinan Rumah Tangga Kabupaten Serang (KRTS), Kemiskinan Rumah Tangga Kota Tangerang (KRTKT), Kemiskinan Rumah Tangga Kota Cilegon (KRTKC), Kemiskinan Rumah Tangga Kota Serang (KRTKS) dan Kemiskinan Rumah Tangga Kota Tangerang Selatan (KRTKTS), sementara variabel dependennya adalah; variabel *dummy* desa atau kota (Desa), variabel *dummy* jenis kelamin kepala rumah tangga laki-laki atau perempuan (JKL), variabel jumlah anggota rumah tangga (JART), variabel *dummy* untuk tingkat pendidikan kepala rumah tangga (Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi), variabel *dummy* pekerjaan kepala rumah tangga (Pertanian, Industri, Perdagangan dan Jasa/Lainnya). Variabel Program Bantuan Pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan berupa bantuan kredit usaha baik dari pemerintah ataupun pihak lain seperti program PNPB, Kredit Usaha Rakyat, Koperasi dan lain-lain (bantuan_kredit).

4.1 Uji Pelanggaran Multikolinearitas

Pada model regresi logistik, satu-satunya asumsi yang harus dipenuhi adalah distribusi normal pada *error* dari hasil estimasi. Syarat tersebut tidak memerlukan pengujian khusus dan hampir selalu terpenuhi pada semua jenis data. Meskipun begitu, tetap diperlukan pengujian multikolinearitas untuk mengetahui apakah ada korelasi yang kuat antara variabel independen pada model ini. Hasil output dari pengujian multikolinearitas pada semua model terdapat pada matriks korelasi yang dapat dilihat pada lampiran 2 tesis ini.

Pada pengujian multikolinearitas, indikasi adanya korelasi yang kuat antar variabel independen ditunjukkan dengan angka korelasi yang melebihi 0,8. Hasil output pada keseluruhan model baik pada model provinsi maupun kabupaten/kota menunjukkan bahwa tidak terdapat angka korelasi antar variabel independen yang melebihi angka 0,8, sehingga bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas pada variabel-variabel independen dalam seluruh model.

4.2 Uji Keseluruhan Model (Uji G)

Jika metode regresi linier menggunakan uji F, maka pada model logit menggunakan uji G. Statistik G ini menyebar menurut sebaran *Chi-Square* (χ^2). Karenanya dalam pengujiannya, nilai G dapat dibandingkan dengan nilai χ^2 tabel pada α tertentu dan derajat bebas $k-1$. Kriteria pengujian dan cara pengujian persis sama dengan uji F pada metode regresi linier. Tetapi, bisa juga dilihat dari *p-value* dari nilai G yang biasanya ditampilkan oleh software-software statistik termasuk SPSS. Hasil uji keseluruhan model pada $\alpha = 5\%$ dibandingkan dengan nilai tabel *Chi-Square* (χ^2) dengan df $k-1 = 9$ yaitu 16.91898, memperlihatkan bahwa semua variabel independen dalam seluruh model baik model provinsi maupun kabupaten/kota secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model regresi logistik ini secara keseluruhan dapat menjelaskan atau memprediksi apakah sebuah rumah tangga dapat menjadi miskin atau tidak miskin. Selengkapannya hasil Uji G tersaji dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1 Hasil Uji Keseluruhan Model (Uji G)

Model	Nilai <i>Chi-Square</i>	Nilai Tabel <i>Chi-Square</i>	<i>p-value (sig.)</i>	Keterangan
KRTP	362322.555	16.91898	0,000	Signifikan
KRTPD	19958.207	16.91898	0,000	Signifikan
KRTL	35326.406	16.91898	0,000	Signifikan
KRTT	58977.467	16.91898	0,000	Signifikan
KRTS	34892.693	16.91898	0,000	Signifikan
KRTKT	26084.811	15.50731	0,000	Signifikan
KRTKC	6139.362	16.91898	0,000	Signifikan
KRTKS	13809.419	16.91898	0,000	Signifikan
KRTKTS	11378.451	15.50731	0,000	Signifikan

Untuk model rumah tangga miskin pada Kota Tangerang dan Tangerang Selatan (KRTKT & KRTKTS), $df\ k-1 = 8$, variabel Letak geografis dihilangkan oleh software SPSS, karena pada kedua daerah tersebut untuk Letak geografis dari data Susenas hanya terdapat satu katagori yaitu “kota” saja, tidak ada katagori “desa”. Nilai tabel *Chi-Square* (χ^2) dengan $df\ k-1 = 8$ yaitu 15.50731 pada $\alpha = 5\%$, signifikan jika dibandingkan dengan nilai *Chi-Square* pada hasil regresi, artinya semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

4.3 Uji Variabel (Uji *Wald*)

Uji *Wald* digunakan untuk menguji masing-masing variabel yang ada di dalam model apakah signifikan secara statistik atau tidak. Uji *Wald* ini serupa dengan statistik uji t atau uji Z dalam regresi linear biasa, yaitu dengan membagi koefisien terhadap standar *error* masing-masing koefisien. Dari output SPSS ditampilkan nilai *Wald* dan nilai *p-value*. Berdasarkan nilai *p-value* dan menggunakan kriteria pengujian $\alpha = 5\%$ dapat dilihat pengaruh dari tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil Uji Variabel (Uji *Wald*) dan Arah Secara Statistik ditampilkan dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2 Hasil Uji Variabel (Uji *Wald*) dan Arah Secara Statistik

Wilayah	Variabel	Nilai <i>Wald</i>	Arah	<i>P-value</i> (sig)	Signifikansi Variabel ($\alpha=0.05$)
Provinsi :	Desa	102729.321	-	0.000	Signifikan
	Jenis Kelamin	188.034	+	0.000	Signifikan
	Jart	105499.9	+	0.000	Signifikan
	Pendidikan Dasar	13.673	-	0.000	Signifikan
	Pendidikan Menengah	8507.052	-	0.000	Signifikan
	Pertanian	6731.394	+	0.000	Signifikan
	Industri	34.141	-	0.000	Signifikan
	Perdagangan	576.349	-	0.000	Signifikan
	Kredit	1826.643	+	0.000	Signifikan
Kab. Pandeglang :	Desa	395.158	-	0.000	Signifikan
	Jenis Kelamin	457.524	-	0.000	Signifikan
	Jart	15267.739	+	0.000	Signifikan
	Pendidikan Dasar	330.016	+	0.000	Signifikan
	Pendidikan Menengah	813.324	-	0.000	Signifikan
	Pertanian	.004	+	0.949	Tidak Signifikan
	Industri	272.675	-	0.000	Signifikan
	Perdagangan	529.152	-	0.000	Signifikan
	Kredit	56.792	-	0.000	Signifikan
Kab. Lebak	Desa	2245.708	-	0.000	Signifikan
	Jenis Kelamin	419.807	-	0.000	Signifikan
	Jart	18733.249	+	0.000	Signifikan
	Pendidikan Dasar	1686.864	-	0.000	Signifikan
	Pendidikan Menengah	1512.705	-	0.000	Signifikan
	Pertanian	12.881	+	0.000	Signifikan
	Industri	689.530	-	0.000	Signifikan
	Perdagangan	1248.792	-	0.000	Signifikan
	Kredit	.003	-	0.953	Tidak Signifikan
Kab. Tangerang	Desa	1415.928	-	0.000	Signifikan
	Jenis Kelamin	0.006	-	0.939	Tidak Signifikan
	Jart	33496.690	+	0.000	Signifikan
	Pendidikan Dasar	5.700	-	0.017	Signifikan
	Pendidikan Menengah	3239.072	-	0.000	Signifikan
	Pertanian	14.533	-	0.000	Signifikan
	Industri	1443.052	-	0.000	Signifikan
	Perdagangan	1693.930	-	0.000	Signifikan
	Kredit	17.930	-	0.000	Signifikan
Kab. Serang	Desa	1628.447	-	0.000	Signifikan
	Jenis Kelamin	323.573	+	0.000	Signifikan
	Jart	17407.099	+	0.000	Signifikan
	Pendidikan Dasar	336.190	-	0.000	Signifikan
	Pendidikan Menengah	398.836	-	0.000	Signifikan
	Pertanian	103.436	-	0.000	Signifikan
	Industri	841.335	-	0.000	Signifikan
	Perdagangan	188.945	-	0.000	Signifikan
	Kredit	.008	-	0.929	Tidak Signifikan

(sambungan tabel 4.2)

Wilayah	Variabel	Nilai <i>Wald</i>	Arah	<i>P-value</i> (sig)	Signifikansi Variabel ($\alpha=0.05$)
Kota Tangerang	Jenis Kelamin	152.318	+	0.000	Signifikan
	Jart	18304.732	+	0.000	Signifikan
	Pendidikan Dasar	338.765	+	0.000	Signifikan
	Pendidikan Menengah	56.784	-	0.000	Signifikan
	Pertanian	64.106	-	0.000	Signifikan
	Industri	1064.053	-	0.000	Signifikan
	Perdagangan	910.886	-	0.000	Signifikan
	Kredit	16.698	-	0.000	Signifikan
Kota Cilegon	Desa	567.932	-	0.000	Signifikan
	Jenis Kelamin	5.935	-	0.000	Signifikan
	Jart	3198.538	+	0.000	Signifikan
	Pendidikan Dasar	68.468	+	0.000	Signifikan
	Pendidikan Menengah	.115	+	0.734	Tidak Signifikan
	Pertanian	452.378	+	0.000	Signifikan
	Industri	198.025	+	0.000	Signifikan
	Perdagangan	218.446	+	0.000	Signifikan
Kredit	.001	-	0.972	Tidak Signifikan	
Kota Serang	Desa	357.279	-	0.000	Signifikan
	Jenis Kelamin	7.035	+	0.008	Signifikan
	Jart	7015.052	+	0.000	Signifikan
	Pendidikan Dasar	600.021	+	0.000	Signifikan
	Pendidikan Menengah	.008	-	0.931	Tidak Signifikan
	Pertanian	214.085	-	0.000	Signifikan
	Industri	26.831	-	0.000	Signifikan
	Perdagangan	311.089	-	0.000	Signifikan
Kredit	27.254	+	0.000	Signifikan	
Kota Tangsel	Jenis Kelamin	.012	+	0.914	Tidak Signifikan
	Jart	5693.813	+	0.000	Signifikan
	Pendidikan Dasar	.021	+	0.886	Tidak Signifikan
	Pendidikan Menengah	.021	+	0.886	Tidak Signifikan
	Pertanian	.012	+	0.912	Tidak Signifikan
	Industri	448.001	+	0.000	Signifikan
	Perdagangan	770.534	+	0.000	Signifikan
	Kredit	.005	-	0.941	Tidak Signifikan

Dari tabel diatas terlihat bahwa secara keseluruhan semua variabel independen yaitu Letak geografis, jenis kelamin kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, tingkat pendidikan kepala rumah tangga, bidang pekerjaan kepala rumah tangga dan bantuan kredit berpengaruh terhadap kemiskinan rumah tangga. Namun pada beberapa kabupaten/kota ada beberapa variabel independen yang tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Di Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian tidak berpengaruh terhadap kemiskinan sebuah rumah tangga. Di Kota Cilegon, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan kepala rumah tangga yang mempunyai pendidikan setingkat SMA (pendidikan menengah) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan rumah tangga. Variabel bantuan kredit baik dari pihak pemerintah

maupun swasta ternyata tidak signifikan di beberapa daerah yaitu : Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan. Sedangkan pengaruh variabel jenis kelamin tidak ditemukan di Kota Tangerang Selatan.

Tanda atau arah positif maupun negatif menunjukkan resiko lebih besar atau lebih kecil variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Tanda positif berarti resiko kemiskinan rumah tangga akan meningkat seiring dengan peningkatan nilai variabel independen. Sedangkan tanda negatif adalah sebaliknya.

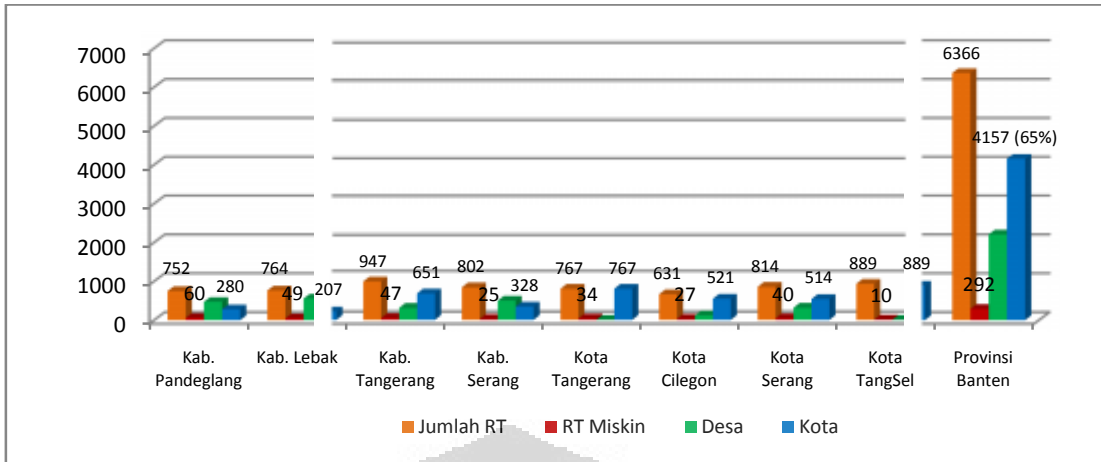
4.5 INTERPRETASI HASIL DAN ANALISIS

4.5.1 Profil Rumah Tangga di Provinsi Banten

Data Susenas yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 6.366 Rumah Tangga, dengan rincian Kabupaten Pandeglang sebanyak 752 Rumah Tangga (RT), Kabupaten Lebak 764 RT, Kabupaten Tangerang 947 RT, Kabupaten Serang 802 RT, Kota Tangerang 767 RT, Kota Cilegon 631 RT, Kota Serang 814 RT dan Kota Tangerang Selatan 889 RT. Dari jumlah tersebut berdasarkan garis kemiskinan, di tingkat Provinsi terdapat 550 Rumah Tangga Miskin (KRT), sedangkan di Kabupaten Pandeglang 60 KRT, Kabupaten Lebak 49 KRT, Kabupaten Tangerang 47 KRT, Kabupaten Serang 25 KRT, Kota Tangerang 34 KRT, Kota Cilegon 27 KRT, Kota Serang 40 KRT dan Kota Tangerang Selatan 10 KRT. Dibawah ini akan dijelaskan karakteristik profil rumah tangga yang didapat dari data Susenas Kor Provinsi Banten tahun 2010 :

A. Klasifikasi Desa/Kelurahan & Jumlah Rumah Tangga

Dari 6.366 rumah tangga di tingkat Provinsi, menurut klasifikasi desa/kelurahan sebanyak 4157 (65%) rumah tangga tinggal di kota, dan sisanya sebanyak 35% berada di desa. Selengkapnya dapat dilihat dari grafik di bawah ini :

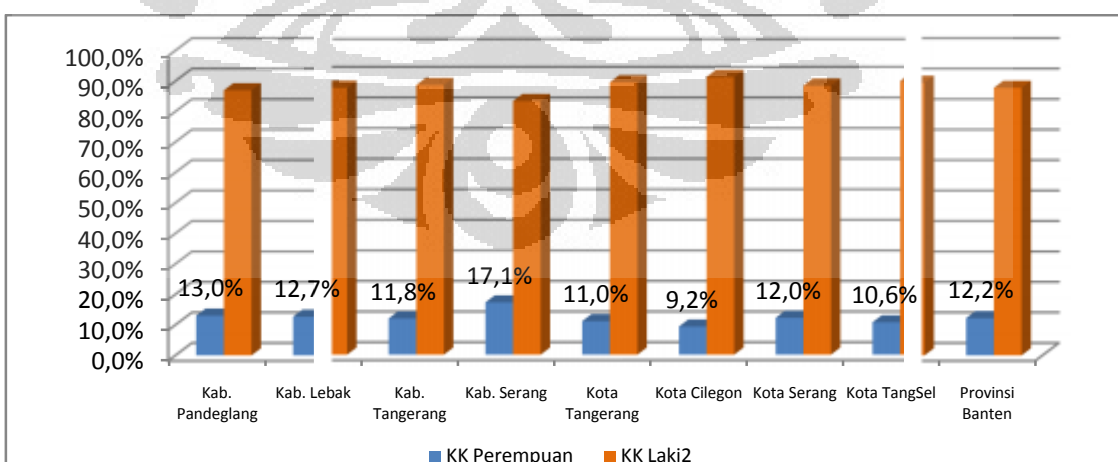


Gambar 4.1 Jumlah Rumah Tangga & Klasifikasi Desa/Kota

Dari gambar di atas terlihat bahwa di Kab. Pandeglang, Lebak dan Kab. Serang, rumah tangga yang tinggal di daerah perdesaan lebih banyak dibandingkan yang tinggal di daerah perkotaan. Sementara di kabupaten/kota lainnya, rumah tangga yang tinggal di kota lebih banyak dibandingkan rumah tangga yang tinggal di desa.

B. Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga

Data Susenas Kor Provinsi Banten tahun 2010 untuk profil kepala rumah tangga menurut jenis kelamin memperlihatkan bahwa di Kabupaten Serang, kepala rumah tangga perempuan paling banyak diantara daerah lainnya di Provinsi Banten yaitu sebesar 17,1%. Selengkapnya terlihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 4.2 Profil Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga

C. Jumlah Anggota Rumah Tangga

Profil rumah tangga menurut jumlah anggota rumah tangga dan rata-rata jumlah anggota rumah tangga dapat terlihat pada tabel berikut ini :

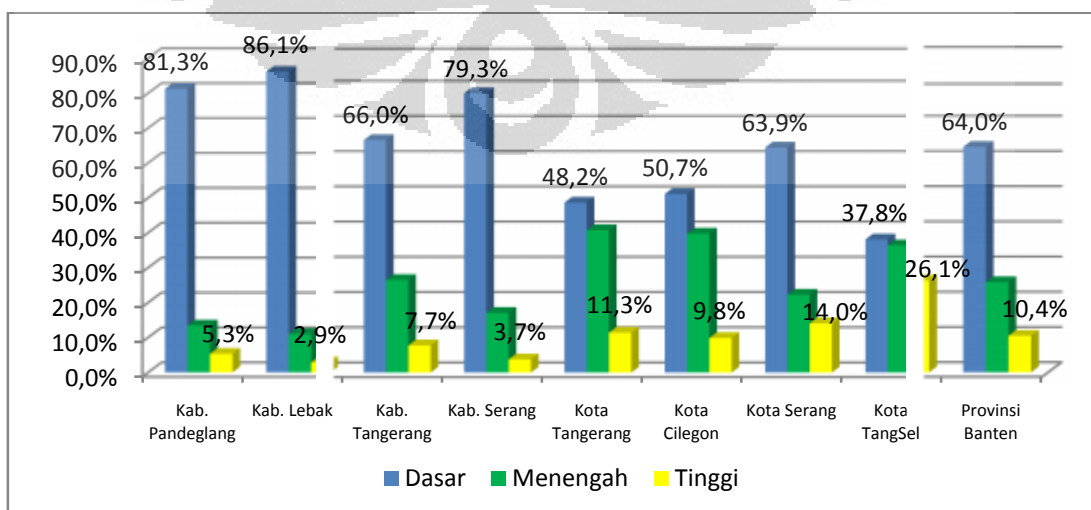
Tabel 4.3 Profil JART dan Rata-Rata JART

Kabupaten /Kota	Jumlah RT	JART	Rata-rata JART
Kabupaten Pandeglang	752	3153	4.19
Kabupaten Lebak	764	2981	3.90
Kabupaten Tangerang	947	3991	4.21
Kabupaten Serang	802	3371	4.20
Kota Tangerang	767	2922	3.81
Kota Cilegon	631	2722	4.31
Kota Serang	814	3857	4.74
Kota Tangerang Selatan	889	3475	3.91
Provinsi Banten	6366	26472	4.16

Dari tabel di atas terlihat bahwa yang paling tinggi jumlah anggota keluarganya adalah Kota Serang dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebanyak 4.74 jiwa. Sementara yang paling rendah adalah Kota Tangerang dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebanyak 3.81 jiwa.

D. Pendidikan Kepala Rumah Tangga

Data Susenas Kor Provinsi Banten Tahun 2010 untuk tingkat pendidikan kepala rumah tangga memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan kepala rumah tangga setingkat pendidikan dasar masih mendominasi di setiap wilayah, namun di dua Kabupaten yaitu Pandeglang dan Lebak, persentasenya sangat tinggi yakni di atas 80%.

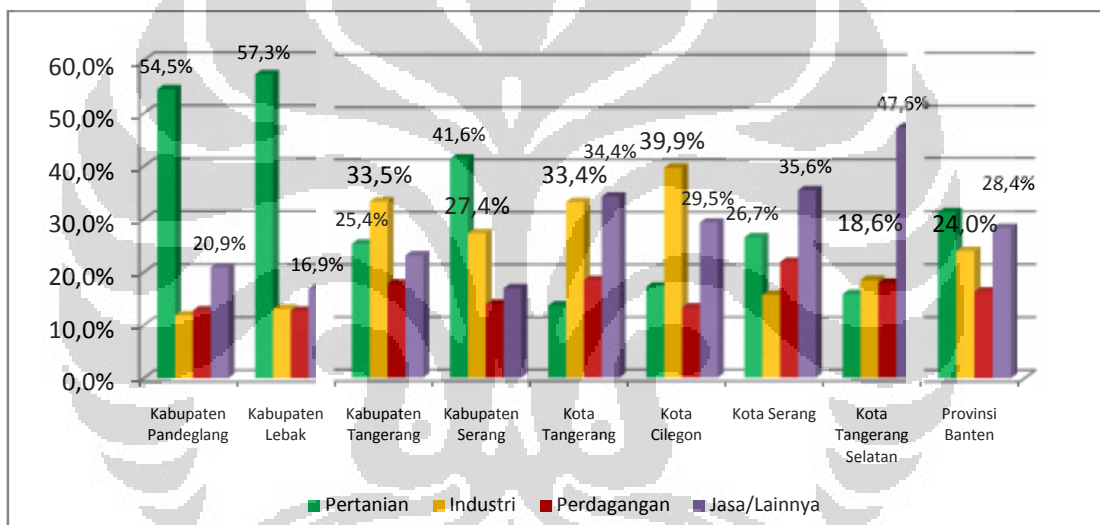


Gambar 4.3 Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga

Namun untuk Kota Tangerang Selatan kepala rumah tangga yang berpendidikan dasar dan berpendidikan menengah hampir sama jumlahnya, yakni 37% untuk pendidikan dasar dan 36% untuk pendidikan menengah dan sisanya 26% adalah kepala rumah tangga yang berpendidikan tinggi. Hal ini menandakan bahwa tingkat pendidikan kepala rumah tangga di Kota Tangerang Selatan lebih maju dibandingkan daerah lainnya.

E. Pekerjaan Kepala Rumah Tangga

Untuk variabel pekerjaan kepala rumah tangga, dari data susenas didapatkan bahwa sektor pertanian masih mendominasi di beberapa daerah yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang serta di tingkat Provinsi, seperti yang terlihat pada gambar 4. 4



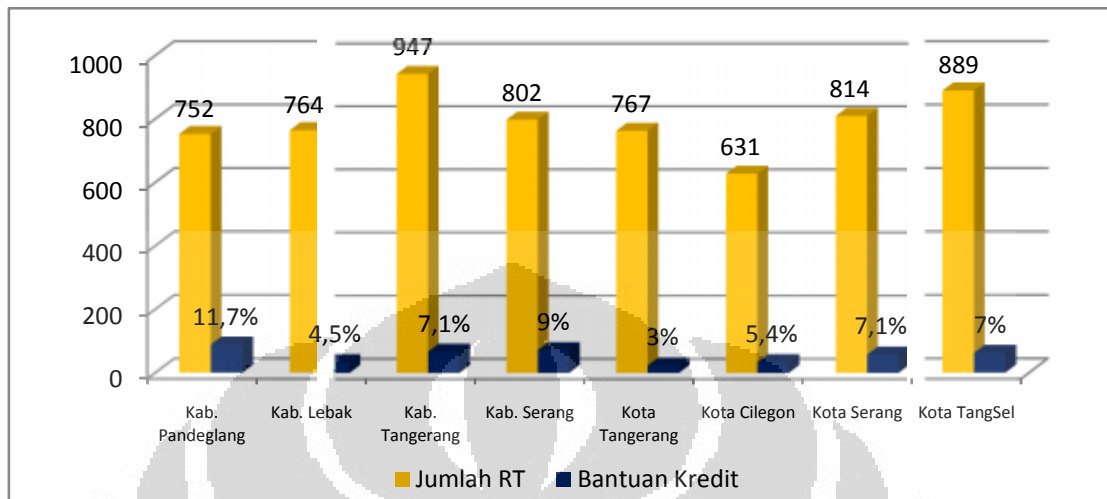
Gambar 4.4 Jenis Pekerjaan Kepala Rumah Tangga

Pekerjaan kepala rumah tangga di sektor industri terlihat mendominasi di Kota Cilegon dan Kabupaten Tangerang, sementara untuk Kota Serang dan Tangerang Selatan, sektor Jasa/lainnya terlihat lebih dominan.

F. Bantuan Kredit Usaha

Bantuan kredit usaha yang diberikan untuk penanggulangan kemiskinan, baik itu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Bank selain KUR maupun program lainnya, ternyata berdasarkan data Susenas Kor Provinsi Banten tahun 2010, persentase jumlah rumah tangga yang mendapat bantuan sangat kecil, rata-rata dibawah 10%.

Hanya Kabupaten Pandeglang yang di atas 10% yaitu 11,7%, seperti terlihat dalam gambar 4.5 di bawah ini:



Gambar 4.5 Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Bantuan Kredit

Dari gambar di atas terlihat bahwa Kota Tangerang merupakan daerah yang mendapat bantuan kredit usaha dengan persentase paling kecil yakni 3,0%. Disusul oleh Kabupaten Lebak sebanyak 4,5%, sementara daerah lainnya rata-rata antara 5-10%.

4.5.2 ANALISIS HASIL ESTIMASI

Untuk memudahkan analisis hasil estimasi dengan menggunakan *logistic distribution model*, maka nilai *odds ratio* (nilai resiko besar kecil) sebuah rumah tangga dapat menjadi miskin disajikan dalam tabel 4.11. Nilai positif atau negatif di dalam tabel merupakan arah yang didapat dari nilai koefisien, sebagaimana diketahui koefisien dalam model logit menunjukkan perubahan arah dalam logit sebagai akibat perubahan satu satuan variabel independen. Oleh karenanya, dalam model logit, dikembangkan pengukuran yang dikenal dengan nama *odds ratio* (ψ). *Odds ratio* dapat dirumuskan: $\psi = e^{\beta}$, dimana e adalah bilangan 2,71828 dan β adalah koefisien masing-masing variabel. *Odds ratio* untuk masing-masing variabel ditampilkan oleh SPSS pada kolom Exp(B).

Tabel 4.4 Nilai *Odds Ratio* dan Besar/Kecil Resiko Rumah Tangga Dapat Menjadi Miskin

	constant	Desa	JKL	Jart	Pend dasar	P.menengah	Pertanian	Industri	Perdagangan	Kredit
Provinsi	-0,004	7,383	-0,891	1,486	-0,974	-0,314	1,810	-0,949	-0,782	-0,623
Kab. Pandeglang	-0,007	1,452	1,621	1,550	1,579	-0,230		-0,600	-0,479	-0,831
Kab. Lebak	-0,001	8,998	1,769	1,950	-0,450	-0,049	1,083	-0,306	-0,050	
Kab. Tangerang	-0,006	1,706		1,635	-0,961	-0,122	-0,941	-0,504	-0,379	-0,905
Kab. Serang	-0,001	4,303	-0,397	2,026	-0,584	-0,315	-0,733	-0,274	-0,533	
Kota Tangerang	-0,007		-0,682	1,592	1,526	-0,827	-0,837	-0,546	-0,518	-0,841
Kota Cilegon	-0,000	4,961	1,201	1,737	1,863	1,029	5,459	2,939	3,751	
Kota Serang	-0,001	1,867	-0,849	1,701	3,021		-0,546	-0,778	-0,436	1,364
Kota Tangsel	-0,000			1,940				2.506	3.135	

Dari tabel Nilai *Odds Ratio* dan Besar/Kecil Resiko Rumah Tangga Dapat Menjadi Miskin diatas terlihat adanya variasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Dari keseluruhan variabel independen (klasifikasi desa/kelurahan, jenis kelamin, jumlah anggota rumah tangga, variabel pendidikan kepala rumah tangga, pekerjaan kepala rumah tangga, dan bantuan kredit usaha), memperlihatkan pengaruh yang berbeda-beda di tiap daerah. Dibawah ini akan dibahas satu persatu pengaruh dari tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen pada tiap daerah.

A. Pengaruh Klasifikasi Desa/Kelurahan Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga

Data Susenas untuk variabel Klasifikasi Desa/Kelurahan pada Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan tidak nampak pada output hasil regresi, karena di kedua wilayah ini hanya ada satu katagori klasifikasi desa/kelurahan, yakni katagori kota saja, tidak ada katagori desa. Di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, pengaruh klasifikasi desa/kelurahan (perdesaan atau perkotaan berdasarkan fasilitas di wilayah tersebut) terhadap kemiskinan rumah tangga memperlihatkan hasil yang seragam, dengan nilai koefisien semuanya positif, yaitu

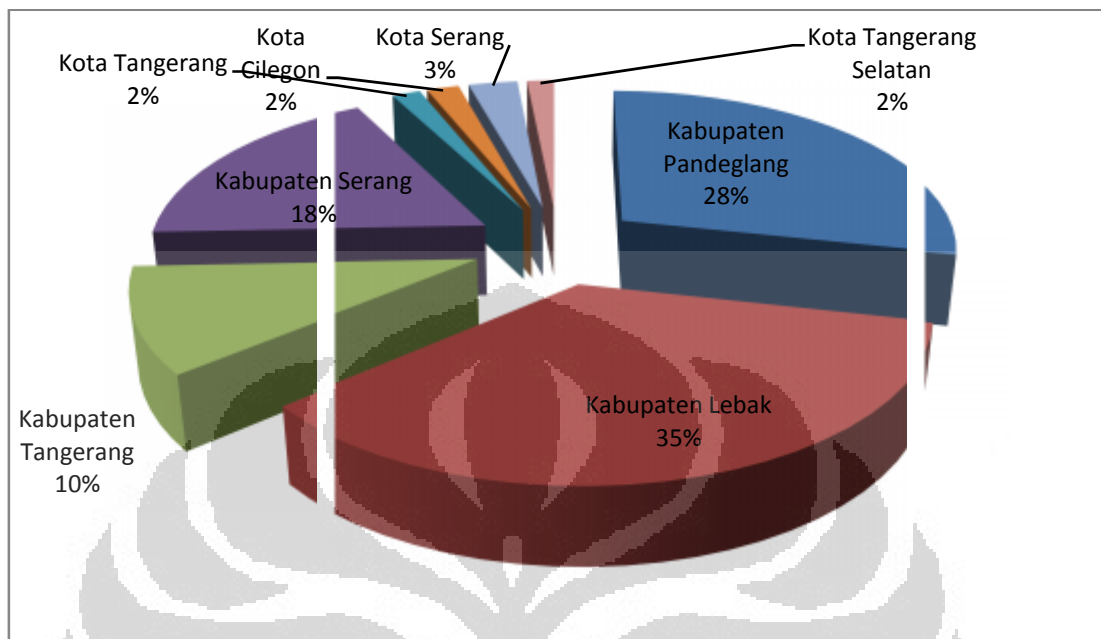
resiko kemiskinan rumah tangga akan meningkat jika rumah tangga itu berada di daerah perdesaan. Dengan kata lain resiko kemiskinan lebih sedikit jika sebuah rumah tangga berada di perkotaan. Hasil ini telah sesuai dengan hipotesis awal yaitu ada hubungan antara fasilitas di perdesaan/perkotaan dengan kemiskinan, dan jika berada di perdesaan, maka kemungkinan rumah tangga menjadi miskin akan semakin besar. Tabel 4.5 memperlihatkan nilai koefisien (arah) dan nilai *odds ratio* untuk variabel klasifikasi desa/kelurahan.

Tabel 4.5 Nilai Odds Ratio Untuk Variabel Klasifikasi Desa/Kelurahan

Wilayah	Variabel Klasifikasi Desa/Kel (Desa =1, Kota = 0)	
	Nilai Odds Ratio	Nilai Koefisien
Provinsi	7,383	1,999
Kab. Pandeglang	1,452	0,373
Kab. Lebak	8,998	2,197
Kab. Tangerang	1,706	0,534
Kab. Serang	4.303	1,549
Kota Cilegon	4,961	1,602
Kota Serang	1,867	0,624

Di Kabupaten Lebak resiko kemiskinan rumah tangga yang tinggal di perdesaan hampir 9 kali lebih besar dibandingkan resiko kemiskinan rumah tangga di perkotaan, tertinggi diantara wilayah lainnya di Provinsi Banten. Hal ini bisa difahami karena lokasi geografis Kabupaten Lebak berada di daerah selatan Provinsi Banten, dimana umumnya masih berupa daerah perdesaan yang minim fasilitasnya dan lebih terbelakang di bandingkan wilayah utara Banten yang berbatasan langsung dengan wilayah DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Disini juga terdapat **masyarakat tradisional yang masih memegang teguh adat dan tradisi mereka yaitu Suku Baduy yang berada di daerah aliran sungai Ciujung di Pegunungan Kendeng, Banten Selatan. Di Kabupaten** terdapat pegunungan Sanggabuana dan Puncak Gunung Halimun. Kabupaten Lebak juga merupakan daerah dengan luas

wilayah yang paling besar (35%) diantara kabupaten/kota di Provinsi Banten, seperti terlihat pada gambar 4.6 dibawah ini :



Gambar 4.6 Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Buruknya infrastruktur pada wilayah Banten Selatan juga diduga menjadi penyebab ketertinggalan daerah ini dibandingkan daerah lainnya di Provinsi Banten. Pada tahun 2005 rasio panjang jalan terhadap luas wilayah masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Banten menunjukkan ketersediaan jaringan jalan yang bervariasi. Kabupaten/Kota yang berada pada wilayah Banten Utara umumnya telah terakses oleh jaringan jalan, namun sebaliknya beberapa kawasan di kabupaten yang terletak di wilayah Banten Selatan belum terakses oleh jaringan jalan. Kondisi ini terlihat dari rasio panjang jalan terhadap luas wilayah kabupaten/kota di Provinsi Banten. Hingga tahun 2004, Kota Cilegon merupakan wilayah yang memiliki rasio panjang jalan paling tinggi yakni sebesar 3,91, selanjutnya diikuti oleh Kota Tangerang (1,51), Kabupaten Serang (0,69), dan Kabupaten Tangerang (0,65). Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak yang merupakan dua wilayah di Banten Selatan memiliki angka rasio yang relatif rendah yakni berada di bawah rata-rata rasio Provinsi, masing masing sebesar 0,39 dan 0,38.

Rendahnya ketersediaan jaringan jalan di wilayah Banten Selatan mengakibatkan menjadi terbatasnya aksesibilitas pada beberapa kawasan di wilayah tersebut. Lebih jauh lagi kondisi ini mengakibatkan menjadi terhambatnya mobilitas

penduduk serta kegiatan koleksi dan distribusi barang terutama hasil-hasil pertanian yang merupakan produk utama masyarakat setempat. Dari aspek kewilayahan, kondisi ini pada akhirnya mengakibatkan terjadinya kesenjangan antar wilayah. Wilayah-wilayah yang aksesibilitasnya rendah cenderung menjadi terisolasi serta relatif lamban untuk berkembang, sebaliknya wilayah yang memiliki aksesibilitas tinggi cenderung lebih cepat pertumbuhannya¹¹.

Sementara untuk tingkat Provinsi sendiri resiko kemiskinan rumah tangga jika tinggal di perdesaan adalah 7,383 kali lebih besar dibandingkan resiko kemiskinan rumah tangga di perkotaan. Ini berarti perbedaan resiko kemiskinan rumah tangga antara daerah perkotaan dan perdesaan sangat tinggi.

Profil kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS pada bulan maret tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk miskin indonesia sebanyak 31,02 juta orang dimana 64,23% nya berada di perdesaan. Di provinsi Banten jumlah penduduk miskin di perkotaan sebanyak 335.537 orang (4,61 persen) dan di perdesaan sebanyak 354.963 orang (9,75 persen). Perbedaan ini pula yang seharusnya membuat perlakuan penanganan penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan tidak boleh disamakan.

B. Pengaruh Perbedaan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga

Pada setiap daerah, variabel jenis kelamin memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap kemiskinan. Resiko kemiskinan rumah tangga akan meningkat jika kepala rumah tangganya perempuan terdapat di Kabupaten Pandeglang, Lebak dan Kota Cilegon. Sementara di Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Tangerang dan di tingkat Provinsi, resiko kemiskinan rumah tangga justru menurun jika kepala rumah tangganya perempuan. Di Kota Tangerang Selatan pengaruh variabel jenis kelamin tidak signifikan, artinya tidak ada perbedaan antara kepala rumah tangga yang berjenis kelamin laki-laki, maupun kepala rumah tangga perempuan, terhadap resiko kemiskinan rumah tangga. Tabel 4.6 memperlihatkan nilai koefisien (arah) dan nilai *odds ratio* untuk variabel jenis kelamin.

¹¹ http://www.bantenprov.go.id/get_page.php?link=dtl&id=705, diakses tanggal 19 November 2011

Tabel 4.6 Nilai *Odds Ratio* Untuk Variabel Jenis Kelamin

Wilayah	Variabel Jenis Kelamin (Wanita =1, Pria = 0)	
	Nilai <i>Odds Ratio</i>	Nilai Koefisien
Provinsi	0,891	-0,116
Kab. Pandeglang	1,621	0,483
Kab. Lebak	1,769	0,571
Kab. Tangerang	Tidak Signifikan	0.002
Kab. Serang	0,397	-0,925
Kota Tangerang	0,682	-0,382
Kota Cilegon	1,201	0,184
Kota Serang	0,849	-0,163
Kota Tangsel	Tidak Signifikan	-16.744

Dugaan awal sebuah rumah tangga dengan kepala rumah tangganya seorang wanita akan mempunyai resiko lebih besar untuk menjadi miskin dibandingkan kepala rumah tangga laki-laki ternyata terjadi di di Kabupaten Pandeglang, Lebak, dan Kota Cilegon. Perbedaan perlakuan ini bisa saja terjadi mengingat secara umum peranan wanita sebagai kepala rumahtangga dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga biasanya akan mengalami banyak kendala dibanding dengan peran laki-laki sebagai kepala rumahtangga, karena adanya ketidaksetaraan di dalam alokasi sumber daya baik akses terhadap sumber produktif, seperti tanah, modal, hak kepemilikan, kredit, serta pendidikan dan pelatihan. Resiko terbesar kemiskinan rumah tangga jika kepala rumah tangganya perempuan terdapat di Kabupaten Lebak, yaitu 1,769 kali dibandingkan jika kepala rumah tangganya seorang laki-laki. Hal ini dimungkinkan karena di Kabupaten Lebak, sektor yang terbanyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian (57,3%) yang relatif didominasi oleh pekerja laki-laki. Sementara tingkat pendidikan kepala rumah tangga perempuan di Kabupaten Lebak sebagian besar hanya setingkat pendidikan dasar (91,7%), pendidikan menengah 6,3% dan pendidikan tinggi hanya 2%. Begitupun dengan Kabupaten Pandeglang, kepala rumah tangga perempuan sebagian besar hanya berpendidikan dasar (91,8%),

pendidikan menengah 5,2% dan pendidikan tinggi hanya 3%. Padahal sektor yang terbanyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Pandeglang adalah sektor pertanian 54,5 persen, sementara di Kota Cilegon sektor industri mendominasi dengan 39,9%.

Namun demikian ternyata di Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Tangerang dan di Tingkat Provinsi, kepala rumah tangga wanita lebih unggul di bandingkan laki-laki. Hal ini mungkin saja terjadi karena peran wanita sudah diakui jauh lebih baik dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Banten, dan lapangan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh kaum wanita cukup tersedia, seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran serta bank dan lembaga keuangan lainnya. Di Kota Serang, lapangan pekerjaan yang tersedia untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 46% serta bank dan lembaga keuangan lainnya sebesar 20,2% lebih banyak di bandingkan sektor lainnya seperti pertanian yang hanya 0,68%. Sementara di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, tidak ada pengaruh jenis kelamin terhadap resiko kemiskinan rumah tangga, atau dengan kata lain pengaruh antara kepala rumah tangga laki-laki dan perempuan sama saja.

Pada tingkat nasional, peran ekonomi kaum perempuan sungguh tak dapat diremehkan. Ketika krisis ekonomi sangat memberatkan kehidupan rumah tangga, kaum perempuan mampu tampil sebagai penyelamat dan mengambil alih peran sebagai kepala keluarga. Lentur, tidak mudah rapuh, apalagi patah. Itulah keunggulan sifat kaum perempuan. Dalam keadaan krisis yang menghimpit, mereka memiliki visi dan kreativitas. Mereka mampu meretas jalan keluar untuk menyelamatkan kehidupan keluarganya. Di Indonesia, jumlah korporasi ekonomi didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pelaku usaha, terutama usaha kecil, mayoritas atau 60-80% adalah kaum perempuan¹².

C. Pengaruh Jumlah Anggota Rumah Tangga Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga

Pada semua daerah di Provinsi Banten, ternyata jumlah anggota rumah tangga (variabel JART) berpengaruh positif terhadap kemiskinan rumah tangga. Hal ini berarti bertambahnya jumlah anggota rumah tangga akan mengakibatkan resiko

¹² Norbertus Kaleka, Perempuan, Tiang Ekonomi Keluarga, tulisan di Suara Merdeka dimuat tanggal 20 Juli 2011

kemiskinan rumah tangga semakin besar. Hal ini juga sesuai dengan hipotesis awal bahwa jumlah anggota keluarga akan menambah beban pengeluaran rumah tangga. Menurut BPS jumlah penduduk Provinsi Banten tahun 2010 sebanyak 9.964.300 jiwa, dengan kepadatan penduduk 1.105 jiwa per kilometer termasuk dalam provinsi lima terpadat se Indonesia selain DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah¹³. Sedangkan rata-rata jumlah anggota rumah tangga di Provinsi Banten tahun 2010 adalah 4,11 jiwa. Pertambahan jumlah penduduk ini harus dikendalikan karena ternyata pertambahan penduduk (pertambahan jumlah anggota rumah tangga) menjadi salah satu faktor yang menentukan kemiskinan. Tabel 4.7 memperlihatkan nilai koefisien (arah) dan nilai *odds ratio* untuk variabel jumlah anggota keluarga (JART). Semua arah koefisien memperlihatkan nilai yang positif yang artinya penambahan jumlah anggota rumah tangga akan membuat resiko kemiskinan rumah tangga semakin besar.

Tabel 4.7 Nilai *Odds Ratio* Untuk Variabel JART

Wilayah	Variabel Jumlah Anggota RT (JART)	
	Nilai <i>Odds Ratio</i>	Nilai Koefisien
Provinsi	1,486	0,398
Kab. Pandeglang	1,550	0,438
Kab. Lebak	1,950	0,668
Kab. Tangerang	1,635	0,491
Kab. Serang	2,026	0,706
Kota Tangerang	1,592	0,465
Kota Cilegon	1,737	0,552
Kota Serang	1,701	0,531
Kota Tangsel	1,940	0,663

Secara umum variabel jumlah anggota rumah tangga akan meningkatkan resiko kemiskinan rumah tangga di seluruh kabupaten/kota. Di Kabupaten Serang,

¹³ Booklet Badan Pusat Statistik, Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia, Agustus 2010

setiap penambahan 1 anggota keluarga akan meningkatkan resiko kemiskinan rumah tangga sebesar 2,026 kali dibandingkan dengan rumah tangga yang anggota keluarganya tidak bertambah. Angka ini merupakan resiko terbesar diantara wilayah lainnya di Provinsi Banten. Pada tahun 2009, presentase perempuan yang melangsungkan perkawinan pertamanya pada umur kurang dari 16 tahun di Kabupaten Serang sebanyak 32,81 persen¹⁴. Program anjuran pemerintah menyebutkan bahwa usia perkawinan pertama seorang perempuan minimal 20 tahun. Wanita yang menikah pada usia muda akan menambah panjang masa fertilitas dari seorang ibu yang berimplikasi pada tingginya laju pertumbuhan penduduk di suatu daerah. Sementara itu, PDRB Kabupaten Serang juga merupakan yang ketiga terendah di Provinsi Banten dengan Rp. 8,54 juta perkapita/tahun, setelah Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Di Kabupaten Lebak, setiap penambahan 1 anggota keluarga akan meningkatkan resiko kemiskinan rumah tangga sebesar 1.950 kali dibandingkan dengan rumah tangga yang anggota keluarganya tidak bertambah, merupakan resiko terbesar kedua setelah Kabupaten Serang. Kabupaten Lebak juga merupakan Kabupaten dengan PDRB perkapita paling rendah diantara wilayah lain di Provinsi Banten yaitu hanya sebesar Rp 5,78 juta perkapita/tahun, bandingkan dengan Kota Cilegon yang mencapai Rp 57,23 juta perkapita/tahun. Ini menjelaskan bahwa ketika ada penambahan satu anggota keluarga, ada beban pengeluaran yang harus ditambah, sementara tambahan pendapatan sulit didapatkan. Serupa dengan di Kabupaten Serang, di Kabupaten Lebak presentase perempuan yang menikah pertama kali kurang dari 16 tahun sebanyak 34.12%, sehingga kemungkinan seorang perempuan mempunyai anak yang banyak semakin tinggi di Kabupaten ini.

Di Kota Tangerang Selatan setiap penambahan 1 orang anggota rumah tangga akan mengakibatkan resiko kemiskinan rumah tangga meningkat sebesar 1,940 kali dibanding yang jumlah anggota keluarganya tidak bertambah, ini merupakan resiko terbesar ketiga diantara kabupaten/kota lainnya di wilayah Provinsi Banten. Kota Tangerang Selatan merupakan kota yang paling padat penduduknya setelah Kota Tangerang, yaitu sebanyak 7.534 jiwa/km².

Pertambahan penduduk yang cepat akan berkontribusi pada penurunan kapasitas negara membangun kestabilan ekonomi dan sosial (termasuk perbaikan

¹⁴ Buku IPM dan Inkesra Kabupaten Serang Tahun 2009, hal IV-45

kualitas manusia) dan memperlambat upaya restorasi alam lingkungan tempat manusia bermukim. Juga mempercepat kondisi dimana bumi tak mampu lagi mendukung keberlangsungan hidup anak cucu cicit manusia¹⁵.

D. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga

Variabel pendidikan kepala rumah tangga yang pada penelitian ini dibagi ke dalam 3 katagori yaitu pendidikan dasar (kepala rumah tangga berpendidikan SMP ke bawah), pendidikan menengah (kepala rumah tangga yang berpendidikan SMA), pendidikan tinggi (kepala rumah tangga yang berpendidikan SMA ke atas). Katagori pendidikan dasar dan menengah sebagai variabel *dummy*, sedangkan katagori pendidikan tinggi berfungsi sebagai katagori referensi. Hasil regresi logit pada variabel pendidikan memperlihatkan bahwa pendidikan mempunyai pengaruh yang nyata dalam menentukan kemiskinan rumah tangga. Tabel 4.8 memperlihatkan nilai *odds ratio* berikut arahnya untuk variabel pendidikan kepala rumah tangga.

Tabel 4.8 Nilai Odds Ratio Untuk Variabel Pendidikan Kepala RT

Wilayah	Variabel Pendidikan Kepala Rumah Tangga	
	Pendidikan Dasar	Pendidikan Menengah
Provinsi	-0,974	-0,314
Kab. Pandeglang	1,579	-0,230
Kab. Lebak	-0,450	-0,049
Kab. Tangerang	-0,961	-0,122
Kab. Serang	-0,584	-0,315
Kota Tangerang	1,526	-0,827
Kota Cilegon	1,863	1,029
Kota Serang	3,021	Tidak Signifikan
Kota Tangsel	Tidak Signifikan	Tidak Signifikan

Di Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang, Kota Cilegon dan Kota Serang, kepala keluarga yang tingkat pendidikannya hanya pendidikan dasar, resiko

¹⁵ Meita Budiharsana Mencintai Anak-Cucu, dimuat di kolom opini harian Kompas, 2 november 2011

kemiskinan rumah tangganya meningkat dibandingkan dengan rumah tangga yang kepala rumah tangganya berpendidikan tinggi. Resiko tertinggi pertama ada di Kota Serang dengan nilai resiko kemiskinan sebesar 3,021 kali, dan tertinggi kedua ada di Kota Cilegon dengan nilai resiko kemiskinan 1,863 kali. Artinya di kedua kota ini lebih dibutuhkan kepala rumah tangga yang lebih tinggi pendidikannya dari pendidikan dasar. Kota Serang merupakan ibukota Provinsi Banten yang sedang berkembang dan menuntut tenaga kerja dengan pendidikan yang tinggi untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan di sektor utama yang menguasai perekonomian di kota serang yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran (34,78%) serta sektor jasa-jasa lainnya (21,89%). Sementara Kota Cilegon adalah kota Industri yang juga membutuhkan tenaga kerja dengan pendidikan yang tinggi.

Akan tetapi di Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang, pendidikan dasar kepala rumah tangga menurunkan resiko kemiskinan rumah tangga, jika dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang berpendidikan tinggi. Hal ini dimungkinkan karena di ketiga daerah terakhir itu, jenis pekerjaan yang tersedia tidak membutuhkan keahlian dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Ketiga Kabupaten inipula yang merupakan kabupaten dengan PDRB terendah dari semua wilayah di Provinsi Banten. Lapangan pekerjaan di sektor pertanian umumnya lebih mendominasi.

Sementara untuk kepala rumah tangga yang berpendidikan menengah, ternyata di hampir semua wilayah (kecuali Kota Cilegon), tingkat pendidikan menengah mampu untuk menurunkan resiko kemiskinan rumah tangga dibandingkan kepala rumah tangga yang berpendidikan tinggi. Di Kota Tangerang, kepala rumah tangga yang berpendidikan menengah resiko kemiskinannya menurun sebesar 0,827 kali dibanding kepala rumah tangga yang berpendidikan tinggi, paling besar diantara wilayah lainnya. Dari data pencari kerja di Kota Tangerang tahun 2009 memang terlihat bahwa presentase sarjana yang mencari pekerjaan lebih banyak yaitu 44,3% dibandingkan lulusan SMA 42,3%. Selengkapnya bisa dilihat pada tabel 4.9 berikut ini :

Tabel 4.9 Data Pencari Kerja di Kota Tangerang Tahun 2009

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total	
				Jumlah	%
1	SD	6	9	15	0.3%
2	SLTP	62	64	126	2.1%
3	SMA	1450	1067	2517	42.5%
4	D1 & D3	256	384	640	10.8%
5	SARJANA	1134	1489	2623	44.3%
	Total	2908	3013	5921	100.0%

Sumber : BPS Kota Tangerang, 2009

Dari uraian di atas terlihat bahwa tingkat pendidikan kepala rumah tangga berpengaruh terhadap resiko kemiskinan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan teori yang telah dikemukakan di awal bahwa kemiskinan ditentukan oleh banyak faktor dan salah satunya adalah pendidikan. Meskipun demikian ternyata di Kota Tangerang Selatan, tingkat pendidikan ternyata tidak berpengaruh terhadap resiko kemiskinan rumah tangga, hal ini bisa saja terjadi mengingat angka kemiskinan di Kota Tangerang Selatan merupakan yang paling rendah (1,67%) diantara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten. Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2008 di Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan SLTA berjumlah paling besar yaitu 29,22%. Penduduk dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi (sarjana muda dan sarjana) juga cukup tinggi, yaitu 29,05%, serta tidak tercatat penduduk yang tidak lulus SD atau penduduk buta huruf¹⁶. Kota Tangerang Selatan juga tercatat sebagai kota dengan rata-rata lama sekolah 9,95 tahun, paling tinggi diantara Kabupaten/Kota lainnya di wilayah Provinsi Banten, seperti terlihat pada tabel Indeks Pembangunan Manusia dan komponennya berikut ini :

¹⁶ Website Resmi Pemerintah kota Tangerang Selatan,
http://www.tangerangselatankota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=59, diakses tanggal 10 November 2011

Tabel 4.10 Indeks Pembangunan Manusia dan komponennya di Provinsi Banten tahun 2009

No	Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup	Angka Melek Huruf	Rata-rata lama sekolah	IPM
1	Kabupaten Pandeglang	63,52	96,30	6,44	67,99
2	Kabupaten Lebak	63,21	94,55	6,22	67,45
3	Kabupaten Tangerang	65,61	95,66	8,93	71,45
4	Kabupaten Serang	63,08	94,93	7,04	68,27
5	Kota Tangerang	68,33	98,35	9,95	74,89
6	Kota Cilegon	68,53	98,71	9,66	74,99
7	Kota Serang	64,62	96,27	7,25	69,99
8	Kota Tangerang Selatan	68,43	98,14	9,95	75,01
9	Provinsi Banten	64,75	95,95	8,15	70,06

Sumber : BPS Kota Cilegon, 2010

E. Pengaruh Pekerjaan Kepala Rumah Tangga Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga

Variabel pekerjaan kepala rumah tangga pada penelitian ini dibagi ke dalam 4 katagori yaitu kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian, kepala rumah tangga yang bekerja di sektor industri, kepala rumah tangga yang bekerja di sektor perdagangan dan kepala rumah tangga yang bekerja di sektor jasa/pelayanan. Sektor jasa/pelayanan menjadi katagori referensi. Tabel 4.11 memperlihatkan nilai *odds ratio* berikut arahnya untuk variabel pekerjaan kepala rumah tangga.

Tabel 4.11 Nilai Odds Ratio Untuk Variabel Pekerjaan Kepala RT

Wilayah	Nilai Odds Ratio Pekerjaan Kepala RT		
	Pertanian	Perdagangan	Industri
Provinsi	1,810	-0,949	-0,782
Kab. Pandeglang	Tidak Signifikan	-0,600	-0,479
Kab. Lebak	1,083	-0,306	-0,050
Kab. Tangerang	-0,941	-0,504	-0,379
Kab. Serang	-0,733	-0,274	-0,533
Kota Tangerang	-0,837	-0,546	-0,518
Kota Cilegon	5,459	2,939	3,751
Kota Serang	-0,546	-0,778	-0,436
Kota Tangsel	Tidak Signifikan	2.506	3.135

Pekerjaan kepala rumah tangga di sektor pertanian meningkatkan resiko kemiskinan rumah tangga, hal ini terjadi di Kabupaten Lebak dan Kota Cilegon serta di tingkat Provinsi. Di Kota Cilegon kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian resiko kemiskinannya meningkat yaitu 5,459 kali dibanding kepala rumah tangga yang bekerja di sektor jasa/pelayanan lainnya, juga merupakan yang terbesar risikonya dibanding wilayah lainnya. Hal ini bisa difahami karena Kota Cilegon merupakan daerah industri dimana sektor pertanian tidak menjadi sektor basis. Sumbangan sektor pertanian hanya sebesar 2,3% terhadap PDRB. Bandingkan dengan sektor Jasa, Hotel dan Restoran yang menyumbang 18,12% terhadap PDRB Kota Cilegon. Sementara di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang dan Kota Tangerang, resiko kemiskinan kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian menurun, dibandingkan kepala rumah tangga yang bekerja di sektor jasa/pelayanan lainnya.

Kepala rumah tangga yang bekerja di sektor perdagangan di hampir semua wilayah menurunkan resiko kemiskinan rumah tangga, kecuali di Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan, begitu pula dengan sektor Industri, dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang bekerja di sektor jasa/pelayanan. Kepala rumah tangga yang bekerja di sektor Industri di Kota Cilegon mempunyai resiko kemiskinan rumah tangga sebesar 3,751 kali dibandingkan kepala rumah tangga yang bekerja di sektor jasa/pelayanan. Padahal sektor industri di Kota Cilegon merupakan penyumbang terbesar PDRB yaitu sekitar 56,12%. Hal ini bisa saja terjadi karena di Kota Cilegon banyak pabrik-pabrik yang padat modal namun tidak terlalu banyak memerlukan tenaga kerja. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cilegon menunjukkan bahwa angka pengangguran di Kota Cilegon terus bertambah tinggi, bahkan tertinggi diantara kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Banten. Pada 2008 angka pengangguran di Kota Cilegon mencapai 18,6 persen. Tahun berikutnya naik menjadi 18,9 persen, dan terus meningkat pada 2010 menjadi 19,8 persen¹⁷.

Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa sektor pertanian masih menyumbang porsi terbesar terhadap resiko kemiskinan rumah tangga. Di Kota Cilegon kepala rumah tangga yang bekerja sektor pertanian bahkan merupakan resiko terbesar

¹⁷ <http://www.radarbanten.com/newversion/metropolis/cilegon/2745-pengangguran-bertambah-.html>, diakses tanggal 19 November 2011

pertama yang menentukan kemiskinan rumah tangga, sementara di Kabupaten Lebak, kepala rumah tangga yang bekerja sektor pertanian merupakan resiko terbesar kedua yang menentukan kemiskinan rumah tangga. Perekonomian Provinsi Banten memang telah mengalami pergeseran, yaitu dari dominasi pertanian menjadi industri dan perdagangan. Serapan tenaga kerja di sektor perdagangan dan sektor industri kini mendominasi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten. Kedua sektor tersebut menyerap tenaga kerja masing-masing sebesar 26,18 persen dan 22,77 persen. Sementara itu, Sektor Pertanian berada pada posisi ketiga dalam penyerapan tenaga kerja yaitu dengan serapan sebesar 20,12 persen dari keseluruhan tenaga kerja, dan terlihat mendominasi dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang.

Meskipun pertanian masih merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja cukup tinggi, namun perhatian terhadap sektor ini masih minim. Selama tahun 2009, dari 1,7 trilyun investasi asing (PMA) dan 412 milyar investasi dalam negeri (PMDN) tidak satu rupiahpun yang di aLetakkan untuk sektor pertanian. Investasi PMA dan PMDN lebih banyak diaLetakkan untuk sektor industri pengolahan, hotel & restoran serta sektor telekomunikasi.

Sementara di Provinsi Banten lahan pertanian yang dikuasai oleh petani seluas 370.279 Ha atau hanya 14,11% dari total luas lahan pertanian di provinsi Banten. Beralih fungsinya lahan pertanian menjadi pabrik ataupun bangunan lain menjadikan petani semakin terdesak dan beralih dari petani pemilik lahan menjadi petani penggarap.

F. Pengaruh Program Bantuan Kredit Usaha Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga

Program bantuan kredit usaha, baik program PNPM, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Koperasi dan lain-lain terbukti cukup mampu untuk menurunkan resiko kemiskinan rumah tangga. Keberhasilan paling tinggi terlihat di Kabupaten Tangerang, bantuan kredit usaha ternyata mampu menurunkan resiko kemiskinan rumah tangga sebesar 0,905 kali di dibandingkan rumah tangga yang tidak mendapatkan bantuan kredit usaha. Keberhasilan tertinggi kedua terjadi di Kota Tangerang dengan nilai resiko 0,841 kali lebih kecil dibandingkan dengan rumah

tangga yang tidak mendapat bantuan kredit usaha. Tabel 4.12 memperlihatkan nilai koefisien (arah) dan nilai *odds ratio* untuk variabel bantuan kredit.

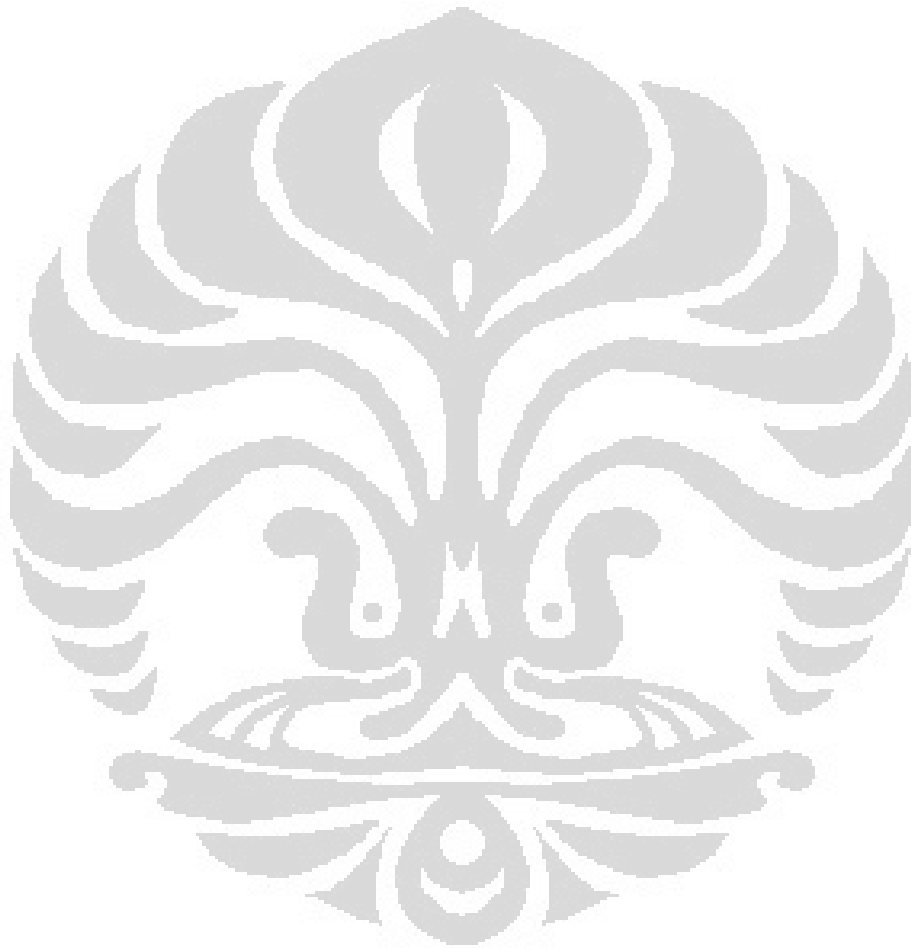
Tabel 4.12 Nilai *Odds Ratio* Untuk Variabel Bantuan Kredit

Wilayah	Variabel Bantuan Kredit (dapat bantuan = 1, tidak dapat bantuan = 0)	
	Nilai <i>Odds Ratio</i>	Nilai Koefisien
Provinsi	0,623	-0,473
Kab. Pandeglang	0,831	-0,185
Kab. Lebak	Tidak Signifikan	-18.560
Kab. Tangerang	0,905	-0,100
Kab. Serang	Tidak Signifikan	-17.906
Kota Tangerang	0,841	-0,173
Kota Cilegon	Tidak Signifikan	-17.257
Kota Serang	1,364	0,331
Kota Tangsel	Tidak Signifikan	-17.070

Namun di Kabupaten Lebak, Serang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan, pengaruh pemberian bantuan kredit sama sekali tidak ada. Tidak ada perbedaan antara yang mendapat bantuan dan tidak mendapat bantuan di ke-empat daerah tersebut dalam resiko menurunkan atau menaikkan resiko kemiskinan rumah tangga. Hal ini bisa terjadi karena beberapa kasus bantuan kredit malah dialokasikan kepada hal-hal yang konsumtif, bukan digunakan untuk kegiatan yang produktif yang bisa menambang penghasilan sebuah rumah tangga, sehingga rumah tangga yang tadinya miskin bisa berubah menjadi lebih sejahtera dan keluar dari garis kemiskinan. Atau bisa juga karena jumlah kreditnya terlalu kecil untuk dijadikan modal usaha.

Di Kabupaten Serang, rumah tangga yang mendapat bantuan kredit, malah meningkatkan resiko kemiskinan rumah tangga sebesar 0,331 dibanding dengan rumah tangga yang tidak mendapat bantuan kredit. Ini dimungkinkan karena bisa

saja bantuan kredit tersebut dirasa memberatkan cicilan berikut bunganya, atau karena usaha yang dimodali dengan kredit tersebut tidak berhasil sebagaimana yang direncanakan. Banyak hal yang menjadi sebab ketidakberhasilan tersebut dan membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengetahuinya.

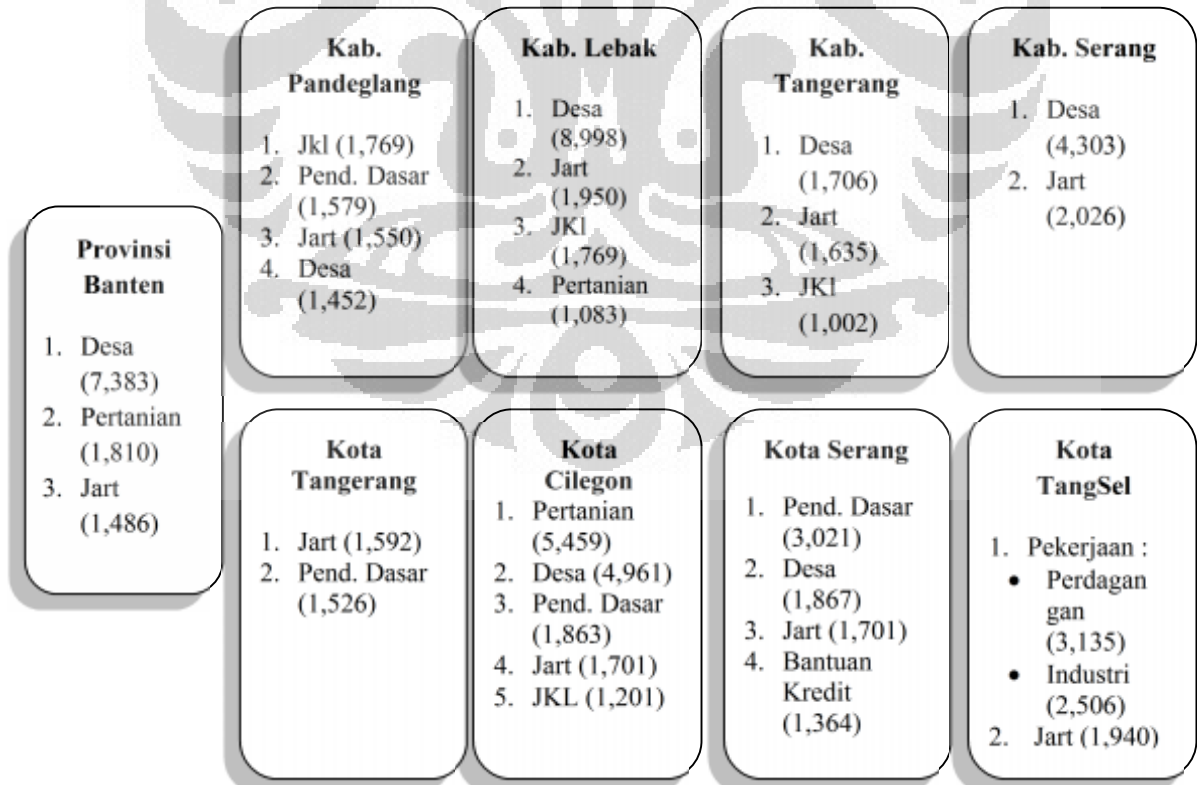


BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

5.1 Kesimpulan

Pertama, penerapan model logit untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi resiko kemiskinan di Provinsi Banten, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan menggunakan variabel klasifikasi desa/kelurahan, jenis kelamin kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, tingkat pendidikan kepala rumah tangga, pekerjaan kepala rumah tangga, dan bantuan kredit usaha dapat digunakan. Model secara keseluruhan memiliki signifikansi pada derajat $\alpha = 5\%$.

Kedua, faktor-faktor mempengaruhi resiko kemiskinan rumah tangga ternyata berbeda-beda di setiap wilayah yang ada di Provinsi Banten, yaitu seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 5.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Resiko Kemiskinan Rumah Tangga di Provinsi Banten

Pada tingkat Provinsi, faktor utama yang menyebabkan tingginya resiko kemiskinan rumah tangga adalah fasilitas/fitur-fitur yang ada di perdesaan atau perkotaan (klasifikasi desa/kelurahan), rumah tangga yang berada di perdesaan resiko menjadi miskinnya 7,383 kali dibandingkan rumah tangga yang berada di perkotaan. Sementara kepala rumah tangga yang mempunyai pekerjaan di sektor pertanian mempunyai resiko kemiskinan sebesar 1,810 dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang bekerja di sektor jasa/pelayanan lainnya. Selain itu penambahan jumlah anggota rumah tangga juga menjadi faktor yang turut menentukan besarnya resiko kemiskinan rumah tangga yaitu sebesar 1,486 kali dibandingkan dengan rumah tangga yang anggotanya tidak bertambah.

Di Kabupaten Pandeglang, faktor utama yang menyebabkan tingginya resiko kemiskinan rumah tangga adalah jika kepala rumah tangganya seorang perempuan. Kepala rumah tangga perempuan beresiko untuk menjadi miskin 1,621 kali dibandingkan kepala rumah tangga laki-laki. Tingkat pendidikan kepala rumah tangga, yaitu apabila kepala rumah tangganya hanya berpendidikan dasar, merupakan resiko terbesar kedua yang menentukan kemiskinan rumah tangga dengan resiko sebesar 1,579 kali dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang berpendidikan tinggi. Sama dengan tingkat Provinsi, di Kabupaten Pandeglang penambahan jumlah anggota rumah tangga merupakan faktor yang turut mempengaruhi besarnya resiko kemiskinan rumah tangga yaitu sebesar 1,550 kali dibandingkan dengan rumah tangga yang anggotanya tidak bertambah.

Di Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang, fasilitas atau potensi yang berada di perkotaan/perdesaan merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap resiko kemiskinan rumah tangga. Di Kabupaten Lebak, jika tinggal di desa, resiko menjadi miskin meningkat sebanyak 8,998 kali lipat dibandingkan jika tinggal di kota. Angka ini merupakan resiko yang terbesar dibandingkan dengan seluruh wilayah lain di Provinsi Banten. Sementara di Kabupaten Tangerang resiko kemiskinan rumah tangga jika berada di perdesaan sebesar 1,706 kali dan Kabupaten Serang sebesar 4.303 kali dibandingkan rumah

tangga yang berada di perkotaan. Faktor lain yang menyebabkan resiko kemiskinan rumah tangga adalah penambahan jumlah anggota rumah tangga, dengan angka resiko masing-masing sebesar 1,950 untuk Kabupaten Lebak, 2,026 untuk Kabupaten Serang dan 1,635 untuk Kabupaten Tangerang.

Di Kota Tangerang, bertambahnya jumlah anggota rumah tangga merupakan faktor yang menyebabkan tingginya resiko kemiskinan rumah tangga yaitu sebesar 1,592 kali dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak bertambah anggotanya, sementara jika kepala rumah tangganya hanya mempunyai pendidikan setingkat pendidikan dasar, resiko kemiskinannya meningkat sebanyak 1,592 kali dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang berpendidikan tinggi.

Di Kota Cilegon, kepala rumah tangga yang mempunyai pekerjaan di sektor pertanian adalah yang paling besar resiko kemiskinannya diantara variabel yang lainnya, yaitu sebesar 5,459 kali. Sementara fasilitas atau potensi yang berada di perkotaan/perdesaan juga merupakan faktor lainnya yang turut menyebabkan meningkatnya resiko kemiskinan rumah tangga yaitu sebesar 4,961 kali jika rumah tangga berada di perdesaan dibandingkan jika berada di perkotaan.

Di Kota Serang, kepala rumah tangga yang mempunyai pendidikan setingkat pendidikan dasar adalah yang paling besar risikonya untuk menjadi miskin angka resiko sebesar 3,021 kali dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang berpendidikan tinggi, sementara resiko daerah perdesaan meningkatkan resiko kemiskinan rumah tangga sebesar 1,867 kali di bandingkan daerah perkotaan.

Di Kota Tangerang Selatan, kepala rumah tangga yang mempunyai pekerjaan di sektor perdagangan adalah yang paling beresiko untuk menjadi miskin dengan angka resiko sebesar 2,506 kali dibandingkan kepala rumah tangga yang bekerja di sektor jasa/pelayanan lainnya. Resiko terbesar kedua adalah kepala rumah tangga yang bekerja di sektor industri dengan angka resiko sebesar 2.506 kali dibandingkan kepala rumah tangga yang bekerja di sektor jasa/pelayanan lainnya.

Ketiga, musuh utama kemiskinan rumah tangga di Provinsi Banten adalah perbedaan fasilitas atau potensi antar daerah perkotaan/perdesaan dan penambahan jumlah anggota rumah tangga. Di semua wilayah kedua variabel ini merupakan variabel yang berpengaruh positif dalam meningkatkan resiko kemiskinan rumah tangga. Meskipun demikian, di dua wilayah yakni Kota Tangerang dan Kota

Tangerang Selatan sudah tidak wilayah yang diklasifikasikan sebagai perdesaan, artinya di kedua wilayah ini semuanya sudah memiliki beragam fasilitas yang lebih maju dibandingkan wilayah lainnya.

5.2 Rekomendasi Kebijakan

Pertama, fasilitas atau potensi yang berada di perkotaan/perdesaan merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap resiko kemiskinan rumah tangga di semua kabupaten/kota di Provinsi Banten. Kemiskinan lebih banyak terjadi di perdesaan dibanding dengan perkotaan. Oleh karenanya perlu perhatian yang lebih besar dari Pemerintah Provinsi Banten untuk membangun wilayah perdesaan yang umumnya berada di wilayah Banten Selatan seperti Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Perbaikan infrastruktur di desa seperti irigasi dan perbaikan serta penambahan jaringan jalan akan membuat mobilitas penduduk lebih lancar yang akhirnya akan membantu mendongkrak perekonomian di wilayah perdesaan.

Kedua, pengendalian jumlah penduduk melalui program keluarga berencana perlu untuk digalakkan kembali. Dari hasil penelitian ini, variabel jumlah anggota keluarga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap resiko kemiskinan rumah tangga di semua wilayah di Provinsi Banten. Penyediaan alat kontrasepsi secara gratis di puskesmas, pondok bersalin desa atau posyandu, serta memperbanyak jumlah penyuluh keluarga berencana seyogyanya bisa dijadikan cara untuk meredam pertumbuhan jumlah penduduk.

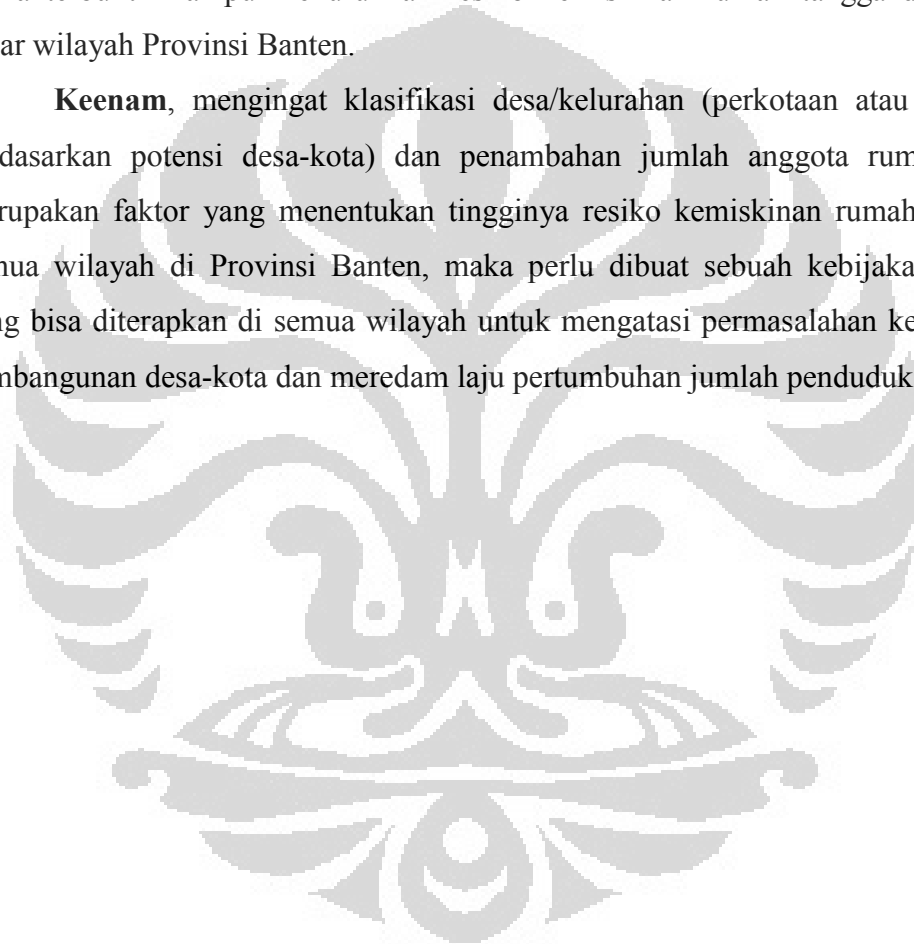
Ketiga, pendidikan menjadi faktor penting yang turut mempengaruhi resiko kemiskinan rumah tangga. Kepala rumah tangga yang pendidikan tertingginya setingkat pendidikan dasar di beberapa kabupaten/kota masih beresiko untuk menjadi miskin. Pendidikan dasar 9 tahun harus tetap menjadi prioritas pembangunan dalam penanggulangan kemiskinan, disertai dengan pelatihan keterampilan dan penyediaan lapangan kerja, agar tenaga kerja yang terdedia bisa diserap oleh pasar.

Keempat, sektor pertanian turut berpengaruh terhadap resiko kemiskinan rumah tangga di Provinsi Banten. Oleh karenanya diperlukan kebijakan-kebijakan di bidang pertanian yang lebih memihak kepada petani. Penyediaan benih dan pupuk dengan harga yang terjangkau, serta menjaga harga hasil produksi pertanian jika terjadi panen raya merupakan kebijakan yang diambil pemerintah. Tidak kalah

pentingnya adalah menjaga agar lahan pertanian tidak beralih fungsi, yang mengakibatkan lahan pertanian semakin menyusut. Perlu juga difikirkan bagaimana caranya agar sektor pertanian bisa menjadi sektor yang menarik untuk investasi baik PMA maupun PMDN.

Kelima, pemberian kredit usaha untuk penguatan usaha kecil menengah, terutama usaha yang dijalankan oleh rumah tangga miskin perlu lebih ditingkatkan lagi, disertai dengan pengawasan yang lebih ketat. Karena pemberian bantuan kredit usaha terbukti mampu menurunkan resiko kemiskinan rumah tangga di sebagian besar wilayah Provinsi Banten.

Keenam, mengingat klasifikasi desa/kelurahan (perkotaan atau perdesaan berdasarkan potensi desa-kota) dan penambahan jumlah anggota rumah tangga merupakan faktor yang menentukan tingginya resiko kemiskinan rumah tangga di semua wilayah di Provinsi Banten, maka perlu dibuat sebuah kebijakan bersama yang bisa diterapkan di semua wilayah untuk mengatasi permasalahan ketimpangan pembangunan desa-kota dan meredam laju pertumbuhan jumlah penduduk.



DAFTAR PUSTAKA

- Akatiga (2003) *Perempuan, Kemiskinan dan Pengambilan Keputusan*. Jurnal Analisis Sosial, Vol 8, 2 Oktober. www.akatiga.or.id
- Badan Pusat Statistik (2010, 1 Juli). *Berita Resmi Statistik Provinsi Banten*, No. 27/07/36/Th.IV. Jakarta : BPS
- Badan Pusat Statistik, (2010). *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2010*. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik, Booklet (2010, Agustus) *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia*. Jakarta : BPS
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten dan Bappeda Provinsi Banten, (2010). *Banten Dalam Angka 2010*. Banten : BPS.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang, (2010). *Pandeglang Dalam Angka 2010*. Pandeglang : BPS
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak, (2010). *Lebak Dalam Angka 2010*. Katalog BPS : 1403.3602. Lebak : BPS
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, (2010). *Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2010*. Tangerang : BPS
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang, (2010). *IPM dan Inkesra Kabupaten Serang Tahun 2009*. Hal IV-45 Serang : Bappeda
- Badan Pusat Statistik dan Bappeda Kabupaten Serang, (2010). *Kabupaten Serang Dalam Angka 2010*. Serang : BPS
- Badan Pusat Statistik Kota Cilegon, (2010). *Statistik Daerah Kota Cilegon 2010*. Katalog BPS : 1101002.3672. Cilegon : BPS
- Badan Pusat Statistik dan Bappeda Kota Cilegon, (2010). *Cilegon Dalam Angka 2010*. Katalog BPS : 1102001.3672. Cilegon : BPS
- Badan Pusat Statistik Kota Tangerang, (2010). *Kota Tangerang Dalam Angka 2010*. Katalog BPS : 1101001.3671. Tangerang : BPS
- Badan Pusat Statistik Kota Serang, (2010). *Kota Serang Dalam Angka 2010*. Serang : BPS
- Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan, (2010). *Kota Tangerang Selatan Dalam Angka 2010*. Katalog BPS : 1102002.3674. Tangerang Selatan : BPS

- Baswir, Revrisond (1997). *Agenda Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiharsana, Meita (2011, 2 Nopember) *Mencintai Anak-Cucu*, Kolom Opini Kompas, hal 4.
- Bradshaw, Ted K. (2005). *Theories of Poverty and Anti-Poverty Programs in Community Development*. Community Development: Journal of the Community Development Society, vol.38, No. 1
- BKPK dan SMERU. (2001). *Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan*. Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan RI bekerja sama dengan Lembaga Penelitian SMERU.
- Gujarati, Damodar N. (2003). *Basic Econometrics*. Fourth edition, International Edition. Singapore: McGraw-Hill Higher Education.
- Heredia, Carlos & Bosshard, Peter, dkk (1999). *Bank Dunia dan Lingkungan Berkelanjutan*. Copyrights: World Wildlife Fund (WWF), The Berne Declaration, Equipo Pueblo, Center For International Environment Law (CIEL). Jakarta : INFID
- Kartasasmita, Ginanjar 1997. *Kemiskinan*. Jakarta: Balai Pustaka
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. *Jurnal Keungan Publik : Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya daya serap pinjaman LN-IBRD, Teknik Pengolahan Data*. <http://www.bppk.depkeu.go.id/index.php/2008042169/jurnal-keuangan-publik/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-rendahnya-daya-serap-pinjaman-ln-ibrd/teknik-pengolahan-data.html>, diakses tanggal 11 Mei 2011
- Kaleka, Norbertus, (2011, 20 Juli). *Perempuan, Tiang Ekonomi Keluarga*. Suara Merdeka, hal 14.
- Kuner, M.H (2004). *Applied Linear Regression Models*, 4 Ed. The McGraw-Hill Companies, Inc. New York.
- Pemerintah Provinsi Banten. *Dalam Kurun Waktu 3 Tahun Penduduk Miskin Di Banten Berkurang*.
http://bantenprov.go.id/get_page.php?link=brt_dtl&id=7191, diakses tanggal 13 Oktober 2011
- Pemerintah Provinsi Banten. *Sarana dan Prasarana Daerah*.
http://www.bantenprov.go.id/get_page.php?link=dtl&id=705, diakses tanggal 19 November 2011

- Pemerintah Kota Tangerang Selatan, “*Sosial*”
http://www.tangerangselatankota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=59, diakses tanggal 10 November 2011
- Radar Banten, (2011). *Pengangguran Bertambah*, dalam Metropolis Cilegon,
<http://www.radarbanten.com/newversion/metropolis/cilegon/2745-pengangguran-bertambah.html>, diakses tanggal 19 November 2011
- Sach, Jeffrey (2005). *The End of Poverty How We Can Make It Happen in Our Lifetime*. United States: The Penguin Press
- Suharto, Edi (2009) *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, Bandung : Alfabeta.
- Sumodiningrat, Gunawan (1999). *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan*. Jakarta: IMPAC
- Sen, Amartya & Dreze, Jean (1999). *The Amartya Sen and Jean Dreze omnibus : comprising poverty and famines, hunger and public action, India: economic development and social opportunity*. New York: Oxford University Press
- Tambunan, Tulus T.H (2006). *Perekonomian Indonesia Sejak Orde Lama Hingga Pasca Krisis*. Jakarta : Pustaka Quantum.
- The World Bank, (2006). *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Ikhtisar. Jakarta : Gradasi Aksara
- Tim LPEM-FEUI, (1994). *Profil dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta
- Todaro, Michael. C. Smith, Stephen (2008) *Ekonomi Pembangunan Jilid I (Edisi 9)* Jakarta : Erlangga
- Usman, Abdhul Aziiz, (2006). *Identifikasi Karakteristik Rumah Tangga Miskin yang Mempengaruhi Rumah Tangga Miskin di Provinsi Sumatera Barat*. Tesis Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik. Depok: Universitas Indonesia.
- Zulfakar, (2006). *Tinjauan Terhadap Faktor-faktor Penentu Kemiskinan Rumah Tangga di Provinsi Banten*. Perpustakaan Pusat UI, Depok.

LAMPIRAN 1 : HASIL OUTPUT REGRESI LOGISTIK

A. Kemiskinan Rumah Tangga Propinsi

Case Processing Summary

Unweighted Cases ^a		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	6366	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	6366	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		6366	100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
dimens .00	0
ion0 1.00	1

Block 0: Beginning Block

Classification Table^{a,b}

Observed		Predicted		
		KRTP		Percentage Correct
		.00	1.00	
Step 0	KRTP .00	2449492	0	100.0
	1.00	205613	0	.0
Overall Percentage				92.3

a. Constant is included in the model.

b. The cut value is .500

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0 Constant	-2.478	.002	1164451.499	1	.000	.084

Variables not in the Equation

			Score	df	Sig.
Step 0	Variables	desa	228140.132	1	.000
		jenis kelamin	750.377	1	.000
		jart	129892.474	1	.000
		pend_dasar	47791.791	1	.000
		pend_menengah	55968.225	1	.000
		pertanian	102227.630	1	.000
		industri	16965.725	1	.000
		perdagangan	8991.535	1	.000
		bantuan_kredit	602.528	1	.000
Overall Statistics			376203.637	9	.000

Block 1: Method = Enter

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	362322.555	9	.000
	Block	362322.555	9	.000
	Model	362322.555	9	.000

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	1.085E6	.128	.304

a. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than .001.

Classification Table^a

Observed		Predicted		
		K RTP		Percentage Correct
		.00	1.00	
Step 1	K RTP	.00	1.00	
		2432365	17127	99.3
		188749	16865	8.2
	Overall Percentage			92.2

a. The cut value is .500

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	desa	1.999	.006	102729.321	1	.000	7.383
	jenis kelamin	-.116	.008	188.034	1	.000	.891
	jart	.396	.001	105499.900	1	.000	1.486
	pend_dasar	-.026	.007	13.673	1	.000	.974
	pend_menengah	-1.157	.013	8507.052	1	.000	.314
	pertanian	.593	.007	6731.394	1	.000	1.810
	industri	-.052	.009	34.141	1	.000	.949
	perdagangan	-.246	.010	576.349	1	.000	.782
	bantuan_kredit	-.473	.011	1826.643	1	.000	.623
	Constant	-5.404	.011	237702.437	1	.000	.004

a. Variable(s) entered on step 1: desa, jenis kelamin, jart, pend_dasar, pend_menengah, pertanian, industri, perdagangan, bantuan_kredit.

B. Kemiskinan Rumah Tangga Kab. Pandeglang

Case Processing Summary

Unweighted Cases ^a		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	752	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	752	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		752	100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
dimens .00	0
ion0 1.00	1

Block 0: Beginning Block

Classification Table^{a,b}

Observed			Predicted		Percentage Correct
			KRTPD		
			.00	1.00	
Step 0	KRTPD	.00	252142	0	100.0
		1.00	22326	0	.0
Overall Percentage					91.9

a. Constant is included in the model.

b. The cut value is .500

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0	Constant	-2.424	.007	120535.733	1	.000	.089

Variables not in the Equation

			Score	df	Sig.
Step 0	Variables	desa	123.914	1	.000
		jenis kelamin	19.342	1	.000
		jart	16140.023	1	.000
		pend_dasar	1969.945	1	.000
		pend_menengah	2368.985	1	.000
		pertanian	754.488	1	.000
		industri	247.013	1	.000
		perdagangan	218.123	1	.000
		bantuan_kredit	62.112	1	.000
Overall Statistics			21870.370	9	.000

Block 1: Method = Enter

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	19958.207	9	.000
	Block	19958.207	9	.000
	Model	19958.207	9	.000

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	134862.138 ^a	.070	.163

a. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than .001.

Classification Table^a

	Observed	Predicted		
		KRTPD		Percentage Correct
		.00	1.00	
Step 1	KRTPD	.00	1.00	
		252142	0	100.0
		21643	683	3.1
	Overall Percentage			92.1

a. The cut value is .500

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a						
desa	.373	.019	395.158	1	.000	1.452
jenis kelamin	.483	.023	457.524	1	.000	1.621
jart	.438	.004	15267.739	1	.000	1.550
pend_dasar	.457	.025	330.016	1	.000	1.579
pend_menengah	-1.471	.052	813.324	1	.000	.230
pertanian	.001	.021	.004	1	.949	1.001
industri	-.511	.031	272.675	1	.000	.600
perdagangan	-.736	.032	529.152	1	.000	.479
bantuan_kredit	-.185	.025	56.792	1	.000	.831
Constant	-4.983	.036	19229.383	1	.000	.007

a. Variable(s) entered on step 1: desa, jenis kelamin, jart, pend_dasar, pend_menengah, pertanian, industri, perdagangan, bantuan_kredit.

C. Kemiskinan Rumah Tangga Lebak

Case Processing Summary

Unweighted Cases ^a		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	764	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	764	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		764	100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
dimens .00	0
ion0 1.00	1

Block 0: Beginning Block

Classification Table^{a,b}

Observed		Predicted		
		KRTL		Percentage Correct
		.00	1.00	
Step 0	KRTL .00	274246	0	100.0
	1.00	21788	0	.0
Overall Percentage				92.6

a. Constant is included in the model.
b. The cut value is .500

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0 Constant	-2.533	.007	129470.820	1	.000	.079

Variables not in the Equation

			Score	df	Sig.
Step 0	Variables	desa	2306.013	1	.000
		jenis kelamin	242.895	1	.000
		jart	21169.908	1	.000
		pend_dasar	1.216	1	.270
		pend_menengah	1783.650	1	.000
		pertanian	4161.642	1	.000
		industri	1684.634	1	.000
		perdagangan	2459.094	1	.000
		bantuan_kredit	1147.991	1	.000
Overall Statistics			34065.514	9	.000

Block 1: Method = Enter

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	35326.406	9	.000
	Block	35326.406	9	.000
	Model	35326.406	9	.000

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	120299.676 ^a	.112	.275

a. Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been reached. Final solution cannot be found.

Classification Table^a

Observed		Predicted			
		KRTL		Percentage Correct	
		.00	1.00		
Step 1	KRTL	.00	271478	2768	99.0
		1.00	19481	2307	10.6
Overall Percentage					92.5

a. The cut value is .500

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a desa	2.197	.046	2245.708	1	.000	8.998
jenis kelamin	.571	.028	419.807	1	.000	1.769
jart	.668	.005	18733.249	1	.000	1.950
pend_dasar	-.800	.019	1686.864	1	.000	.450
pend_menengah	-3.016	.078	1512.705	1	.000	.049
pertanian	.080	.022	12.881	1	.000	1.083
industri	-1.183	.045	689.530	1	.000	.306
perdagangan	-2.996	.085	1248.792	1	.000	.050
bantuan_kredit	-18.560	315.775	.003	1	.953	.000
Constant	-6.718	.058	13345.988	1	.000	.001

a. Variable(s) entered on step 1: desa, jenis kelamin, jart, pend_dasar, pend_menengah, pertanian, industri, perdagangan, bantuan_kredit.

D. Kemiskinan Rumah Tangga Kab. Tangerang

Case Processing Summary

Unweighted Cases ^a		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	947	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	947	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		947	100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
dimens .00	0
ion0 1.00	1

Block 0: Beginning Block

Classification Table^{a,b}

Observed		Predicted		
		KRTT		Percentage Correct
		.00	1.00	
Step 0	KRTT	.00	1.00	
		672470	0	100.0
		30572	0	.0
Overall Percentage				95.7

a. Constant is included in the model.
b. The cut value is .500

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0 Constant	-3.091	.006	279368.274	1	.000	.045

Variables not in the Equation

Step 0	Variables	Score	df	Sig.
	desa	3828.000	1	.000
	jenis kelamin	405.751	1	.000
	jart	61226.623	1	.000
	pend_dasar	8222.172	1	.000
	pend_menengah	10980.161	1	.000
	pertanian	4781.453	1	.000
	industri	2504.600	1	.000
	perdagangan	1672.463	1	.000
	bantuan_kredit	90.976	1	.000
Overall Statistics		69932.225	9	.000

Block 1: Method = Enter

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	58977.467	9	.000
	Block	58977.467	9	.000
	Model	58977.467	9	.000

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	192523.023 ^a	.080	.268

a. Estimation terminated at iteration number 8 because parameter estimates changed by less than .001.

Classification Table^a

Observed		Predicted		
		KRTT		Percentage Correct
		.00	1.00	
Step 1	KRTT .00	668986	3485	99.5
	1.00	28762	1810	5.9
Overall Percentage				95.4

a. The cut value is .500

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	desa	.534	.014	1415.928	1	.000	1.706
	jenis kelamin	.002	.023	.006	1	.939	1.002
	jart	.491	.003	33496.690	1	.000	1.635
	pend_dasar	-.040	.017	5.700	1	.017	.961
	pend_menengah	-2.104	.037	3239.072	1	.000	.122
	pertanian	-.061	.016	14.533	1	.000	.941
	industri	-.686	.018	1443.052	1	.000	.504
	perdagangan	-.970	.024	1693.930	1	.000	.379
	bantuan_kredit	-.100	.024	17.930	1	.000	.905
	Constant	-5.151	.023	50135.563	1	.000	.006

a. Variable(s) entered on step 1: desa, jenis kelamin, jart, pend_dasar, pend_menengah, pertanian, industri, perdagangan, bantuan_kredit.

E. Kemiskinan Rumah Tangga Kab. Serang

Case Processing Summary

Unweighted Cases ^a		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	802	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	802	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		802	100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
dimens .00	0
ion0 1.00	1

Block 0: Beginning Block

Classification Table^{a,b}

Observed			Predicted		
			KRTS		Percentage Correct
			.00	1.00	
Step 0	KRTS	.00	313536	0	100.0
		1.00	10966	0	.0
Overall Percentage					96.6

a. Constant is included in the model.
b. The cut value is .500

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0	Constant	-3.353	.010	119128.423	1	.000	.035

Variables not in the Equation

			Score	df	Sig.
Step 0	Variables	desa	3091.318	1	.000
		jenis kelamin	1386.950	1	.000
		jart	35051.646	1	.000
		pend_dasar	.420	1	.517
		pend_menengah	582.162	1	.000
		pertanian	2539.384	1	.000
		industri	1800.637	1	.000
		perdagangan	336.698	1	.000
		bantuan_kredit	1106.729	1	.000
Overall Statistics			41377.194	9	.000

Block 1: Method = Enter

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	34892.693	9	.000
	Block	34892.693	9	.000
	Model	34892.693	9	.000

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	60959.117 ^a	.102	.399

a. Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been reached. Final solution cannot be found.

Classification Table^a

	Observed	Predicted		
		KRTS		Percentage Correct
		.00	1.00	
Step 1	KRTS	.00	1.00	
		312630	906	99.7
		8702	2264	20.6
	Overall Percentage			97.0

a. The cut value is .500

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a desa	1.459	.036	1628.447	1	.000	4.303
jenis kelamin	-.925	.051	323.573	1	.000	.397
jart	.706	.005	17407.099	1	.000	2.026
pend_dasar	-.538	.029	336.190	1	.000	.584
pend_menengah	-1.155	.058	398.836	1	.000	.315
pertanian	-.311	.031	103.436	1	.000	.733
industri	-1.293	.045	841.335	1	.000	.274
perdagangan	-.630	.046	188.945	1	.000	.533
bantuan_kredit	-17.906	202.237	.008	1	.929	.000
Constant	-7.504	.058	16666.698	1	.000	.001

a. Variable(s) entered on step 1: desa, jenis kelamin, jart, pend_dasar, pend_menengah, pertanian, industri, perdagangan, bantuan_kredit.

F. Kemiskinan Rumah Tangga Kota Tangerang

Case Processing Summary

Unweighted Cases ^a		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	767	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	767	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		767	100.0

- a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.
 b. The variable desa is constant for the selected cases. Since a constant term was specified, the variable will be removed from the analysis.

Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
dimens .00	0
ion0 1.00	1

Block 0: Beginning Block

Classification Table^{a,b}

Observed	Predicted		
	KRTKT		Percentage Correct
	.00	1.00	
Step 0 KRTKT .00	468982	0	100.0
1.00	21754	0	.0
Overall Percentage			95.6

- a. Constant is included in the model.
 b. The cut value is .500

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0 Constant	-3.071	.007	196037.409	1	.000	.046

Variables not in the Equation

	Score	df	Sig.
Step 0 Variables jenis kelamin	599.830	1	.000
jart	31156.212	1	.000
pend_dasar	3337.894	1	.000
pend_menengah	2695.763	1	.000
pertanian	19.893	1	.000
industri	488.238	1	.000
perdagangan	218.774	1	.000
bantuan_kredit	.259	1	.611
Overall Statistics	34094.250	8	.000

Block 1: Method = Enter

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	26084.811	8	.000
	Block	26084.811	8	.000
	Model	26084.811	8	.000

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	152017.576 ^a	.052	.170

a. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than .001.

Classification Table^a

Observed		Predicted		
		KRTKT		Percentage Correct
		.00	1.00	
Step 1	KRTKT	.00	1.00	
		468343	640	99.9
		21114	640	2.9
Overall Percentage				95.6

a. The cut value is .500

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	jenis kelamin	-.382	.031	152.318	1	.000	.682
	jart	.465	.003	18304.732	1	.000	1.592
	pend_dasar	.423	.023	338.765	1	.000	1.526
	pend_menengah	-.190	.025	56.784	1	.000	.827
	pertanian	-.178	.022	64.106	1	.000	.837
	industri	-.604	.019	1064.053	1	.000	.546
	perdagangan	-.657	.022	910.886	1	.000	.518
	bantuan_kredit	-.173	.042	16.698	1	.000	.841
	Constant	-5.030	.027	33896.639	1	.000	.007

a. Variable(s) entered on step 1: jenis kelamin, jart, pend_dasar, pend_menengah, pertanian, industri, perdagangan, bantuan_kredit.

G. Kemiskinan Rumah Tangga Kota Cilegon

Case Processing Summary

Unweighted Cases ^a		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	631	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	631	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		631	100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
.00	0
1.00	1

Block 0: Beginning Block

Classification Table^{a,b}

Observed		Predicted		
		KRTKC		Percentage Correct
		.00	1.00	
Step 0	KRTKC .00	89531	0	100.0
	1.00	2471	0	.0
Overall Percentage				97.3

a. Constant is included in the model.

b. The cut value is .500

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0 Constant	-3.590	.020	30991.342	1	.000	.028

Variables not in the Equation

	Score	df	Sig.	
Step 0 Variables	desa	1475.158	1	.000
	jenis kelamin	26.949	1	.000
	jart	5577.000	1	.000
	pend_dasar	752.323	1	.000
	pend_menengah	552.400	1	.000
	pertanian	1236.263	1	.000
	industri	7.082	1	.008
	perdagangan	.103	1	.748
	bantuan_kredit	161.973	1	.000
Overall Statistics	8340.801	9	.000	

Block 1: Method = Enter

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	6139.362	9	.000
	Block	6139.362	9	.000
	Model	6139.362	9	.000

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	16613.011 ^a	.065	.295

a. Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been reached. Final solution cannot be found.

Classification Table^a

	Observed	Predicted		
		KRTKC		Percentage Correct
		.00	1.00	
Step 1	KRTKC	.00	1.00	
		89133	398	99.6
		2358	113	4.6
	Overall Percentage			97.0

a. The cut value is .500

Variables in the Equation

		B.	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	desa	1.602	.067	567.932	1	.000	4.961
	jenis kelamin	.184	.075	5.935	1	.015	1.201
	jart	.552	.010	3198.538	1	.000	1.737
	pend_dasar	.622	.075	68.468	1	.000	1.863
	pend_menengah	.029	.085	.115	1	.734	1.029
	pertanian	1.697	.080	452.378	1	.000	5.459
	industri	1.078	.077	198.025	1	.000	2.939
	perdagangan	1.322	.089	218.446	1	.000	3.751
	bantuan_kredit	-17.257	500.480	.001	1	.972	.000
	Constant	-8.080	.117	4752.269	1	.000	.000

a. Variable(s) entered on step 1: desa, jenis kelamin, jart, pend_dasar, pend_menengah, pertanian, industri, perdagangan, bantuan_kredit.

H. Kemiskinan Rumah Tangga Kota Serang

Case Processing Summary

Unweighted Cases ^a		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	814	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	814	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		814	100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
dimens .00	0
ion0 1.00	1

Block 0: Beginning Block

Classification Table^{a,b}

Observed		Predicted		
		KRTKS		Percentage Correct
		.00	1.00	
Step 0	KRTKS .00	123080	0	100.0
	1.00	5307	0	.0
Overall Percentage				95.9

a. Constant is included in the model.

b. The cut value is .500

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0	Constant	-3.144	.014	50283.128	1	.000	.043

Variables not in the Equation

			Score	df	Sig.
Step 0	Variables	desa	2070.505	1	.000
		jenis kelamin	101.053	1	.000
		jart	12919.538	1	.000
		pend_dasar	2879.741	1	.000
		pend_menengah	1898.123	1	.000
		pertanian	59.298	1	.000
		industri	7.507	1	.006
		perdagangan	185.113	1	.000
		bantuan_kredit	1.071	1	.301
Overall Statistics			15032.889	9	.000

Block 1: Method = Enter

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	13809.419	9	.000
	Block	13809.419	9	.000
	Model	13809.419	9	.000

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	30397.199 ^a	.102	.350

a. Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been reached. Final solution cannot be found.

Classification Table^a

Observed		Predicted		
		KRTKS		Percentage Correct
		.00	1.00	
Step 1	KRTKS .00	122598	483	99.6
	1.00	4812	495	9.3
Overall Percentage				95.9

a. The cut value is .500

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	desa	.624	.033	357.279	1	.000	1.867
	jenis kelamin	-.163	.062	7.035	1	.008	.849
	jart	.531	.006	7015.052	1	.000	1.701
	pend_dasar	1.106	.045	600.021	1	.000	3.021
	pend_menengah	-17.174	198.151	.008	1	.931	.000
	pertanian	-.606	.041	214.085	1	.000	.546
	industri	-.251	.048	26.831	1	.000	.778
	perdagangan	-.830	.047	311.089	1	.000	.436
	bantuan_kredit	.311	.060	27.254	1	.000	1.364
	Constant	-6.869	.065	11065.964	1	.000	.001

a. Variable(s) entered on step 1: desa, jenis kelamin, jart, pend_dasar, pend_menengah, pertanian, industri, perdagangan, bantuan_kredit.

I. Kemiskinan Rumah Tangga Kota Tangerang Selatan

Case Processing Summary

Unweighted Cases ^a		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	889	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	889	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		889	100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

b. The variable desa is constant for the selected cases. Since a constant term was specified, the variable will be removed from the analysis.

Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
dimens .00	0
ion0 1.00	1

Block 0: Beginning Block

Classification Table^{a,b}

Observed			Predicted		
			KRTKTS		Percentage Correct
			.00	1.00	
Step 0	KRTKTS	.00	342043	0	100.0
		1.00	3891	0	.0
Overall Percentage					98.9

a. Constant is included in the model.

b. The cut value is .500

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0 Constant	-4.476	.016	77089.909	1	.000	.011

Variables not in the Equation

	Score	df	Sig.	
Step 0 Variables	jenis kelamin	465.334	1	.000
	jart	5552.144	1	.000
	pend_dasar	249.344	1	.000
	pend_menengah	329.219	1	.000
	pertanian	741.860	1	.000
	industri	340.741	1	.000
	perdagangan	1290.906	1	.000
	bantuan_kredit	295.047	1	.000
Overall Statistics	9536.261	8	.000	

Block 1: Method = Enter

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	11378.451	8	.000
	Block	11378.451	8	.000
	Model	11378.451	8	.000

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	31284.407 ^a	.032	.279

a. Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been reached. Final solution cannot be found.

Classification Table^a

	Observed	Predicted		
		KRTKTS		Percentage Correct
		.00	1.00	
Step 1	KRTKTS	.00	1.00	
		342043	3891	0
	Overall Percentage			100.0
				.0
				98.9

a. The cut value is .500

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	jenis kelamin	-16.744	155.526	.012	1	.914	.000
	jart	.663	.009	5693.813	1	.000	1.940
	pend_dasar	17.052	118.878	.021	1	.886	2.545E7
	pend_menengah	17.037	118.878	.021	1	.886	2.506E7
	pertanian	-15.752	141.778	.012	1	.912	.000
	industri	.919	.043	448.001	1	.000	2.506
	perdagangan	1.142	.041	770.534	1	.000	3.135
	bantuan_kredit	-17.070	230.213	.005	1	.941	.000
	Constant	-24.579	118.878	.043	1	.836	.000

a. Variable(s) entered on step 1: jenis kelamin, jart, pend_dasar, pend_menengah, pertanian, industri, perdagangan, bantuan_kredit.

LAMPIRAN 2 : HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS

a. Output Multikol Tingkat Provinsi

Correlation Matrix

	Constant	desa	jns kelamin	jart	Pend. dasar	Pend. menengah	pertanian	industri	perdagangan	Bantuan kredit	
Step 1	Constant	1.000	-.404	-.210	-.614	-.409	-.340	-.368	-.308	-.245	.016
	desa	-.404	1.000	.051	.217	-.108	.068	-.206	.009	-.049	-.051
	Jenis Kelamin	-.210	.051	1.000	.136	.159	.107	-.139	.000	-.051	-.021
	jart	-.614	.217	.136	1.000	-.071	.005	.009	-.025	-.024	-.078
	pendidikan dasar	-.409	-.108	.159	-.071	1.000	.457	-.072	-.103	-.093	-.009
	pendidikan menengah	-.340	.068	.107	.005	.457	1.000	.043	-.042	-.025	-.013
	pertanian	-.368	-.206	-.139	.009	-.072	.043	1.000	.569	.520	.022
	industri	-.308	.009	.000	-.025	-.103	-.042	.569	1.000	.411	-.020
	perdagangan	-.245	-.049	-.051	-.024	-.093	-.025	.520	.411	1.000	-.076
	bantuan kredit	.016	-.051	-.021	-.078	-.009	-.013	.022	-.020	-.076	1.000

b. Output Multikol Kabupaten Pandeglang

Correlation Matrix

	Constant	desa	jns kelamin	jart	Pend. dasar	Pend. menengah	pertanian	industri	perdagangan	bantuan kredit	
Step 1	Constant	1.000	-.402	-.183	-.594	-.580	-.316	-.221	-.166	-.063	-.051
	desa	-.402	1.000	.081	.176	.007	.033	-.249	-.043	-.097	-.035
	jns kelamin	-.183	.081	1.000	.134	.088	.061	-.135	.007	-.135	.054
	jart	-.594	.176	.134	1.000	.053	-.005	-.060	-.021	-.172	-.040
	pendidikan dasar	-.580	.007	.088	.053	1.000	.420	-.161	-.172	-.145	.016
	pendidikan menengah	-.316	.033	.061	-.005	.420	1.000	.026	-.013	-.014	-.015
	pertanian	-.221	-.249	-.135	-.060	-.161	.026	1.000	.519	.520	.032
	industri	-.166	-.043	.007	-.021	-.172	-.013	.519	1.000	.345	-.010
	perdagangan	-.063	-.097	-.135	-.172	-.145	-.014	.520	.345	1.000	-.131
	bantuan kredit	-.051	-.035	.054	-.040	.016	-.015	.032	-.010	-.131	1.000

c. Output Multikol Kabupaten Lebak

Correlation Matrix

	Consta nt	desa	jenis kelami n	jart	Pend. dasar	Pend. menen gah	pertan ian	indust ri	perdag angan	bantu an kredit	
Step 1	Constant	1.000	-.822	-.325	-.524	-.163	-.084	-.232	-.162	.047	.000
	desa	-.822	1.000	.146	.203	-.022	.023	-.113	.001	-.068	.000
	jenis kelamin	-.325	.146	1.000	.300	.226	.030	-.057	.033	-.063	.000
	jart	-.524	.203	.300	1.000	-.199	-.107	-.004	.038	-.185	.000
	pendidikan dasar	-.163	-.022	.226	-.199	1.000	.207	-.009	-.052	-.008	.000
	pendidikan menengah	-.084	.023	.030	-.107	.207	1.000	.131	.040	.037	.000
	pertanian	-.232	-.113	-.057	-.004	-.009	.131	1.000	.410	.223	.000
	industri	-.162	.001	.033	.038	-.052	.040	.410	1.000	.103	.000
	perdagangan	.047	-.068	-.063	-.185	-.008	.037	.223	.103	1.000	.000
	bantuan kredit	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	1.000

d. Output Multikol Kabupaten Tangerang

Correlation Matrix

	Consta nt	desa	jenis kelami n	jart	Pend. dasar	Pend. menen gah	pertan ian	indust ri	perdag angan	bantu an kredit	
Step 1	Constant	1.000	-.205	-.154	-.637	-.473	-.295	-.271	-.224	-.174	-.018
	desa	-.205	1.000	.031	.096	-.076	.037	-.057	.053	-.046	.041
	jenis kelamin	-.154	.031	1.000	.151	.033	.025	-.234	-.042	-.030	.002
	jart	-.637	.096	.151	1.000	-.113	-.018	-.084	-.103	-.024	-.103
	pendidikan dasar	-.473	-.076	.033	-.113	1.000	.355	-.041	-.042	-.067	-.006
	pendidikan menengah	-.295	.037	.025	.018	.355	1.000	.072	-.025	.000	-.018
	pertanian	-.271	-.057	-.234	-.084	-.041	.072	1.000	.461	.358	.062
	industri	-.224	.053	-.042	-.103	-.042	-.025	.461	1.000	.312	-.027
	perdagangan	-.174	-.046	-.030	-.024	-.067	.000	.358	.312	1.000	-.058
	bantuan kredit	-.018	.041	.002	-.103	-.006	-.018	.062	-.027	-.058	1.000

e. Output Multikol Kabupaten Serang

Correlation Matrix

	Constant	desa	jenis kelamin	jart	Pend. dasar	Pend. menengah	pertanian	industri	perdagangan	Bantuan kredit
Step 1 Constant	1.000	-.607	-.163	-.606	-.388	-.189	-.176	-.096	-.113	.000
desa	-.607	1.000	.083	.109	.035	.113	-.087	-.037	-.101	.000
jenis kelamin	-.163	.083	1.000	.118	.105	.080	-.142	-.026	-.035	.000
jart	-.606	.109	.118	1.000	-.011	-.120	-.243	-.144	-.067	.000
pendidikan dasar	-.388	.035	.105	-.011	1.000	.422	-.034	-.158	-.102	.000
pendidikan menengah	-.189	.113	.080	-.120	.422	1.000	.010	-.037	-.170	.000
pertanian	-.176	-.087	-.142	-.243	-.034	.010	1.000	.524	.495	.000
industri	-.096	-.037	-.026	-.144	-.158	-.037	.524	1.000	.348	.000
perdagangan	-.113	-.101	-.035	-.067	-.102	-.170	.495	.348	1.000	.000
bantuan kredit	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	1.000

f. Output Multikol Kota Tangerang

Correlation Matrix

	Constant	jenis kelamin	jart	Pend. dasar	Pend. menengah	pertanian	industri	perdagangan	bantuan kredit
Step 1 Constant	1.000	-.092	-.614	-.595	-.634	-.157	-.096	-.116	-.016
jenis kelamin	-.092	1.000	.059	-.014	.024	-.174	.027	-.015	.037
jart	-.614	.059	1.000	-.080	.048	-.010	-.097	-.079	-.024
pendidikan dasar	-.595	-.014	-.080	1.000	.740	-.078	-.142	-.074	.004
pendidikan menengah	-.634	.024	.048	.740	1.000	.004	-.095	-.037	-.027
pertanian	-.157	-.174	-.010	-.078	.004	1.000	.314	.271	-.006
industri	-.096	.027	-.097	-.142	-.095	.314	1.000	.332	-.059
perdagangan	-.116	-.015	-.079	-.074	-.037	.271	.332	1.000	-.027
bantuan kredit	-.016	.037	-.024	.004	-.027	-.006	-.059	-.027	1.000

g. Output Multikol Kota Cilegon

Correlation Matrix

		Constant	desa	jenis kelamin	jart	Pend. dasar	Pend. menengah	pertanian	industri	perdagangan	Bantuan Kredit
Step 1	Constant	1.000	-.135	-.136	-.551	-.563	-.569	-.490	-.538	-.476	.000
	desa	-.135	1.000	.024	.182	-.078	.054	-.062	-.026	.016	.000
	jenis kelamin	-.136	.024	1.000	.100	.053	.096	-.188	.032	.029	.000
	jart	-.551	.182	.100	1.000	-.037	.069	-.077	.023	.040	.000
	pendidikan dasar	-.563	-.078	.053	-.037	1.000	.762	.079	.037	.018	.000
	pendidikan menengah	-.569	.054	.096	.069	.762	1.000	.093	-.002	.038	.000
	pertanian	-.490	-.062	-.188	-.077	.079	.093	1.000	.743	.638	.000
	industri	-.538	-.026	.032	.023	.037	-.002	.743	1.000	.669	.000
	perdagangan	-.476	.016	.029	.040	.018	.038	.638	.669	1.000	.000
	bantuan kredit	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	1.000

h. Output Multikol Kota Serang

Correlation Matrix

		Constant	desa	jenis kelamin	jart	Pend. dasar	Pend. menengah	pertanian	industri	perdagangan	bantuan kredit
Step 1	Constant	1.000	-.174	-.125	-.703	-.611	.000	-.024	-.112	-.073	-.133
	desa	-.174	1.000	.159	.006	-.014	.000	-.267	-.161	-.073	-.046
	jenis kelamin	-.125	.159	1.000	.086	-.019	.000	-.214	.030	.006	-.037
	jart	-.703	.006	.086	1.000	.050	.000	-.167	-.094	-.034	.009
	pendidikan dasar	-.611	-.014	-.019	.050	1.000	.000	-.034	.028	-.128	.113
	pendidikan menengah	.000	.000	.000	.000	.000	1.000	.000	.000	.000	.000
	pertanian	-.024	-.267	-.214	-.167	-.034	.000	1.000	.332	.319	.013
	industri	-.112	-.161	.030	-.094	.028	.000	.332	1.000	.260	.069
	perdagangan	-.073	-.073	.006	-.034	-.128	.000	.319	.260	1.000	-.058
	bantuan kredit	-.133	-.046	-.037	.009	.113	.000	.013	.069	-.058	1.000

i. Output Multikol Kota Tangerang Selatan

Correlation Matrix

	Constant	jenis kelamin	jart	pendidikan dasar	Pend. menengah	pertanian	industri	perdagangan	Bantuan kredit
Step 1	Constant	1.000	.000	.000	-1.000	-1.000	.000	.000	.000
	jenis kelamin	.000	1.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	jart	.000	.000	1.000	.000	.000	.044	-.016	.000
	pendidikan dasar	-1.000	.000	.000	1.000	1.000	.000	.000	.000
	pendidikan menengah	-1.000	.000	.000	1.000	1.000	.000	.000	.000
	pertanian	.000	.000	.000	.000	.000	1.000	.000	.000
	industri	.000	.000	.044	.000	.000	.000	1.000	.527
	perdagangan	.000	.000	-.016	.000	.000	.000	.527	1.000
	bantuan kredit	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	1.000

